



*Schiff
Pauze Palembangke lauweddygaw
Kerang an wanyat basung
wada ngungga kedulata an an
Jawara Kerang an an 19 Juli 1821 1824
by Bantuan alpa anglyfal
D.M.16*

Palembang

Citra Kota Palembang dalam Arsip



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA 2019

Citra
Kota Palembang
dalam Arsip



Arsip Nasional Republik Indonesia



**Pengarah**

Dr. Mustari Irawan, MPA
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

Dr. M. Taufik, M.Si
Deputi Bidang Konservasi Arsip

Penanggung Jawab Program

Drs. Agus Santoso, M.Hum
Direktur Layanan dan Pemanfaatan

Penanggung Jawab Teknis

Eli Ruliawati, S.Sos, MAP
Kepala Sub Direktorat Pemanfaatan Arsip

Koordinator

Beny Oktavianto, S.Kom

Penulis

Neneng Ridayanti, S.S, M.Hum

Editor

Neneng Ridayanti, S.S, M.Hum

Penelusur Arsip

Desi Mulyaningsih, S.Kom
Beny Oktavianto, S.Kom
Nugrahita Rizky, S.Hum

Penerjemah Arsip

Nugrahita Rizky, S.Hum

Desain & Layout

Beny Oktavianto, S.Kom

Citra
Kota Palembang
dalam Arsip

Cover:

Presiden Sukarno meresmikan tiang pancang pertama Jembatan Sungai Musi di Palembang, (sekarang dikenal sebagai Jembatan Ampera), 10 April 1962

Sumber: ANRI, Kempen 620410 DD 10

Penerbit

Arsip Nasional Republik Indonesia
Jalan Ampera Raya No.7, Jakarta Selatan 12560
Telp. (+6221) 780 5851 Fax. (+6221) 781 0280

ISBN 978 602 6503 17 6



Hak Cipta © 2019

Hak Publikasi pada Arsip Nasional Republik Indonesia
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit.





LAMBANG PEMERINTAH KOTA PALEMBANG



H. HARNOJOYO, S.SOS

Walikota Palembang

Periode 2018-2023



FITRIANTI AGUSTINDA, SH

Wakil Walikota Palembang

Periode 2018-2023



DRS. RATU DEWA, M.SI.
Sekretaris Daerah Kota Palembang
Periode 2019



H. DARMAWAN, SH
Ketua DPRD Kota Palembang
Periode 2014 - 2019

WALIKOTA PALEMBANG DARI MASA KE MASA



R. Hanan
Walikota Palembang
Periode 1945 - 1947



M.R. Sudarman Ganda Subrata
Walikota Palembang
Periode 1950 - 1954



R.A. Abusamah
Walikota Palembang
Periode 1954 (Pejabat Sementara)



R.M. Ali Amin, SH
Walikota Palembang
Periode 1955 - 1960



MGS. H.A. Rahman
Walikota Palembang
Periode 1960 - 1962
(Pejabat Sementara)



AKBP. II. Abdullah Kadir
Walikota Palembang
Periode 1962 - 1968



H.M. Rasjad Nawawi
Walikota Palembang
Periode 1968 - 1970



RHA. Arifai Tjek Yan
Walikota Palembang
Periode 1970 - 1978



Drs. H.A. Dahlan HY
Walikota Palembang
Periode 1978 - 1983



H. Cholil Azis, SH
Walikota Palembang
Periode 1983 - 1993



H. Husni
Walikota Palembang
Periode 1993 - 2003



H. Eddy Santana Putra
Walikota Palembang
Periode 2003 - 2013



H. Romi Hertan
Walikota Palembang
Periode 2013 - 2015



H. Harnojoyo, S.Sos
Walikota Palembang
Periode 2015 - 2018



H. Harnojoyo, S.Sos
Walikota Palembang
Periode 2018 - 2023



SAMBUTAN





SAMBUTAN

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PALEMBANG

Kota Palembang merupakan Kota Dagang dan Kota Jasa sebagai Ibu Kota Propinsi Sumatera Selatan secara geografis luas wilayah 400,61 km² dengan jumlah penduduk ± 1,7 Juta, terdiri dari 18 Kecamatan, 107 Kelurahan. Di tengah-tengah Kota Palembang mengalir Sungai Musi yang membelah seberang Ilir dan seberang Ulu, yang dihubungi sarana transportasi berupa jembatan Ampera berdiri megah yang menjadi icon Kota Palembang.

Kota Palembang juga sama dengan kota-kota lain di Indonesia terdiri dari beranekaragam agama dan budaya serta berbagai suku menjadikan keunikan tersendiri bagaikan indahnya kemilau Sungai Musi di malam hari. Rasa persaudaraan yang kuat menjadikan Kota Palembang jauh dari hingar-bingar dan gejolak, karena penduduk Kota Palembang terangkul dalam cinta damai sebagaimana yang tercantum dalam Visi Kota Palembang yakni Palembang Emas Darussalam 2023.

Keanekaragaman Kota Palembang merupakan model dan wama suatu kota yang terus berbenah dan membangun dari segala bidang, tidak terlepas dari bidang Kearsipan karena dengan arsip kita bisa mengetahui perjalanan sejarah bangsa umumnya dan sejarah Kota Palembang khususnya yang penuh dinamika dan terekam dalam anip, baik dalam arsip konvensional maupun dalam arsip media baru.

Arsip menjadi deposit sejarah yang terus bertambah serta akurat sesuai perkembangan zaman dan terus menerus untuk dilestarikan, karena mengingat arsip merupakan aset Negara dan sebagai warisan nasional.

Khazanah arsip mengenai Kota Palembang banyak sekali baik menyangkut adat istiadat, kebudayaan, kerajinan, pariwisata serta kehidupan politik, ekonomi, kunjungan kenegaraan, dan arsip yang merefleksikan keindahan seni dan budaya Kota Palembang. Dalam rangka penguatan otonomi daerah, arsip tersebut diinformasikan kepada masyarakat Kota Palembang melalui program ANRI yang disebut dengan Citra Daerah. Program Citra Daerah pada dasarnya merupakan upaya mengungkapkan kembali memori kolektif daerah yang terekam dalam Citra Kota Palembang. Program Citra Daerah bertujuan meningkatkan pemahaman dan

kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai budaya yang berkembang di lingkungannya, memupuk kebanggaan dan rasa cinta terhadap Tanah Air, menghargai keberagaman, membangun solidaritas, mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa, sekaligus mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Citra Daerah merupakan satu kesatuan informasi yang menggambarkan dinamika kolektif sebuah daerah yang terbentuk di atas kesadaran sejarah yang dialami bersama, sehingga menjadi landasan moral yang kokoh sebagai pijakan menatap ke masa depan yang lebih baik dalam pengembangan Otonomi Daerah yang lebih kuat dan berkarakter menjadi prasyarat tegaknya NKRI.

Semoga dengan diterbitkannya buku Citra Daerah ini oleh ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) diharapkan dapat mendorong berkembangnya program lanjutan Pemerintah Kota Palembang khususnya di bidang Kearsipan.

Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami atas nama Pemerintah Kota Palembang menyampaikan ucapan terima kasih kepada ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) atas diterbitkannya Buku Citra Daerah Kota Palembang.

Palembang, 17 Juni 2019

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kota Palembang



Ir. H. Gunawan, M.T.P



SAMBUTAN

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau, berbagai suku bangsa, beragam agama dan budaya. Keunikan Indonesia terletak pada keanekaragaman tersebut. Keanekaragaman yang disandang Indonesia menjadi indah bagaikan warna-warni pelangi. Keanekaragaman Indonesia tersebut kemudian mengkristal dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Keanekaragaman dan warna-warni indah Indonesia tergambar secara beruntun dalam perjalanan sejarahnya yang penuh dinamika. Perjalanan sejarah Indonesia tersebut terekam dalam arsip, baik dalam arsip konvensional maupun dalam arsip media baru. Arsip menjadi deposit sejarah yang terus bertumbuh secara akurat. Sehingga tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa: "Dari semua asset yang ada, arsip adalah asset negara yang paling berharga" (Sir Arthur Doughty, 1924). Wilayah boleh membelah diri, daerah boleh mengurus diri sendiri-sendiri, tetapi arsip tetap sebagai jati diri. Arsip merupakan warisan nasional. Oleh karenanya arsip perlu diselamatkan, dipelihara, dan dilestarikan. Keberadaban suatu bangsa dapat dilihat dari seberapa utuh dan lengkap arsipnya (Sir Arthur Doughty, 1924).

Khazanah arsip mengenai Kota Palembang banyak tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), baik menyangkut adat istiadat, kebudayaan, kehidupan politik, ekonomi, kunjungan kenegaraan, dan arsip yang merefleksikan keindahan seni dan budaya Kota Palembang. Dalam rangka penguatan otonomi daerah, arsip tersebut diinformasikan kembali kepada masyarakat Kota Palembang melalui program ANRI yang disebut dengan Citra Daerah. Program Citra Daerah pada dasarnya merupakan upaya mengungkapkan kembali memori kolektif daerah yang terekam dalam Citra Kota Palembang Dalam Arsip. Program Citra Daerah bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai budaya yang berkembang di lingkungannya, memupuk kebanggaan dan rasa cinta terhadap Tanah Air, menghargai keberagaman, membangun solidaritas, memupuk rasa persatuan dan memperkokoh kesatuan bangsa, sekaligus mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Citra Daerah ini diterbitkan dengan dukungan data yang terkandung dalam arsip. Citra Daerah merefleksikan bagaimana suatu daerah ikut berperan, memberi warna dan corak dalam sejarah perjalanan bangsa dari masa ke masa. Khazanah arsip tersebut memberikan informasi yang akurat dan obyektif mengenai perjalanan sebuah daerah dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang terekam dalam arsip baik dalam bentuk teks, peta, maupun foto mengenai sebuah daerah. Citra Daerah memberikan gambaran tentang kearifan lokal yang dimiliki sebuah daerah.

Citra Daerah merupakan satu kesatuan informasi yang menggambarkan dinamika kolektif sebuah daerah. Sebuah dinamika kolektif yang terbentuk di atas kesadaran sejarah yang dialami bersama. Kesadaran sejarah ini diharapkan dapat menjadi landasan moral yang kokoh untuk pijakan melompat ke masa depan yang lebih baik. Kesadaran sejarah ini merupakan modal dasar yang kokoh dalam memperkuat pengembangan Otonomi Daerah. Daerah yang kuat dan berkarakter menjadi prasyarat tegaknya NKRI. Citra Daerah Kota Palembang ini masih jauh dari sempurna. Keterbatasan halaman menjadikan buku Citra Daerah ini hanya memuat sebagian kecil dari data kearsipan mengenai Kota Palembang yang tersimpan di ANRI. Namun demikian kehadiran Citra Daerah ini diharapkan dapat mendorong berkembangnya program lanjutan dari Pemerintah Daerah Kota Palembang khususnya di bidang kearsipan.

Jakarta, 17 Juni 2019

Kepala,

Dr. Mustari Irawan, MPA

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Peta Wilayah Kota Palembang	iv
Lambang Pemerintah Kota Palembang	v
Walikota Palembang	vi
Wakil Walikota Palembang	vii
Sekretaris Daerah Kota Palembang	viii
Ketua DPRD Kota Palembang	ix
Walikota Palembang dari masa ke masa	x
Sambutan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	xii
Sambutan Kepala Arsip Nasional RI	xiv
Daftar Isi	xvi
PENDAHULUAN	1
A. Sejarah Masa Kesultanan	4
B. Sejarah Masa Kolonial Belanda	6
C. Sejarah Masa Pendudukan Jepang	10
D. Sejarah Masa Kemerdekaan	13
CITRA KOTA PALEMBANG DALAM ARSIP	17
A. Geografis	18
B. Politik dan Pemerintahan	40
C. Keagamaan	90
D. Budaya dan Pariwisata	116
E. Pendidikan dan Olahraga	150
F. Kesehatan	170
G. Ekonomi dan Industri	182
H. Infrastruktur	222
I. Transportasi	280
Daftar Arsip	297
Daftar Pustaka	310
Penutup	312





PENDAHULUAN



PENDAHULUAN

Palembang saat ini merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam perjalanan sejarahnya Palembang mempunyai makna penting baik fungsi maupun peranannya. Sebagaimana disebutkan dalam Arsip Palembang, asal usul nama Palembang berasal dari Bahasa Jawa, Liembang berarti membersihkan/membilas/mencuci, tepatnya “mencuci emas” -disebutkan bahwa di sungai kecil di Bukit Siguntang ditemukan emas dan logam-. Kemudian di depan kata Liembang ditambahkan preposisi “Pa” sehingga menjadi kata Pa Liembang yang diubah menjadi Palembang. Kekayaan Sumber Daya Alam (mineral) yang ada di Palembang yaitu emas, air raksa, besi, belerang/sulfur, timah, batu bara, kalium nitrat (salpeter) Garam (di daerah Lematang, Ogan dan Kikim), batu kapur serta minyak bumi (ANRI, Arsip Palembang No.62/2).

Pusat Kota Palembang secara historis awalnya terletak di Tanah Tinggi. Berdasarkan jejak arkeologi, jantung Kota Palembang berada di Bukit Siguntang. Seiring perkembangan zaman, terjadi pergeseran pusat Kota Palembang. Menurut Van Leur dalam bukunya *“Indonesian Trade and Society”*, kota-kota Kuno umumnya mula-mula terjadi dari pusat-pusat kekuasaan raja atau bawahnya. Keraton atau kediaman penguasa menjadi inti dari suatu pertumbuhan kota. Begitupun dengan Kota Palembang terjadinya pergeseran pusat kota selain beralasan sebagaimana menurut Van Leur juga peranan faktor ekonomi. Begitupun perubahan secara politis, yakni Runtuhnya Kerajaan Sriwijaya dengan munculnya Kesultanan Palembang, mengakibatkan pusat kota mengalami pergeseran. Berdirinya Keraton Kuto Gawang di hilir Sungai Musi menyebabkan pusat kota berpindah dari barat ke timur. Dengan berdirinya Keraton Kuto Lama setelah Keraton Kuto Gawang dibakar VOC pada tahun 1659, Kota Palembang berpindah ke daerah Beringin Janggut. Sultan Mahmud Badaruddin I karena alasan strategi perang, pada tahun 1776-1803 mendirikan Keraton Kuto Besak di sebelah hulunya. Bagi Pemerintah Belanda ketika menduduki Palembang, keraton sebagai pusat kota dijadikan modal awal untuk membangun kantor komisariss dan gedung dewan, pusat pemerintahan, administrasi dan ekonomi Belanda untuk membentuk citra kolonialnya.

Karakteristik geografi Palembang yang menonjol dengan lokasinya yang strategis sebagai “Pesisir Pantai Sumatera Tenggara yang menguntungkan”. Dimana, Kerajaan Sriwijaya dapat meraih posisi puncak dalam perniagaan Asia Tenggara dengan Cina, India dan Timur Tengah mulai abad VII sampai XI. Jaringan perdagangan yang membentang di Sepanjang Selat Malaka dari Sumatera bagian Tenggara sampai Semenanjung Malaya tetap sangat penting artinya hingga sekarang. Palembang selama paruh pertama abad XX tidak hanya berfungsi sebagai jembatan politik tetapi juga jembatan ekonomi yang menghubungkan kehidupan perniagaan Singapura dengan Jawa maupun Sumatera. Pengaruh bentuk alamiah Palembang yang dikenal sejak

zaman Belanda sebagai “Venesia dari Hindia”, daerah dataran rendah Palembang memiliki banyak jaringan sungai besar dan anak sungai yang tidak saja menyediakan jalur perhubungan utama tetapi juga menjadi mata pencaharian pokok penduduknya. Beberapa penulis Belanda pernah memberikan kesan keramaian lalu lintas perahu-perahu di perairan Sungai Musi yang mirip dengan pemandangan *Venetiaansche gondels*. Penduduk Palembang dan sekitarnya sejak dulu menjuluki daerah mereka dengan sebutan *Batang Hari Sembilan*. Keberadaan sarana pengairan telah memberikan komunitas pertanian sumber daya air yang cukup berlimpah. Daerah-daerah rawa pesisir sangat cocok untuk ditanami tanaman padi, dan tanaman ekspor Palembang yaitu kopi dan karet yang berasal dari pedalaman. Daerah Palembang bukan hanya kaya dengan kopi dan karet juga memiliki cadangan batubara, khususnya minyak bumi menjadi sumber terbesar ekspor minyak bumi Hindia Timur Belanda pada penghujung periode Kolonial. Instalasi minyak bumi sepenuhnya dikendalikan perusahaan barat dan pada tahun 1920 an merangsang sejumlah besar pekerja dari daerah lain Hindia Timur. Pengaruh para pendatang ini tidak hanya terasa di bidang ekonomi tetapi juga dalam pengembangan pendidikan barat dan partai-partai politik nasional.

Palembang pada masa prakolonial dijadikan ibukota Kesultanan Palembang (1553-1814). Sejak zaman Kolonial Belanda (awal abad XX) kota tersebut dijadikan ibukota Karesidenan Palembang. Karesidenan Palembang merupakan satu dari tiga karesidenan yang ada di wilayah Pesisir Timur Sumatera (*Sumatra's Oostkust*). Di bagian barat adalah Karesidenan Bengkulu dan Lampung di bagian selatan. Menurut *Encyclopedie van Nederlandsch Indie*, batas-batas wilayah Palembang adalah Jambi di sebelah utara, Bengkulu di sebelah barat, Bengkulu dan Lampung sebelah selatan serta Selat Sunda dan Bangka sebelah timur.

Daerah Palembang bukan hanya kaya dengan kopi dan karet saja, daerah ini juga memiliki cadangan batu bara dan khususnya minyak bumi yang berlimpah, menjadi sumber terbesar ekspor minyak bumi Hindia Timur Belanda pada penghujung periode kolonial. Peran Palembang dalam konstelasi politik dan ekonomi di Hindia Belanda semakin diperhitungkan sejak sumber-sumber emas, minyak bumi dan batu bara ditemukan sekitar penghujung abad XIX. Palembang memasuki dasawarsa kedua abad XX sebagai salah satu kawasan *wingewesten* (daerah untung). Palembang masa itu dianggap *oedjan mas* oleh penduduk bumiputera serta tempat singgah dan perantaraan para pedagang atau pencari kerja serta kelompok profesional. Pada tahun 1930, Palembang berkembang menjadi kota terbesar dengan penduduk paling padat se-Sumatera. Terbukti kemudian bahwa kelahiran dan perkembangan pergerakan nasional di Palembang sejalan dengan arus masuk pendatang dan ideology dari luar. Hampi semua aliran dan ideology kepartaian yang berekembang di daerah Palembang diperkenalkan langsung oleh para pialang dari luar.

Secara kultural, keruangan Palembang membuat tiga pembagian yang jelas antara Kota Palembang, iliran Palembang dan uluan Palembang. Kesempatan besar untuk orang uluan menjadi warga kota muncul ketika *gemeente* memberi kesempatan untuk

orang-orang terdidik menempati lapangan pekerjaan baru. Bagi orang iliran, penduduk yang berasal dari uluan bagaimanapun adalah orang-orang pendatang dari pedalaman Palembang. Realitas yang muncul, penduduk iliran merupakan kelompok masyarakat yang dilahirkan dengan bakat dagang.

Pada awal kemerdekaan, Kota Palembang termasuk dalam kategori kota "A". Pada masa Revolusi (masa pendudukan Belanda) Palembang dikembalikan sebagai *Stadsgemeente*, namun pada masa pemerintahan RIS (Republik Indonesia Serikat), Palembang ditetapkan sebagai *kota swapraja* atau *kotapraja*. Sejak pengakuan kedaulatan dan kembalinya Indonesia dalam bentuk negara kesatuan, Pemerintah Kota Palembang bermaksud untuk mengejar ketertinggalan pembangunan secara fisik. Setelah melewati masa transisi kemerdekaan yang penuh pergolakan dalam mencari identitas berupa simbol kota pada tahun 1950-an, maka pada tahun 1960-an dihadirkan di Palembang sebuah mozaik penuh makna dalam bentuk jembatan di atas Sungai Musi yang kemudian dikenal sebagai Jembatan Ampera. Dibangunnya Jembatan Ampera merupakan suatu simbol keinginan kuat untuk maju dengan meninggalkan keadaan serba keterbelakangan di masa lampau dan menyongsong zaman yang lebih maju dan modern.

A. SEJARAH MASA KESULTANAN

Kota yang dikenal dengan julukan "Bumi Sriwijaya" dalam catatan sejarah merupakan pusat kerajaan Bahari Buddha terbesar di Asia Tenggara. Abad VII dan VIII merupakan masa tumbuh dan berkembangnya Kerajaan Sriwijaya dari segi politik, ekonomi-perdagangan dan kebudayaan. Oleh karena itu, para pedagang muslim pun singgah di ibukota Kerajaan Sriwijaya yang bercorak Buddha untuk melakukan hubungan dagang. Berita dari I-Tsing seorang musafir Cina dan agamawan Buddha dalam perjalanannya ke India menceritakan kehadiran kapal-kapal para pedagang muslim dari Arab (Ta-shih) dan Persi (Po-sse) di Pelabuhan Bhoga (Palembang). Namun, belum dapat dikatakan di daerah Palembang –yang dianggap sebagai pusat Kerajaan Sriwijaya- terjadi proses islamisasi besar-besaran mengingat kekuatan politik Kerajaan Sriwijaya yang bercorak Buddha masih kuat. Sejak Kerajaan Sriwijaya runtuh sekitar abad XIV, mulailah proses Islamisasi sehingga pada akhir abad XV muncul komunitas muslim di Palembang. Pada akhir abad XVI Palembang merupakan *enclave* Islam terpenting bahkan pusat Islam di bagian selatan "Pulau Emas".

Reputase Palembang tidak hanya dikenal sebagai pusat perdagangan yang banyak dikunjungi pedagang Arab/Islam pada abad-abad kejayaan Sriwijaya, tetapi juga dibantu kebesaran Malaka yang tak pernah melepaskan keterlibatannya terhadap Palembang sebagai tanah asalnya. Palembang sekitar awal abad XVI berada di bawah pengaruh kekuasaan Kesultanan Demak. Saat itu, penduduk Palembang berdagang dengan Malaka dan Pahang dengan menggunakan 10 hingga 12 Jung setiap tahunnya untuk membawa beras dan bahan makanan, katun, rotan, lilin, madu, anggur, emas, besi, kapur barus dan lainnya. Kedudukan Palembang sebagai pusat penguasa muslim

terlihat dari nama-nama tokoh yang tercatat menjadi sultan pertama Kesultanan Palembang yaitu Sultan Abdurrahman Khalifat al-Mukminin Sayyid Al-Iman/Pangeran Kusumo Abdurrahman/Kiai Mas Hindi sejak 1648-1693, memerintah selama 45 tahun. Sultan-sultan selanjutnya adalah Sultan Muhammad Mangsoor, Sultan Agoeng (Kamaroedin), Sultan Mohamad Badaroedin, Sultan Achmad Nadjamoedin, Sultan Mohamad Baharoedin, Sultan Mohamad Machmoed Badaroedin, Soesoehoenan Hoessein Dhiaoedin –sebagaimana dijelaskan dalam arsip Inventaris Palembang No. 62/2 tentang laporan tahunan Residensi Palembang tahun 1834-1835-. Kedatangan Islam di Palembang menjadikan wilayah ini salah satu pusat berkembangnya tradisi intelektual baik menyangkut keagamaan maupun sastra. Antara abad XVIII dan XIX, Palembang telah melahirkan sejumlah ulama penting dalam penulisan naskah dan kitab keagamaan yang produktif, diantaranya Syekh Abdus Samad al-Palimbani, Syihabuddin bin Abdullah Muhammad, Muhammad Muhyiddin bin Syihabuddin, Kemas Fakhruddin, Muhammad Ma’ruf bin Abdullah, dll. Para ulama tersebut telah memberikan kontribusi penting terhadap munculnya tradisi keilmuan Islam di Palembang khususnya dan Nusantara-Melayu umumnya dengan mengarang dan menerjemahkan kitab keagamaan sehingga masyarakat muslim di wilayah ini dapat mengakses berbagai pengetahuan keislaman.

Bangkitnya Palembang sebagai salah satu pusat kebudayaan Islam di dunia Melayu ini tidak dapat lepas dari munculnya Kesultanan Palembang pada awal abad XVII, yang sejak awal para sultannya menunjukkan minat yang khusus pada bidang keagamaan dan senantiasa mendorong tumbuhnya pengetahuan dan iklim keilmuan di bawah *patronase* mereka. Ada dua faktor utama yang melatarbelakangi munculnya Palembang sebagai pusat tradisi Intelektual Islam, yaitu:

- Situasi sosial politik Kesultanan Palembang yang sangat kondusif untuk pengembangan iklim keilmuan, ketika ulama sering menjadi patron keilmuan para sultan;
- Kontak intelektual dan transmisi keilmuan yang terjadi antara ulama Nusantara-Melayu (termasuk para ulama Palembang dan para ulama di pusat dunia Islam, khususnya Mekah dan Madinah (Haramain)).

Sejak awal berdiri Kesultanan Palembang, para sultan sudah banyak berinteraksi dengan para ulama Arab yang menjelang pertengahan abad XVII beberapa diantaranya berhasil mencapai kedudukan yang menonjol di Istana Kesultanan Palembang. Para sultan Palembang periode awal sangat proaktif melakukan usaha-usaha untuk menarik perhatian sejumlah ulama Arab agar mau berkunjung dan tinggal di wilayahnya. Salah satu upaya yang dilakukan para sultan Palembang untuk menarik minat para migran Arab agar datang ke Palembang dengan melalui kerjasama ekonomi. Maka sejak abad XVII para migran Arab terutama dari Hadramaut mulai berdatangan ke Palembang dalam jumlah yang semakin besar. Bahkan sebagian dari para migran Arab memilih untuk menjalin kekerabatan melalui pernikahan dan akhirnya tinggal menetap di Palembang. Upaya para sultan Palembang seperti ini tidak hanya dilakukan terhadap

para migran Arab tetapi juga terhadap etnik lain. Misalnya Cina, sehingga Kesultanan Palembang pada masa itu menjadi sangat kosmopolitan.

Selain kitab keagamaan, tradisi kesusastraan di Palembang menghasilkan genre sastra lain seperti karya kesejarahan, hikayat, syair, prosa dan pantun. Palembang tumbuh sebagai pusat kegiatan penulisan sastra Melayu Islam menjelang pertengahan abad XVIII. Para sastrawan tersebut diantaranya merupakan pejabat istana, seperti Sultan Mahmud Badaruddin, Pangeran Panembahan Senapati, Ahmad bin Abdullah, Kiai Rangga Setyanandita, Pangeran Tumenggung Karta Menggala dan Demang Muhiddin. Sultan Mahmud Badaruddin (1766-1852) merupakan salahsatu penulis yang menonjol di Palembang. Sultan Mahmud Badaruddin memegang tampuk pemerintahan antara tahun 1804-1821, merupakan seorang sultan yang terpelajar, cerdas dan berbakat sastra. Karyanya yang terkenal “Syair Burung Nuri”, sebuah alegori bertemakan kerinduan dan percintaan yang ditulis dalam pengasingannya di Ternate karena melawan kolonial Belanda. Semakin kuatnya kekuasaan Belanda pada akhir abad XVIII membuat penulisan kreatif, termasuk di Palembang mengalami kemunduran.

B. SEJARAH MASA KOLONIAL BELANDA

Kesultanan Palembang, kontak pertama dengan VOC terjadi pada tahun 1610, namun kepentingannya tidak dipedulikan sehingga selalu terjadi kerenggangan. Pada 1658, wakil dagang VOC, Ockersz beserta pasukannya dibunuh dan dua buah kapalnya, *Wachter* dan *Jacatra* dirampas. Akibatnya pada 4 November 1659 terjadi peperangan antara Kesultanan Palembang dan VOC di bawah pimpinan Laksmana Joan van der Laen. Keraton dibakar demikian pula Kuta dan permukiman penduduk Cina, Portugis, Arab dan bangsa-bangsa lainnya yang berada di seberang Kuta. Akhirnya, Kota Palembang dapat direbut kembali oleh pasukan Palembang. Pembangunan kota kemudian dilakukan, kecuali Masjid Agung yang hingga kini masih dapat disaksikan, meskipun sudah ada beberapa perubahan sejak dibangun 26 Mei 1748 M, pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin I (m. 1724-1758).

Pada masa pemerintahan Ahmad Najamuddin (m.1758-1776), yang merupakan putra Sultan Mahmud Badaruddin, syiar Agama Islam semakin pesat. Pada waktu itu, berkembang hasil sastra keagamaan dari tokoh-tokoh, antara lain Abdus Samad al-Palimbani, Kemas Fakhrudin, Kemas Muhammad bin Ahmad, Muhammad Muhyiddin bin Syekh Syihabuddin dan Muhammad Ma’ruf bin Abdullah. Pada Juli 1819 Kesultanan Palembang diserang oleh pasukan Hindia-Belanda yang dikenal dengan Perang Menteng (diambil dari kata *muntinghe*). Terjadi serangan besar-besaran oleh pasukan Belanda dengan armada yang dipimpin J.C. Wolterboek itu dapat dipukul mundur oleh prajurit-prajurit Kesultanan Palembang pada Oktober 1819. Tetap pihak Belanda pada Juni 1821 mencoba lagi melakukan penyerangan dengan banyak armada di bawah pimpinan Jenderal de Kock. Sultan Mahmud Badaruddin ditangkap kemudian diasingkan ke Ternate.

Sejak 7 Oktober 1823 Kesultanan Palembang dihapuskan dan langsung berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda dengan menempatkan Residen Jon Cornelis Reijnst. Residen tidak diterima oleh Sultan Ahmad Najamuddin Prabu Anom dan ia pun memberontak sehingga diasingkan ke Banda, kemudian dipindahkan ke Manado.

Belanda telah berkuasa atas Palembang tahun 1821. Karesidenan Palembang meliputi tiga *afdeeling* yang masing-masing dikepalai oleh Asisten Residen. Peletak dasar kebijakan kolonial Belanda di Palembang adalah J.J. van Sevenhoven yang merupakan seorang *advocaat fiscal* yang diangkat sebagai Komisariss Pemerintah (*Regeeringscommisaris*) yang bertugas sebagai penasehat Residen Palembang (1821-1824). Administrasi kolonial Belanda hanya berjalan efektif untuk daerah Kota Palembang dan sekitarnya, itupun baru tercapai sejak tahun 1870-an. Sedangkan sebagian besar daerah pedalaman masih tetap berada di bawah pengaruh para *pasirah* yang relatif belum banyak terjangkau kekuasaan kolonial, hal ini menyebabkan posisi pasirah semakin kuat. Keberadaan sebuah dusun saat itu, sangat bergantung pada *marga* dan hanya mungkin diakui dengan legitimasi adat yang dipegang *pasirah*.

Ketika liberalisme bangkit di Eropa yang menyebabkan timbulnya Politik Etis di tanah jajahan, membawa implikasi yang tidak kecil bagi perkembangan Kota Palembang dengan lahirnya Undang-Undang Desentralisasi, yaitu terbentuknya kota otonom, *Gemeente* Palembang sejak 1 April 1906. Palembang tidak lagi berada di bawah *kontroleur* seperti periode sebelumnya. Berdasarkan Staatsblad No. 126 Tahun 1906 tentang keputusan mengenai desentralisasi di Palembang dan pembentukan Dewan *Gemeente* (kotamadya) di Palembang. Dimana anggota dewan berjumlah 13 (tiga belas) orang yang terdiri dari 8 orang eropa, 3 pribumi dan 2 orang timur asing. Dengan demikian, Kota Palembang yang merupakan bagian dari Karesidenan Palembang, sejak tahun 1906 menjadi *Stadsgemeente* yang dikepalai oleh seorang *Burgemeester* (Walikota) dan mempunyai Dewan Lokal dengan diberi hak otonomi yang sangat terbatas. *Gemeente* hanya diberi hak untuk mengatur dan mengurus rumahtangga sendiri, sedangkan polisi dan pengadilan (catatan civil) berada di bawah kekuasaan Residen. *Burgemeester* (Walikota) Palembang pertama kali diangkat secara dipilih mulai tahun 1919 dan dijabat oleh orang Belanda. L.G. Lavire ditunjuk sebagai walikota pertama dan diteruskan oleh le Cocq d'Armandville. Secara fisik pembangunan Kota Palembang dimulai pada masa walikota pertama ini. Pembangunan masa kepemimpinan dua pejabat ini hanya sebatas penghapusan image masyarakat lokal tentang masih hadirnya kesan Kesultanan Palembang lewat kemegahan Benteng Kuto Besak di pusat kota pada tepian Sungai Musi. Atas dasar kebutuhan hiburan untuk orang Eropa, Keraton Kuto Besak dipagari dengan bangunan kolonial.

Sejak awal masa Kolonial (abad XIX) Kota Palembang memiliki sistem pemerintahan sendiri. Kepala pemerintahan bumiputera dipegang oleh dua orang demang yang masing-masing mengepalai Distrik Seberang Ulu dan Distrik Seberang Ilir. Pusat kota, kantor-kantor pemerintahan dan swasta serta pasar ada di kedua distrik. Setiap distrik dibagi lagi ke dalam kelompok-kelompok kampung. Kota Palembang yang

secara geografis dibelah oleh Sungai Musi yang terbagi dalam Distrik Seberang Ulu dan Distrik Seberang Ilir. Distrik Seberang Ulu secara administratif dibagi dalam 14 (empat belas) kampung, sementara Distrik seberang Ilir sebagai pusat kota dipecah dalam 37 (tigapuluh tujuh) kampung. Masing-masing kampung memuat dua atau lebih sistem guguk. Reorganisasi pemerintahan tahun 1912 tidak banyak mengubah tatanan kehidupan penduduk kota, kecuali pada kelompok tertentu. Perubahan besar secara mendasar yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Kota Palembang dalam membangun kota ini adalah merubah secara perlahan dari kota air –yang memiliki ketergantungan dengan sungai-sungai- ke kota daratan yang dialihkan ke jalan-jalan. Transportasi perahu untuk menuju pusat kota berganti dengan kendaraan darat. Kebutuhan akan angkutan kota dengan terciptanya ruang daratan dimulai pada tahun 1907 dengan mulai diperkenalkan kereta kuda. Mulai tahun 1930, seiring meluasnya pembangunan infrastruktur jalan serta terjadi booming karet di Palembang, jumlah kendaraan roda empat meningkat tajam. Di sisi lain, pemerintah kolonial mengeluarkan kebijakan atas air bersih, sehingga penduduk lokal yang mempunyai kebiasaan mengkonsumsi air sungai sebagai minuman diperkenalkan dengan mengkonsumsi air ledeng. Maka dibangunlah menara air, *watertoren* di atas Kantor *Gemeente* Palembang yang pengerjaannya dari tahun 1926-1931. *Watertoren* saat itu merupakan gedung termegah dan termewah serta pencakar langit pertama di Palembang.

Pada tahun 1921, ruang daratan pertama tercipta sepanjang 20 KM mulai dari jalan belakang Banteng sampai Sungai Tengkuruk, dengan menembok Sungai Kapuran, Sungai Sayangan dan Sungai Rendang. Jalan di atas Sungai Tengkuruk itu terbentuk mulai dari pelabuhan muara Sunngai Tengkuruk yang diperpanjang sampai ke daerah Talang Jawa. Ketika dibangun Pelabuhan Boom pada tahun 1908, timbul kebutuhan untuk memperluas ruang daratan ke arah sebelah timur pada tahun 1932. Maka pemerintah *gemeente* membuat jalan tembusan ke Pelabuhan Boom.

Untuk menghubungkan pusat kota dengan kompleks pemukiman Eropa di Talang Semut dengan menimbun Sungai Kapuran dan melewati Sungai Sekanak. Ruang daratan semakin luas ketika dibangun jalan tembusan antara daerah 1 Ulu di tepi Sungai Ogan dengan wilayah Plaju di tepi Sungai Komering. Selanjutnya perbaikan jalan difokuskan dengan menjadikan Sungai Tengkuruk sebagai jalan utama, *boulevard* kota yang diperlebar dan diperkeras dengan cara menimbun semua bagian sungai dengan memakai puruh yang banyak terdapat di perbukitan Palembang. Jalan yang dibangun di atas Sungai Tengkuruk yang dibuat pada tahun 1921, 1931 dan 1938 dimodernisasi dengan membuat kantor-kantor, bank dan gedung-gedung untuk keperluan perdagangan. Sampai seperempat abad ke-20, keberadaan *gemeente* menjadikan konstruksi ruang fisik Kota Palembang menjadi lebih teratur. Pembagian wilayah kota dapat dibedakan menjadi, *zona Perniagaan* (memanjang sepanjang aliran Sungai Musi, Sungai Rendang sampai Sungai Sekanak), *zona Industri (Industrial Estate)*, *zona Perkantoran* yang diantaranya difasilitasi *societiet* dan *schouwburg, watertoren*, serta *zona pemukiman (real estate)*. Secara politis, Kota Palembang sebagai ibu kota

karesidenan tetapi di sisi lain merupakan ibu kota dari perdagangan untuk seluruh wilayah karesidenan. Sebagai ibu kota dagang, Kota Palembang memiliki letak strategis terhubung secara luas dengan daerah-daerah sekelilingnya. Kota Palembang menjadi sentra dan penyaji utama dalam perhubungan baik lewat jalan air maupun jalan darat.

Daerah Palembang mulai berkembang menjadi salah satu *wingewesten* (daerah untung) paling penting bagi pemasukan keuangan pemerintah kolonial di Sumatera selama dasawarsa ketiga dan keempat abad XX. Dengan semakin terbukanya prospek ekonomi daerah, para pendatang sebagian besar dari berbagai kelompok etnis luar daerah Palembang ketimbang dari pelosok pedalaman atau penduduk daerah Palembang.

Kegiatan sosial politik terutama tumbuhnya pergerakan kebangsaan di Pulau Jawa pada awal tahun 1900-an, mempengaruhi para pemuda dan tokoh-tokoh masyarakat di Palembang untuk juga bangkit mendirikan organisasi politik kebangsaan. Pada Januari 1914, kepengurusan Sarikat Islam Palembang tersusun secara resmi dengan Ketuaanya Raden Nangling, pedagang kaya dan pemilik Hotel Nangling di Kota Palembang dan Cik Entik Zainal Abidin (wakil ketua) serta Abdul Karim menduduki jabatan sekretaris. Sarekat Islam tampil begitu dominan dan menempatkan gambaran diri (*self-image*) yang baru dalam tatanan sosial dan kebudayaan. Muhammadiyah sekitar tahun 1928 di Kampung Talang Jawa Kota Palembang didirikan atas prakarsa K.A. Kaharoeddin, seorang ulama Palembang yang pernah mengenyam pendidikan agama di Mekah. Muhammadiyah memilih 4 Ulu Kota Palembang sebagai pusat kegiatan dengan tokoh yang cukup berpengaruh yaitu H.Akil. Pada tahun 1930-an muncul beberapa tokoh Partai Syarikat Islam Indonesia dan memiliki pengaruh sampai dengan periode Proklamasi Kemerdekaan, yaitu A.S. Matcik, Hamzah Koentjit, R. Fanani dan K.H. Azhari. Selain itu, di Palembang pun berdiri organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan lainnya antara lain Partai Nasionalis Indonesia (PNI) yang tumbuh menjadi salah satu cabang PNI terkuat di luar Jawa, Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-baru) dan Partai Indonesia (Partindo), Partai Indonesia Raya (Parindra), Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo), dll.

C. SEJARAH MASA PENDUDUKAN JEPANG

Pendudukan Jepang di Indonesia dilatarbelakangi ambisi untuk menguasai negara-negara Asia dan merebutnya dari negara-negara imperialis barat. Tujuannya selain untuk kepentingan supremasi (keunggulan dan kekuasaan) Jepang juga menjadikan daerah-daerah di Asia sebagai tempat menanamkan modal, serta memasarkan hasil industrinya. Pendudukan Jepang di Indonesia pada awalnya di Kota Tarakan tanggal 10 Januari 1942, kemudian melebarkan wilayah kekuasaannya hingga Minahasa, Balikpapan, Ambon, Pontianak, Makassar, Banjarmasin, Palembang dan Bali kurun waktu Januari-Februari 1942. Jepang mendapat "warisan" dari Belanda yang sudah menjadikan daerah Palembang sebagai salah satu *wingewest* terpenting di luar Jawa.

Namun Jepang mempunyai kepentingan lebih khusus dengan Palembang bukan hanya karena Sumber Daya Alam melainkan juga letak strategisnya dalam politik regional Jepang-Asia Tenggara. Posisi Palembang sangat terkait erat dengan kepentingan ekonomi dan strategi militer Jepang dalam invasinya ke kawasan selatan. Sebagian besar sumber daya alam yang dibutuhkan Jepang –minyak bumi, batu bara, timah dan karet- terdapat di Sumatra khususnya Palembang. Selain itu, Jepang mempunyai kepentingan di bidang militer. Dengan terlebih dahulu menduduki Palembang, berarti Jepang memperoleh basis pertahanan cukup kuat.

Letnan Jenderal Sakuno Todayoshi, memimpin Divisi ke-38 yang bertugas menduduki Palembang (Sumatera Selatan) yang anggotanya merupakan campuran pasukan Brigade Tentara ke-25 dan Brigade Tentara ke-16. Pada tanggal 12 Februari 1942, Jepang berhasil mendaratkan pasukannya di Pulau Bangka. Pulau Bangka dijadikan pangkalan sebelum menembus pertahanan Palembang. Tiga pesawat pengintai Jepang sempat melakukan manuver di atas instalasi minyak Plaju dan Sungai Gerong. Pada tanggal 14 Februari 1942, Jepang mulai menerjunkan ratusan pasukan payung dan berhasil menguasai Palembang sepenuhnya dalam tempo satu hari. Sedangkan daerah-daerah lain di Sumatera berhasil dikuasai Jepang pada minggu kedua bulan Maret 1942. Kekuatan pertahanan Belanda/Sekutu di Palembang tidak siap menghadapi serangan mendadak. Komandan KNIL Palembang L.N.W Vogelsang dengan pasukan berjumlah 300 orang tidak mampu menahan invasi Jepang. Residen Palembang van Oranje bersama ribuan orang Belanda, Indo dan unsur Sekutu terpaksa harus mendekam dalam kamp-kamp penjara.

Sejak bulan September 1942, Jepang menyusun administrasi pemerintahan militer dengan bentuk permanen di Sumatera sejak bulan September 1942. Jepang masih mengikuti “warisan” susunan administrasi pemerintahan Hindia Belanda dengan istilah-istilah Bahasa Jepang. Pulau Sumatera dibagi ke dalam 10 (sepuluh) karesidenan (*shu*), masing-masing dikepalai seorang *chokan* (residen). Daerah yang lebih kecil (*afdeeling* dan distrik warisan Belanda), menjadi *bunshu* dan *fuku bunshu* yang masing-masing dikepalai seorang *bunshu-co* dan *fuku-bunshu-co*. Pejabat setingkat kontrolir (*sonco*) yang semasa Hindia Belanda selalu dijabat orang kulit putih (Belanda) sekarang dipegang bumiputra. Posisi itu di Palembang oleh bekas Demang zaman Belanda atau mantan *pasirah*. Hampir semua pejabat lama pribumi tetap dipertahankan, namun tugasnya sekarang adalah melayani pemerintahan militer Jepang. Tujuan ekonomi perang Jepang di Palembang jauh lebih penting ketimbang membangun kerjasama politik. Jepang berusaha semaksimal mungkin mengamankan sumber-sumber daya yang dianggap strategis tanpa perlu melakukan kompromi politik dengan para pemimpin lokal Palembang. Jepang menyita semua “warisan” milik bekas pemerintahan Hindia Belanda. Setiap orang yang dianggap menghambat atau memperlambat pengambilan kekuasaan dan kekayaan pemerintah Hindia Belanda dihadapi dengan tindakan keras. Jepang tidak sepenuhnya berhasil “menyelamatkan” instalasi minyak bumi yang berada di daerah Palembang. Serdadu-serdadu KNIL sempat membumihanguskan

instalasi minyak Sungai Gerong. Pada tahun 1942, instalasi minyak Plaju memberi sekitar 9.000.000 barel (82 persen) dari total produksi minyak yang berjumlah sekitar 11.200.000 barrel kepada pemerintah militer Jepang. Sejak tahun 1943 pemulihan dan perbaikan instalasi-instalasi minyak terus menerus dikerjakan pemerintah pendudukan Jepang. Disamping memperbaiki kilang-kilang yang lama, Jepang mencoba membuka ladang-ladang minyak baru.

Tambang batu bara Bukit Asam di Tanjung Enim yang rusak berat mulai diperbaiki lagi sejak 1943. Begitupun Jepang berhasil mengoperasikan kembali 8 (delapan) perkebunan besar (*estates*) di Palembang dan memperkenalkan jenis-jenis tanaman baru seperti jarak dan kina. Sebagian *romusha* dikerahkan untuk menggarap perkebunan-perkebunan tersebut. *Romusha* selain dipekerjakan di perkebunan juga ditugaskan memperbaiki dan membangun proyek-proyek perang Jepang (jalan, jembatan, mendirikan barak-barak militer atau bangunan pemerintah). Bahkan ada *romusha* yang dikirim mengerjakan proyek-proyek sampai ke Malaya, Thailand, Burma dan Filipina. Rekrutmen kuli *romusha* di Palembang sering membuat cemas para penduduk, karena penuh intimidasi dan pemerasan. Disamping itu, Jepang tidak menyediakan bahan pangan yang memadai sehingga rakyat mulai berani melakukan perlawanan secara terbuka. Rakyat lebih baik menolak secara terang-terangan daripada menjadi “kuli kerja paksa sampai mati atau sekurang-kurangnya menjadi sampah di tengah jalan”. Beberapa penduduk di Desa Bandan, Palembang menyerang *soncho* dan *guncho* yang datang ke desa ini pada tanggal 26 Agustus 1942 sehingga beberapa pemuda ditangkap bahkan ada yang ditembak mati. Namun, rakyat di Puninjawa dan Baturaja melakukan hal yang sama menyerang *soncho* dan *guncho*. Pada pertengahan kedua tahun 1943, terjadi serangkaian pergolakan diantaranya di Desa Air Itam. Pemicu pemberontakan karena Pasirah Mahidun yang semena-mena memakai wewenang dan kuasa dalam menentukan calon *romusha*. Dalam pemberontakan ini, *Guncho* terluka parah, seorang polisi tewas dan beberapa orang menderita luka-luka. Selepas pemberontakan, tekanan dan eksploitasi terhadap *romusha* tetap berjalan. Melalui *tonarigumi* dan *kumiai* dilakukan pengawasan lebih ketat terhadap penduduk.

Sejak awal tahun 1944 pendudukan pemerintah Jepang di Palembang perhatiannya lebih banyak menitikberatkan perhatian pada urusan pertahanan terutama untuk melindungi kepentingan perang Jepang di Sumatera. Jepang merekrut kaum muda untuk dididik dan dilatih bidang kemiliteran dengan membentuk *heiho* dan *gyugun*. Kaum pergerakan yang bekerja keras atas nama badan-badan propaganda Jepang di Palembang menanamkan jiwa nasionalisme dan patriotisme untuk cinta tanah air (Indonesia). Beberapa pemimpin pergerakan diantaranya, A.K. Gani, A.S. Matcik, Mohammad Syafei, Noengtjik A.R silih berganti memberi wejangan di asrama-asrama *Heiho* dan *Gyugun*. Sebelum Jepang dikalahkan sekutu pertengahan Agustus 1945, semua pemuda yang dimiliterisasi Jepang (*Heiho* dan *Gyugun*) sudah terkena pengaruh nasionalisme Indonesia yang dipropagandakan kaum pergerakan. Pemerintah pendudukan Jepang mulai melunakkan tekanan dengan mengajak serta para

pemimpin pergerakan untuk ikut bergabung dengan wadah-wadah bentukan Jepang. Hampir semua tokoh pergerakan di Palembang telah terserap ke dalam pranata seperti *Tokkoku*, *Hokokai*, dan *Shu Sangi Kai*. Sikap moderat tersebut dimungkinkan sejalan dengan perintah yang diberikan langsung dari Tokyo. Perdana Menteri Koiso yang berpidato di depan Parlemen Jepang tanggal 7 September 1944 menjanjikan bahwa : akan ada “kemerdekaan pada waktu yang akan datang” di Indonesia. Sejak September 1944 sampai dengan akhir Februari 1945, janji tersebut tidak pernah diwujudkan. Sebagian kaum pergerakan di Palembang mulai menilai pemerintah pendudukan Jepang tidak bersungguh-sungguh mewujudkan kemerdekaan Indonesia.

Kebijakan politik pemerintah pendudukan Jepang di Palembang terlihat lebih maju dibanding daerah-daerah lain di Sumatera. Pada akhir 1944, Raden Hanan diangkat sebagai walikota Palembang, satu-satunya orang Indonesia yang pernah menjabat walikota selama masa Pendudukan Jepang. Sejak akhir 1944, pemerintah militer Jepang mulai membuka konsesi politik lebih besar. Pemerintah juga memberi kesempatan pendidikan lebih luas untuk penduduk Sumatera, tidak lagi terbatas pada tingkat karesidenan. Hal ini memberi jalan bagi sebagian pemuda dan pemimpin Indonesia untuk membuka “politik isolasi” Jepang di setiap “*shu*”. Misalnya Jepang membuka secara resmi *Shihan Gakko* (Sekolah Pertanian) dan sekolah latihan kepemimpinan (*Gunsei Gakko*). Pertemuan-pertemuan lewat jalur pendidikan tidak hanya memberi kesempatan untuk memperdalam keahlian, tetapi juga untuk saling mengenal, bertukar pikiran dan informasi keadaan pergerakan daerah masing-masing. Namun, Dua bulan terakhir menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Jepang menggunakan berbagai cara untuk membatasi ruang gerak kaum pergerakan di Sumatera. Jepang menjalankan pengawasan media massa, termasuk sensor terhadap siaran radio. Namun, kaum pergerakan di Palembang dapat menyimak berita dan perkembangan terakhir Perang Pasifik berkat peranan Noentjick AR dan Mailan yang bekerja pada bagian operator radio *Dahomei* secara sembunyi-sembunyi membuka “zegel” saluran Hodohan untuk kepentingan tugas sebagai wartawan *Palembang Shimboen*

Penggabungan aspirasi politik kaum pergerakan tampak dari sebuah dewan penasehat tingkat Sumatera *Chuo Sangi In* pada bulan Maret 1945 yang berhasil menyusun keanggotaan secara lengkap pada bulan Mei 1945. Jumlah anggotanya 40 orang, terdiri dari 15 orang yang dipilih *Shu Sangi Kai* (wakil karesidenan) dan sisanya diangkat oleh pemerintahan militer. Dewan tersebut mengadakan Sidang Pertama di Bukittinggi pada 26 Juli 1945, dari Palembang diwakili DR. A.K. Gani (Wakil Ketua *Shu Sangi Kai* Palembang), Ir Ibrohim (wakil *Shu Sangi Kai*), Abdul Rozak, K.H. Cik Wan dan Pangeran Cik Mat. Rumusan pokok yang dihasilkan oleh sidang tersebut agar dibentuk segera suatu badan “Panitia Penyelidikan Kemerdekaan Indonesia” (PPKI) dan disarankan supaya dilakukan koordinasi dengan Jakarta. Pemerintah Jepang di Sumatera mengakui peran Gani, Muhammad Syafei dan Adinegoro sebagai tokoh-tokoh Sumatera paling terkemuka. Ketiganya diizinkan untuk melakukan kunjungan ke beberapa daerah di Sumatera bulan Juni dan awal Agustus 1945 untuk memberi

penerangan kepada pemimpin-pemimpin daerah tentang rencana pembentukan PPKI. Pada tanggal 7 Agustus 1945 di Jakarta dibentuk PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang anggotanya terdiri dari 27 orang termasuk tambahan 6 orang. Wakil dari Sumatera untuk mengikuti sidang PPKI di Jakarta yang direncanakan berlangsung pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu Mr Abdul Abbas (Lampung), Mr. T. Mohammad Hasan (Sumatera Timur), dan dr. M. Amir. Akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu dan berakhir masa pendudukan Jepang di Indonesia sehingga tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamkan kemerdekaannya.

D. SEJARAH MASA KEMERDEKAAN

Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tahun 1945, tentara sekutu dapat menjalankan kekuasaan secara efektif di daerah Palembang sejak awal Maret 1946. Beberapa pemimpin Palembang, khususnya Adnan Kapau Gani, melakukan berbagai upaya untuk menempatkan Palembang sebagai salah satu pusat kekuatan terpenting di bidang ekonomi dan militer Republik di Sumatera. Reorganisasi dan pematapan tubuh pemerintahan dijalankannya sebelum sekutu tiba di Palembang. *Oesaha Perdamaian Rakjat Daerah Palembang* (OPRDP) dibentuk pada akhir September 1945 dan merupakan prakarsa lokal (otonomi) untuk melindungi kepentingan daerah Palembang dari situasi revolusi yang selalu ditandai aksi-aksi radikal dan anarkis. Secara formal OPRDP merupakan front bersama pemerintah (eksekutif) dan legislatif (KNI Palembang). Dengan membubarkan KNI lama dan menggantinya dengan OPRDP semakin besar peluang Gani memperkokoh kekuatan perjuangan demi mencapai tujuan bersama sesuai cita-cita proklamasi. Dalam hal ini, khususnya pengambilalihan asset-asset lokal dari tangan asing. Menjelang pertengahan 1946, sebelum diadakan perundingan dengan pihak Sekutu, sumber-sumber minyak bumi daerah Palembang sudah berada di tangan Republik. Palembang di bawah kepemimpinan A.K. Gani dibanding daerah lain di Sumatera lebih siap menghadapi sekutu. OPRDP pun dibubarkan 11 Oktober 1945 karena pengonsolidasian kekuatan-kekuatan revolusi ke dalam pematangan rencana perundingan dengan sekutu telah selesai.

Perundingan pertama antara pemerintah Republik dengan pihak Sekutu di Palembang dimulai pada bulan Maret 1946 dengan agenda hanya terbatas pada soal-soal keamanan, khususnya garis demarkasi atau "koridor keamanan" Kota Palembang. Dalam agenda perundingan berikutnya Gani mulai mengalihkan perhatian pada status industri minyak dan penyaluran hasil industri ini untuk kepentingan kedua belah pihak. Pemerintah Republik di Palembang perlahan-lahan menikmati keuntungan besar yang diperoleh dari minyak. Ladang-ladang minyak daerah pedalaman Palembang tetap dijaga TRI dan laskar-laskar di bawah kesatuan "Batalyon Minyak" TRI. Tugas laskar dan TRI bukan lagi berperang melainkan berdagang atau usaha lain yang produktif seperti pengadaan logistik dan perbekalan bagi sipil dan militer seluruh daerah di Sumatera. Pengaruh Gani dalam lingkaran militer Republik bukan tanpa legitimasi formal. Pada

tanggal 15 November 1945, Presiden Sukarno mengangkat Gani sebagai Organisator dan Koordinator TKR Sumatera serta pada pertengahan 1947, A.K. Gani menduduki jabatan Menteri Kemakmuran. Keberhasilan Gani dalam mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan lokal Palembang lewat *olie diplomatie* dapat dengan leluasa menyalurkan minyak bumi dan batu bara serta memajukan kegiatan perdagangan. Pada pertengahan tahun 1947, Jalan perundingan telah ditempuh dan kerjasama A.K. Gani dengan pihak sekutu dapat berjalan dengan baik, meski sesekali terjadi insiden kecil akibat melanggar garis demarkasi. Situasi daerah Palembang secara keseluruhan relatif aman. Tentara-tentara Jepang dari daerah pedalaman telah dipulangkan sekutu ke negeri Jepang. Kurun waktu 1945-1946, Palembang menikmati keuntungan dari usaha perdagangan. Dilihat dari letak geografisnya, Palembang merupakan jembatan antara Jawa dengan Sumatera serta Palembang memiliki beberapa “keunggulan komparatif” seperti sumber-sumber minyak dan batu bara serta komoditas pertanian rakyat (beras, karet, kopi dan lada).

Para pemimpin Republik di Palembang relatif berhasil mengendalikan daerah ini Ketika berada di bawah pengawasan pasukan Sekutu, sejak tanggal 22 Oktober 1945 sampai 9 November 1946. Garis politik pemerintahan Republik ditaati dan agresifitas para pemuda dapat diredam. Hanya satu kali terjadi bentrokan fisik serius dengan pihak Sekutu saat “Zona Keamanan” yang diberlakukan di Kota Palembang dilanggar sejak 25 Maret 1946. Pertempuran berlangsung lima hari namun dapat diredakan lewat jalan perundingan.

Dibandingkan dengan daerah lain di Sumatera, Palembang lebih siap menyelesaikan urusan internal dengan perundingan. Belanda datang kembali ke Palembang dan daerah-daerah lain di Indonesia, menurut perspektif republik tidak untuk menggantikan sekutu melainkan akibat dari Perjanjian Linggarjati yang ditandatangani kedua belah pihak. Pelanggaran-pelanggaran seringkali terjadi menjelang penandatanganan persetujuan 25 Maret 1947. Belanda di mata para pejuang Palembang dianggap sebagai pihak yang lebih dulu memulai pelanggaran. Palembang termasuk salah satu daerah di Indonesia yang pertama melibatkan diri dalam kancah peperangan serius. Bentrokan bersenjata terjadi pada bulan Desember 1946 dan mencapai klimaks tanggal 1 Januari 1947, yang dikenal dengan “Pertempuran Lima Hari Lima Malam”. Pertempuran dapat diredakan pada tanggal 4 Januari 1947 dan diakhiri di atas meja perundingan. TRI dan laskar bersenjata harus mundur sekitar 20 KM dari Kota Palembang, namun mereka tidak menganggap hal itu sebagai bentuk kekalahan. Penarikan mundur pasukan bersenjata dari Kota Palembang merupakan pukulan telak bagi Republik, khususnya prajurit TRI karena mencerminkan kelemahan Republik dalam berhadapan dengan Belanda. Kekuatan Republik semakin melemah, sementara Belanda mampu melebarkan sayap kekuasaan hingga ke luar Kota Palembang. Motivasi Ekonomi menjadi landasan Belanda untuk menduduki Palembang. Belanda siap dengan rencana operasi militer yang ditujukan merebut daerah-daerah strategis dari sudut ekonomi.

Revolusi Indonesia di Palembang tidak hanya mengubah struktur masyarakat, juga membangun sesuatu yang sama sekali baru atau memperbaharui yang lama. Belanda didukung dengan keunggulan militernya berupaya menjalin aliansi dengan membangkitkan sentimen lokal melalui politik federal *Negara Sumatera Selatan* (NSS). Namun, institusi birokrasi yang pernah dibangun sebelumnya dan hendak dipakai untuk menunjang perjalanan negara federal itu sudah dihancurkan oleh revolusi. Primordialisme lama sudah tidak relevan lagi dengan ideologi nasionalisme Republik yang terlihat tumbuh semakin maju. Periode akhir Revolusi menyaksikan terbukanya peluang ekonomi yang hadir bersama perundingan penyelesaian konflik Indonesia-Belanda. Kesempatan terbuka luas bagi mereka yang siap memetik keuntungan dari perubahan. Rakyat tidak lagi berbicara tentang *status quo* kolonial tetapi bersiap-siap menyongsong masa depan negara baru Republik kembali menjadi Negara Kesatuan pada tahun 1950.

Pengakuan kedaulatan Indonesia berarti hidup sebagai warga bangsa yang merdeka dari kekuasaan penjajah Belanda. Palembang pasca kolonial dimulai setelah pengakuan kedaulatan. Penduduk Palembang dalam dekade 1950-an, mengalami perkembangan pesat mencapai empat atau lima kali lipat dari masa perang kemerdekaan. Arus urbanisasi tersebut selain datang dari Pulau Jawa, Sumatera Utara dan Sumatera Tengah juga mengalir masyarakat dari pedalaman. Palembang sebagai kota dagang dan industri, di mana kilang-kilang minyak dan penggilingan karet di kota membutuhkan pegawai dan karyawan, menyebabkan imigrasi berjalan pesat.

Pada masa Revolusi (masa pendudukan Belanda), Palembang dikembalikan sebagai *Stadsgemeente*, namun pada masa pemerintahan RIS (Republik Indonesia Serikat), Palembang ditetapkan sebagai *kota swapraja* atau *kotapraja*. Sejak pengakuan kedaulatan dan kembalinya Indonesia dalam bentuk negara kesatuan, Pemerintah Kota Palembang bermaksud untuk mengejar ketertinggalan pembangunan secara fisik.

Dekolonisasi fisik Kota Palembang bentuknya baru dapat dilihat dalam ranah proses Indonesianisasi fisik kota setelah pengakuan kedaulatan. Proses dekolonisasi fisik Kota Palembang mencapai puncaknya setelah dibangunnya simbol kota berupa Jembatan Ampera. Jembatan ini *master piece* pemerintahan pasca kolonial di Palembang, simbol kota, simbol provinsi, simbol pulau, bahkan simbol nasional. Pembangunan Jembatan Ampera bukan sesuatu yang bersifat *mercusuar* semata, namun dalam konsepsi Sukarno bahwa membangun Jembatan Ampera merupakan bagian dari membangun identitas bangsa, berkenaan dengan konsepnya dalam mewujudkan *character and national building*.

Reputasi Palembang yang dikenal sejak dulu sebagai pusat perdagangan, pusat berkembangnya tradisi intelektual, saat ini Palembang merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia. Kota yang berbatasan dengan Kabupaten Banyu Asin sebelah utara, timur dan barat serta sebelah selatan dengan Kabupaten Muara Enim terlintasi oleh 4 (empat) sungai besar, yaitu Sungai Musi, Sungai Ogan, Sungai Keramasan serta

Sungai Komering. Secara geografis, Kota Palembang strategis karena dilalui oleh jalan Lintas Sumatera yang menghubungkan antar daerah di Pulau Sumatera.

Di Kota Palembang, penduduknya selain Etnis Melayu yang merupakan penduduk asli Palembang, juga ada warga pendatang (Minangkabau, Bugis, Madura, Banjar) serta warga keturunan (Tionghoa, Arab dan India). Beberapa wilayah di Kota Palembang ada yang menjadi ciri khas dari suatu komunitas, diantaranya Kampung Kawitan yang merupakan wilayah komunitas Tionghoa, Kampung Al Munawar, Kampung Assegaf, Kampung Al Habsyi, Kuto Batu, 19 Ilir, Kampung Jamalullail yang merupakan wilayah Komunitas Arab. Bahasa Palembang adalah dialek lokal dari bahasa Melayu yang sekaligus merupakan *Lingua Franca* atau bahasa pemersatu di Provinsi Sumatera Selatan. Kota yang memiliki lambang Bangunan Sirah atau Rumah Palembang, dipilih oleh Dewan Olimpiade Asia pada tanggal 25 Juli 2014 menjadi tuan rumah pendukung pada Pesta Olahraga Asia XVIII tahun 2018, yang merupakan ajang Olahraga wilayah Asia. Kota yang dikenal dengan julukan “Bumi Sriwijaya” saat ini dipimpin oleh Walikota terpilih, Harnojoyo serta Wakil Walikota, Fitrianti Agustinda. Walikota periode 2018-2023, dengan visi “Palembang EMAS DARUSSALAM 2023”, ingin mewujudkan Kota Palembang Elok Madani Aman dan Sejahtera serta menjadi kota yang aman, damai, tentram, makmur dan sejahtera serta adanya harmoni antara kehidupan manusia dan alam.



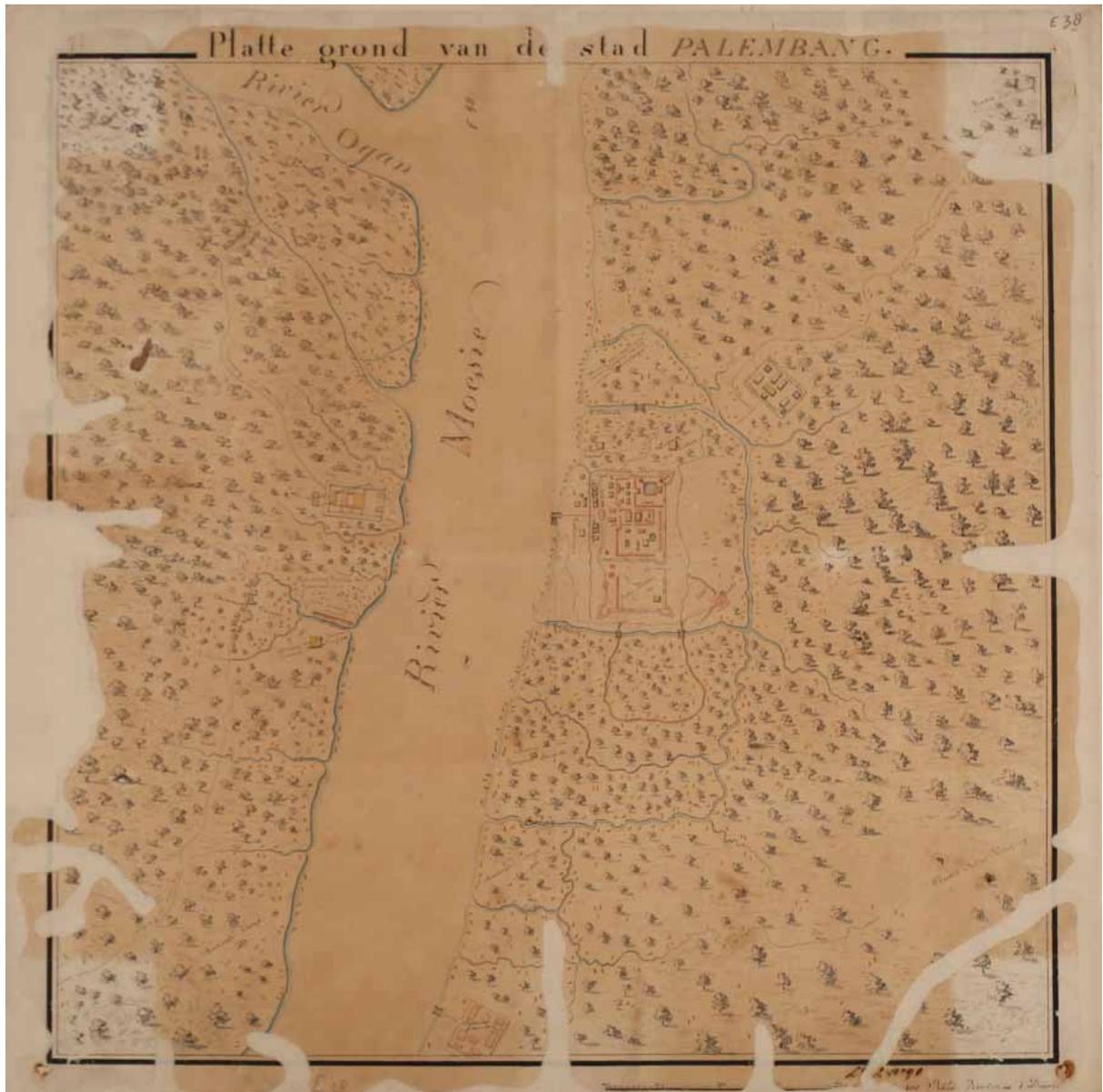
**CITRA KOTA PALEMBANG
DALAM ARSIP**



Geografis



Karakteristik geografi Palembang yang menonjol dengan lokasinya yang strategis sebagai “Pesisir Pantai Sumatera Tenggara yang menguntungkan”. Pengaruh bentuk alamiah Palembang yang dikenal sejak zaman Belanda sebagai “Venesia dari Hindia”, daerah dataran rendah Palembang memiliki banyak jaringan sungai besar dan anak sungai yang tidak saja menyediakan jalur perhubungan utama tetapi juga menjadi mata pencaharian pokok penduduknya. Batas-batas wilayah Palembang adalah Jambi di sebelah utara, Bengkulu di sebelah barat, Bengkulu dan Lampung sebelah selatan serta Selat Sunda dan Bangka sebelah timur.



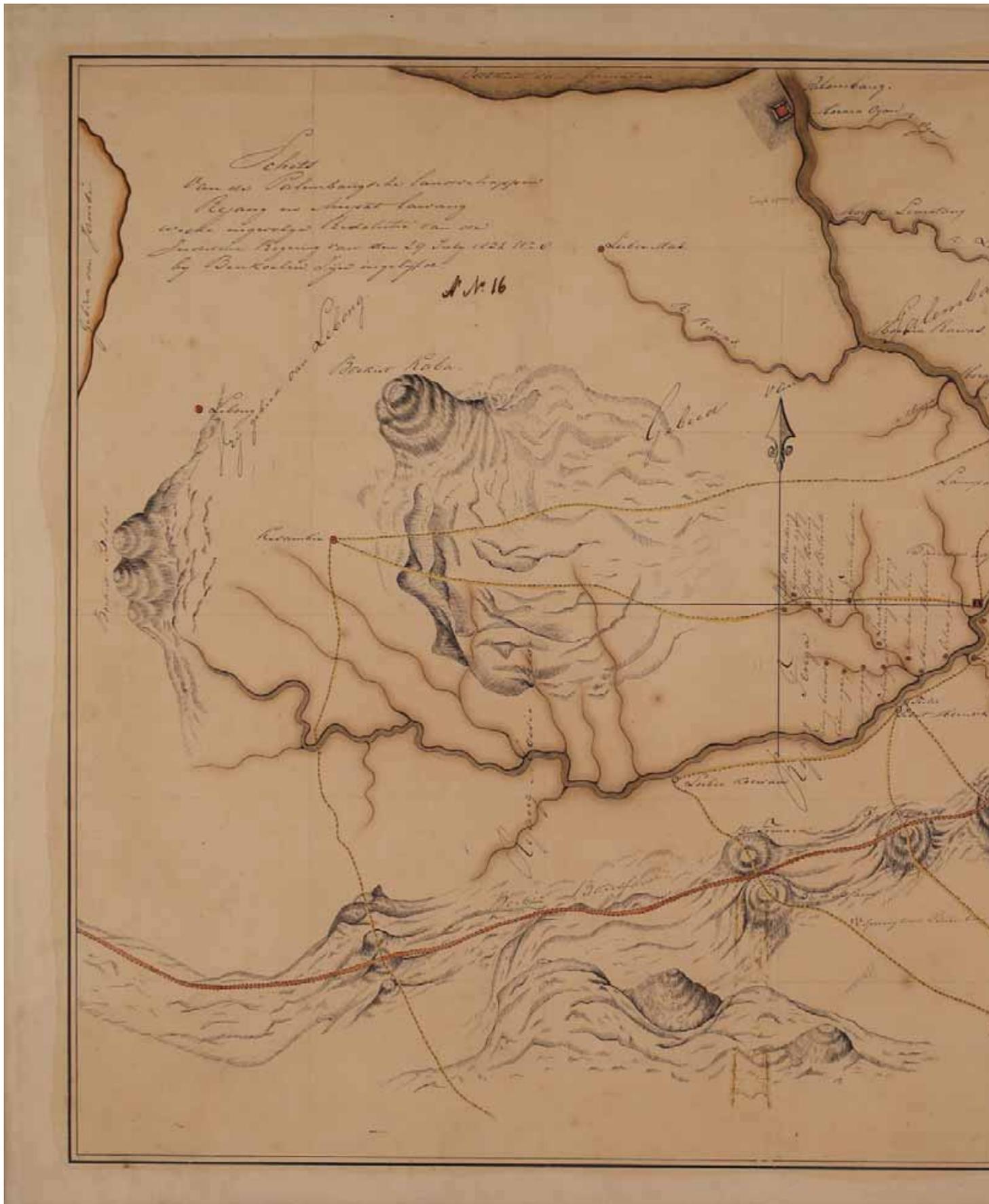
Denah Pemerintahan Kota Palembang, 1819

Sumber: ANRI, De Haan E 38



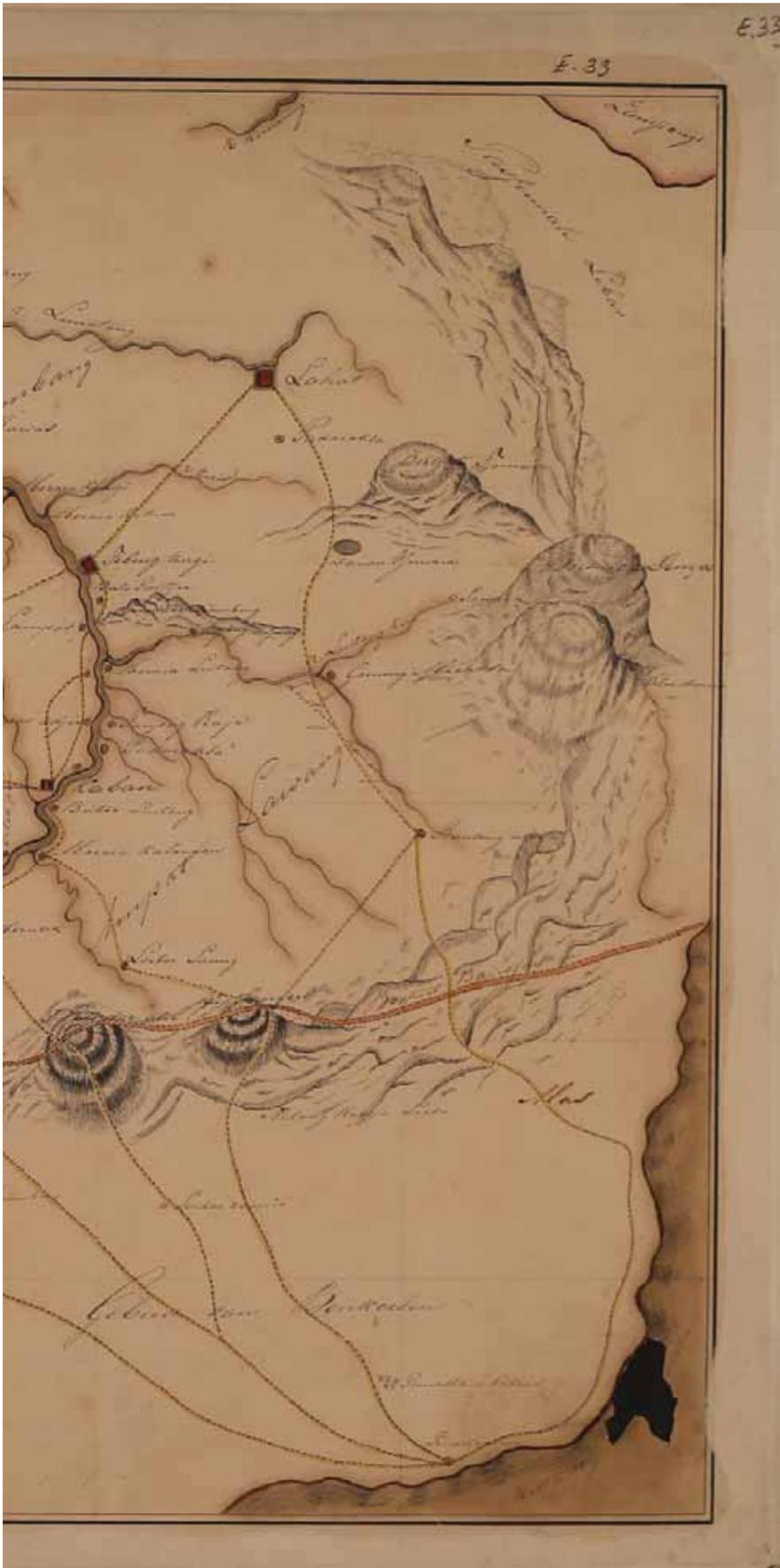
Sketsa Bengkulu dan Palembang, 1930

Sumber: ANRI, De Haan L 44



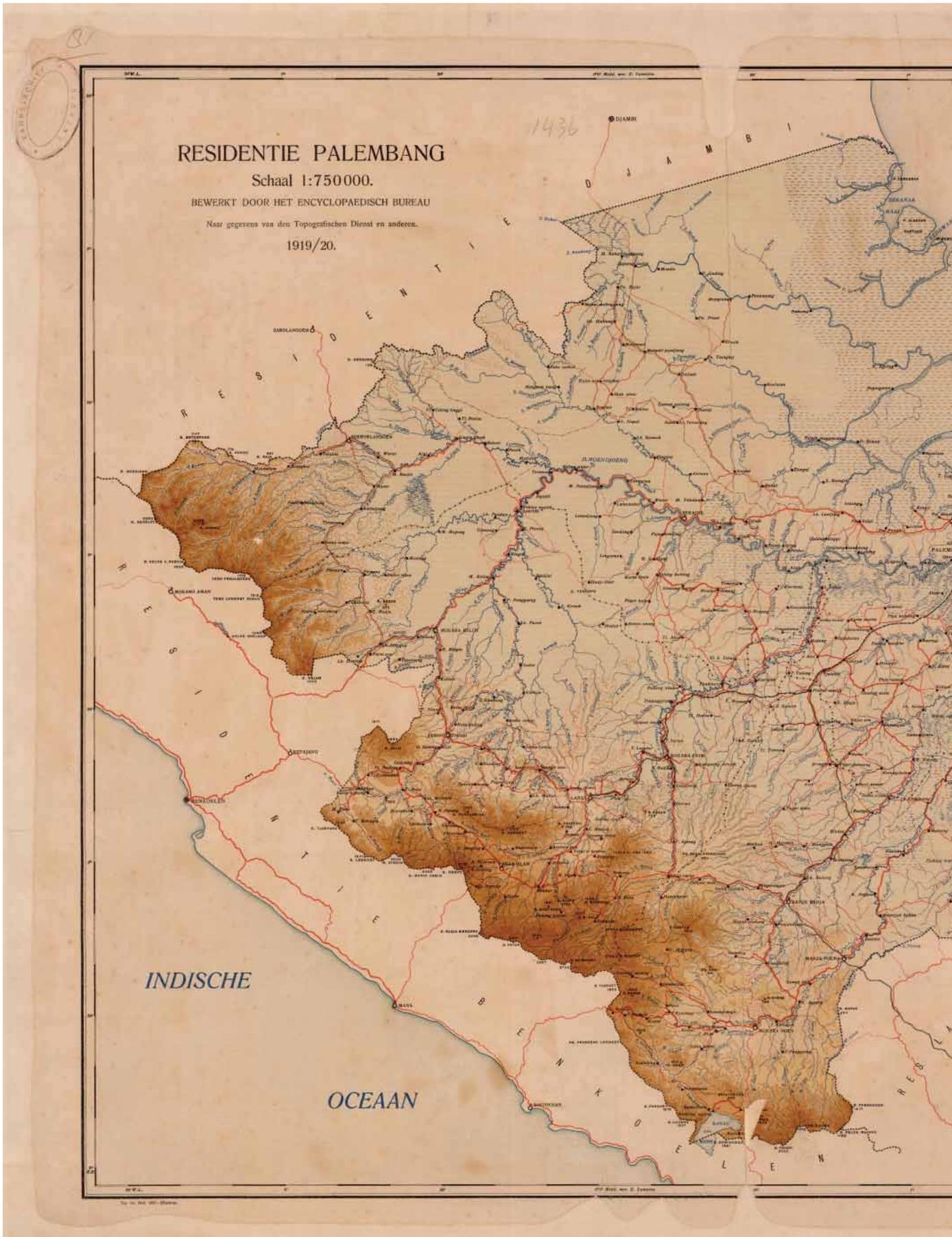
Schets
Van de Palembangse Landvertoopping
Kezand en meest lauwang
wegke ingewolge bestelthe van de
Jacobsche Begraaf van den 29 July 1720
by Benkelede d'ge ingelofte

N. 16



Sketsa perbatasan Palembang Rejang dan Empat Lawang Bengkulu yang merupakan lampiran dari Resolusi Nomor 8, 29 Juli 1832

Sumber: ANRI, De Haan E. 33

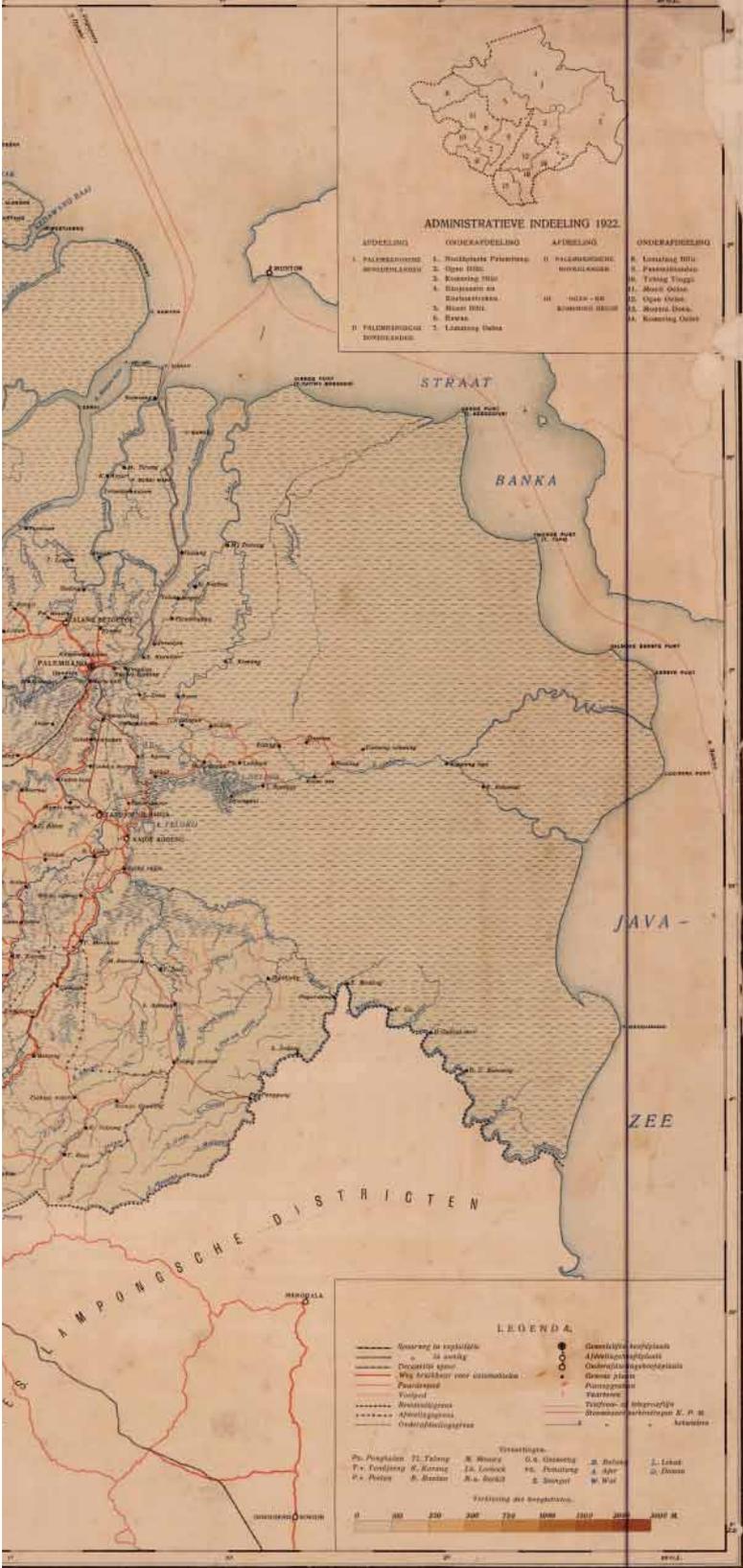


1436



ADMINISTRATIEVE INDEELING 1922

AFDEELING	ONDERAFDEELING	AFDEELING	ONDERAFDEELING
I. PALANGGARAN	1. Negeri Palembang	II. PALANGGARAN	8. Lingsing
II. PALANGGARAN	2. Ogan Ilir	III. PALANGGARAN	9. Pematangsari
III. PALANGGARAN	3. Komering Timur	IV. PALANGGARAN	10. Pangkalpinang
IV. PALANGGARAN	4. Komering Selatan	V. PALANGGARAN	11. Muarajaya
V. PALANGGARAN	5. Komering Barat	VI. PALANGGARAN	12. Ogan Ilir
VI. PALANGGARAN	6. Bawas	VII. PALANGGARAN	13. Muaradua
VII. PALANGGARAN	7. Lingsing Utara	VIII. PALANGGARAN	14. Komering Selatan



LEGENDA

—	Gesamte in teylerde	●	Gesamte in teylerde
—	in teylerde	○	Afdeeling
—	Onderafdeeling	○	Onderafdeeling
—	Weg	○	Gesamte in teylerde
—	Weg	○	Afdeeling
—	Weg	○	Onderafdeeling
—	Weg	○	Gesamte in teylerde
—	Weg	○	Afdeeling
—	Weg	○	Onderafdeeling
—	Weg	○	Gesamte in teylerde
—	Weg	○	Afdeeling
—	Weg	○	Onderafdeeling

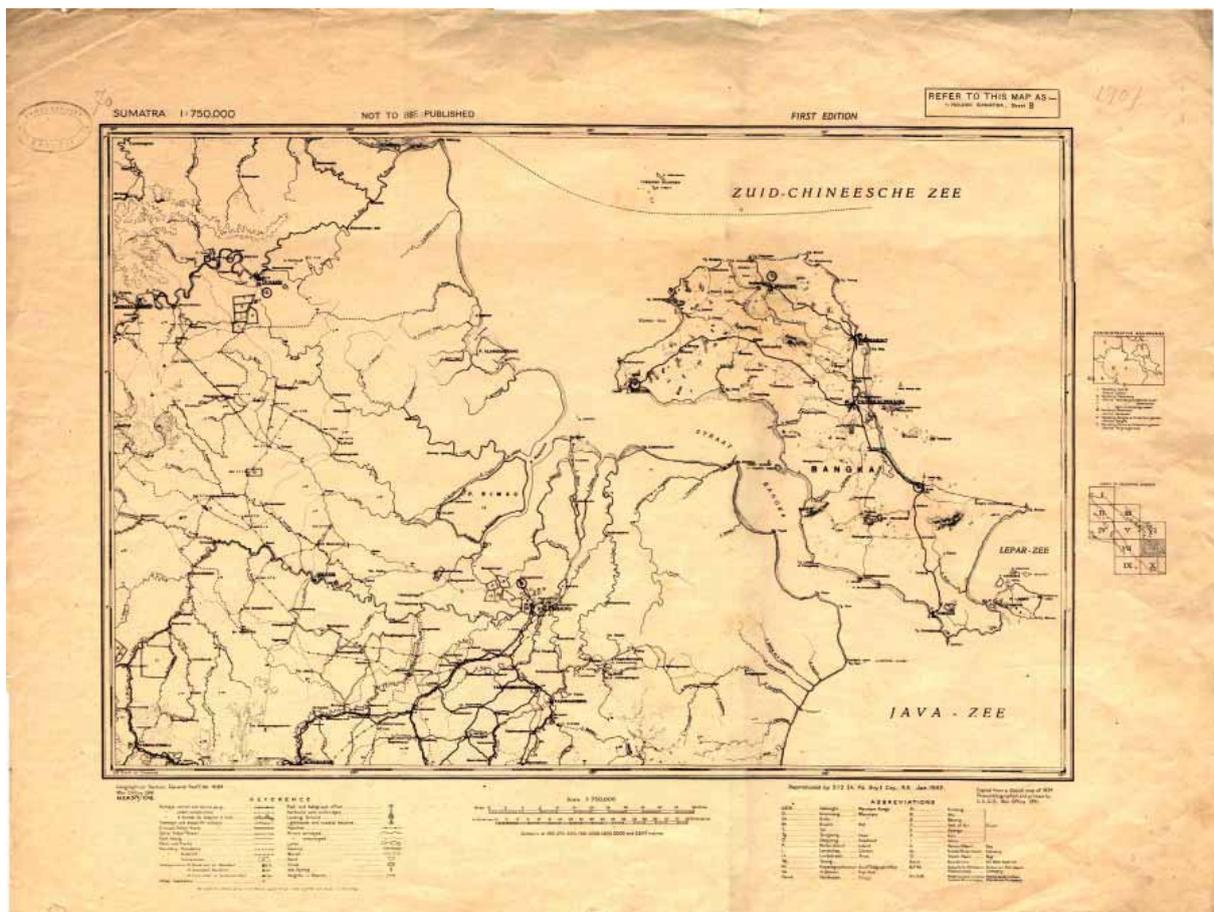
Verspreiding van bevolking

Pu. Palembang	71. Talang	8. Bawas	6. Ogan Ilir	3. Komering	1. Lingsing
P. Pematangsari	11. Karang	12. Lingsing	10. Pangkalpinang	4. Muarajaya	2. Bawas
P. Muaradua	9. Muarajaya	13. Muaradua	5. Muarajaya	14. Komering Selatan	15. Komering Selatan

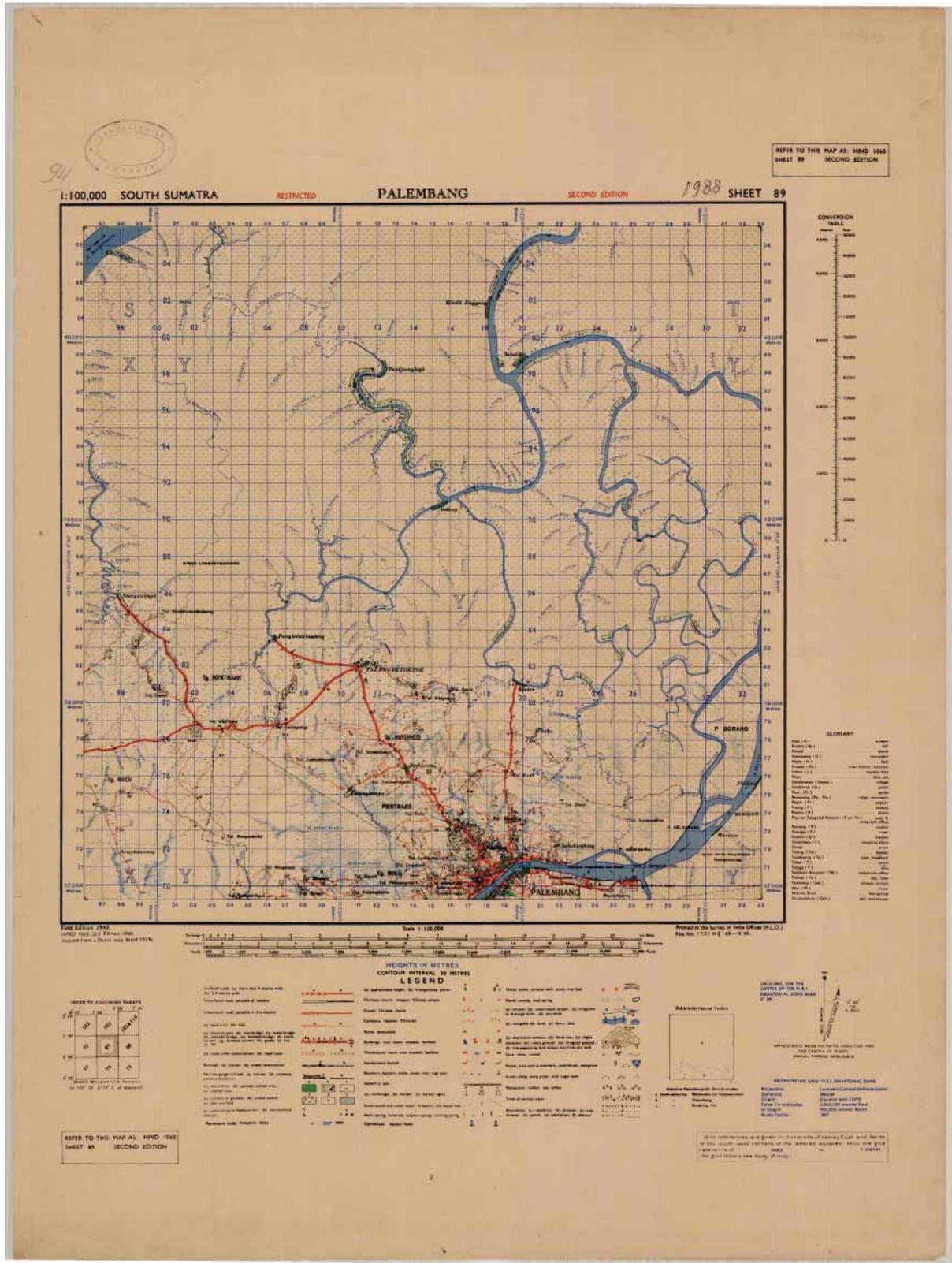
Verkeering der bevolking

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 M.

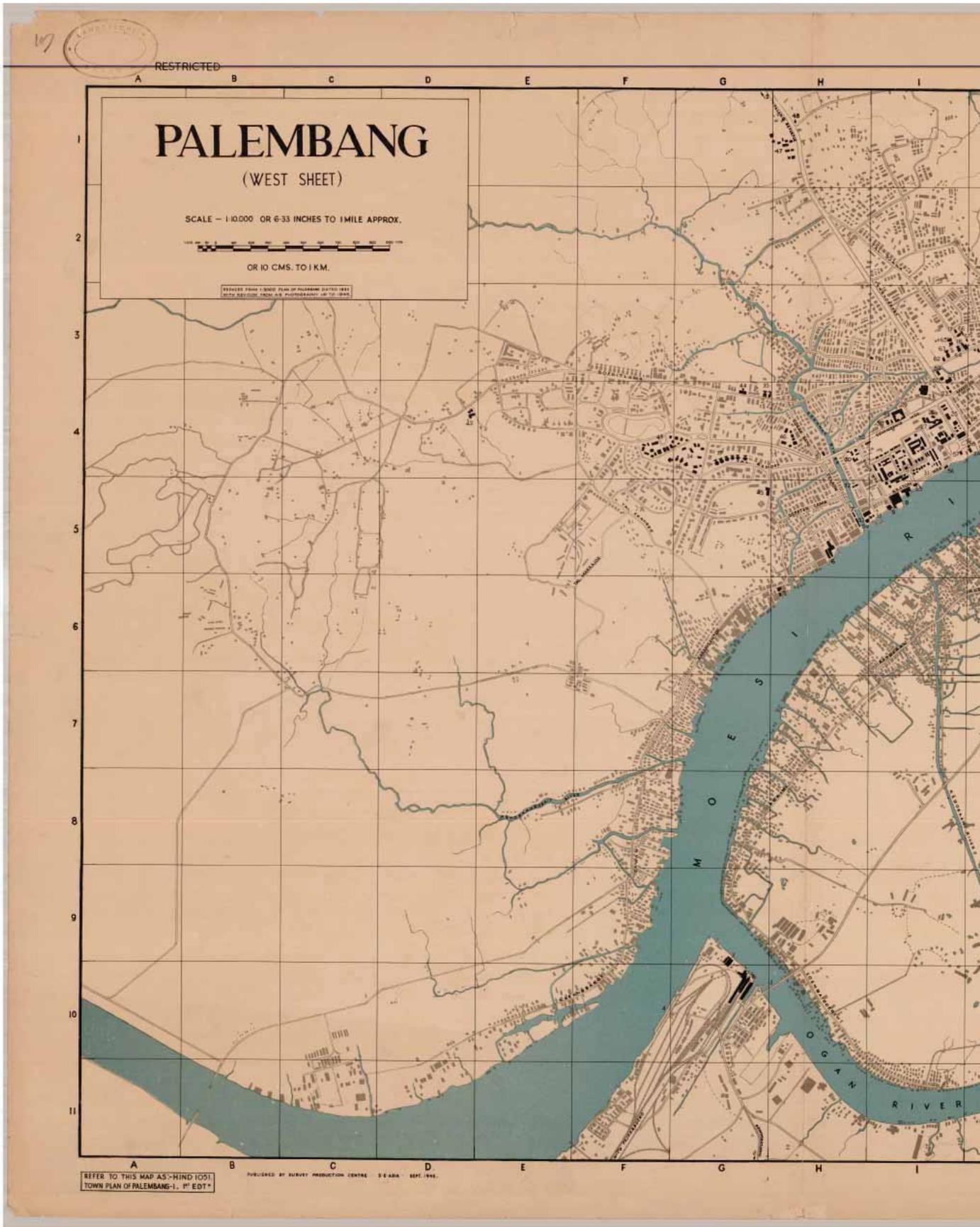
Residensi Palembang, 1922
Sumber: ANRI, Kartografi Indonesia No 1436



Palembang, Sekayu, Muara Enim,
Perbatasan Riau, Jambi dan Bangka, 1941
Sumber: ANRI, Kartografi Indonesia No.1407



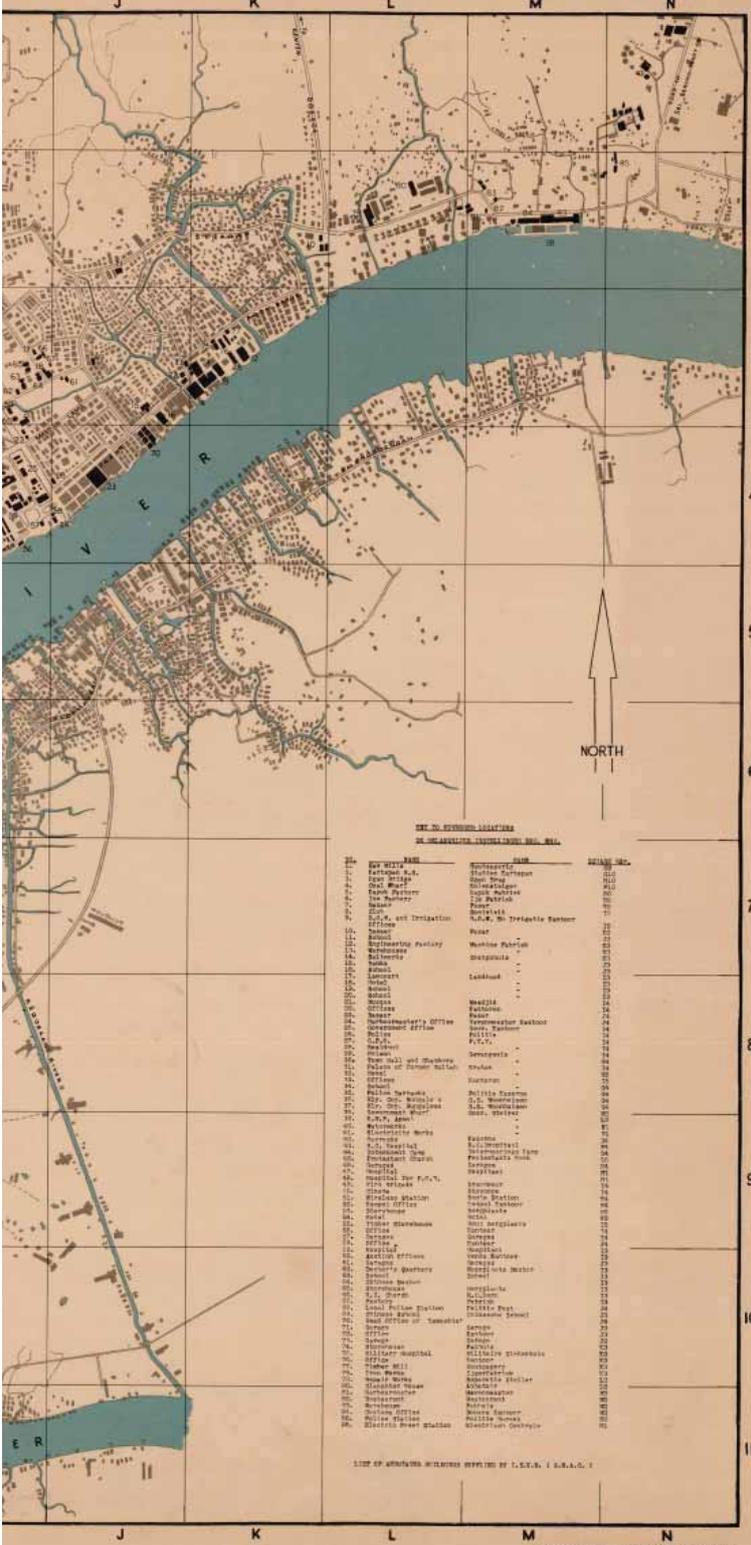
Palembang dengan sungai Musi, Talang Betutu, 1945
 Sumber: ANRI, Kartografi Indonesia No. 1988



2022

WEST SHEET.

REFER TO THIS MAP AS... HIND. JOS. TOWN PLAN OF PALEMBANG-1: 1st EDT.

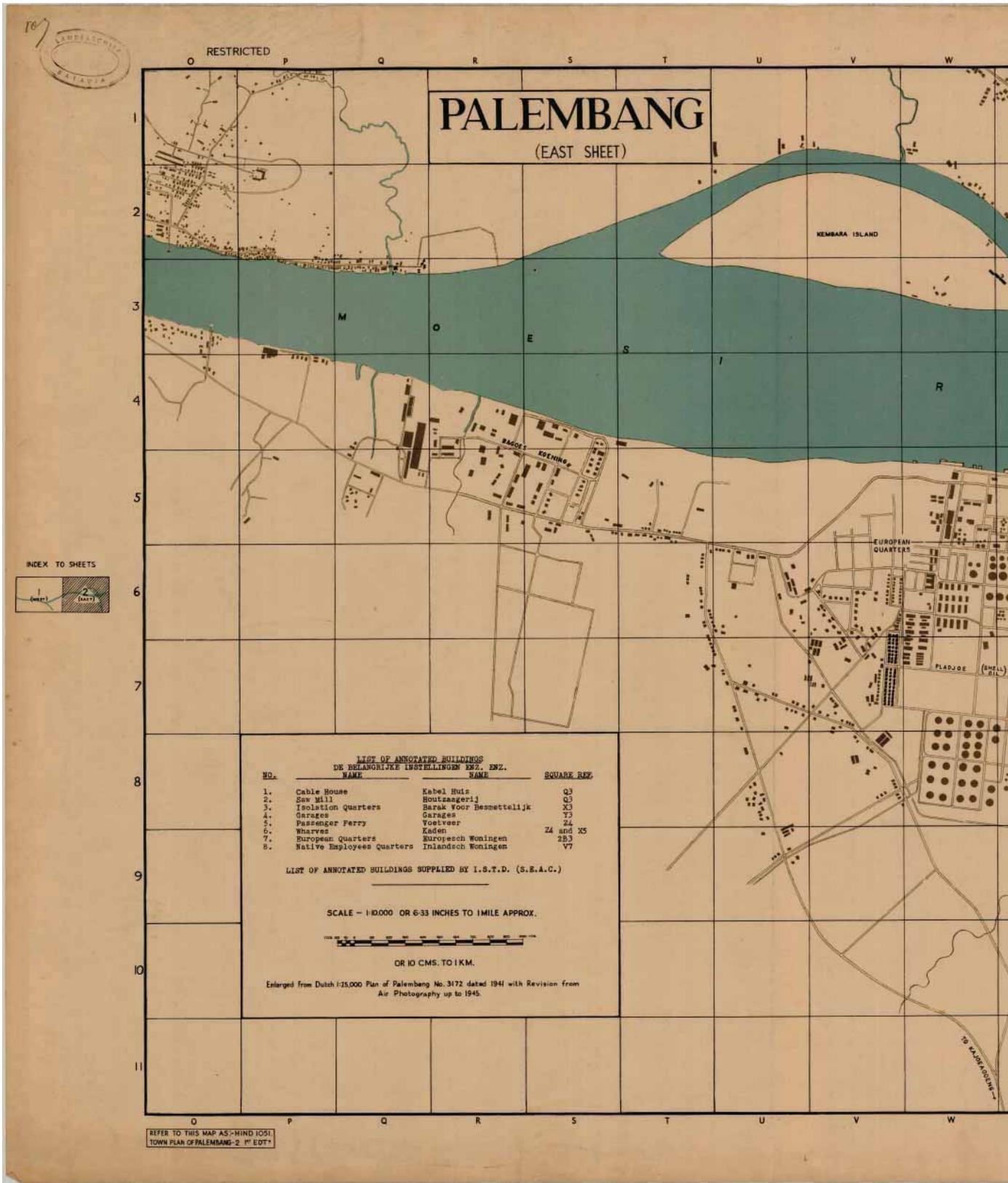


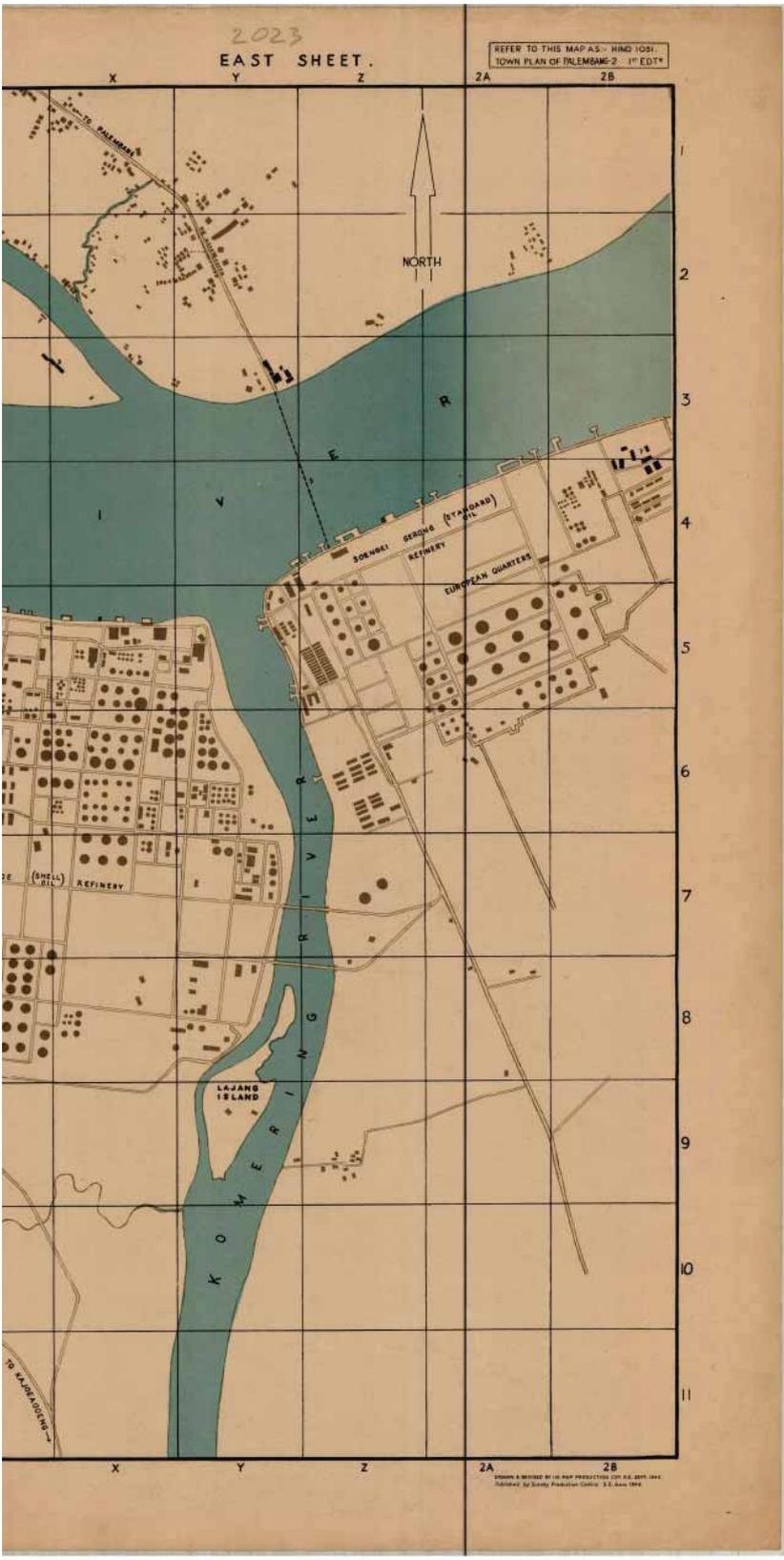
INDEX TO SHEETS



NORTH

Peta Palembang, 1945
Sumber: ANRI, Kartografi Indonesia No. 2022





Peta Kota Palembang, 1945
Sumber: ANRI, Kartografi Indonesia No. 2023



Foto udara Kota Palembang, 1948
Sumber: ANRI, NIGIS RVD NO B2023



Pemandangan Kota Palembang, 1951
Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 0500



Pemandangan Kota Palembang, 1951

Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 0512



Pemandangan Kota Palembang, 1951

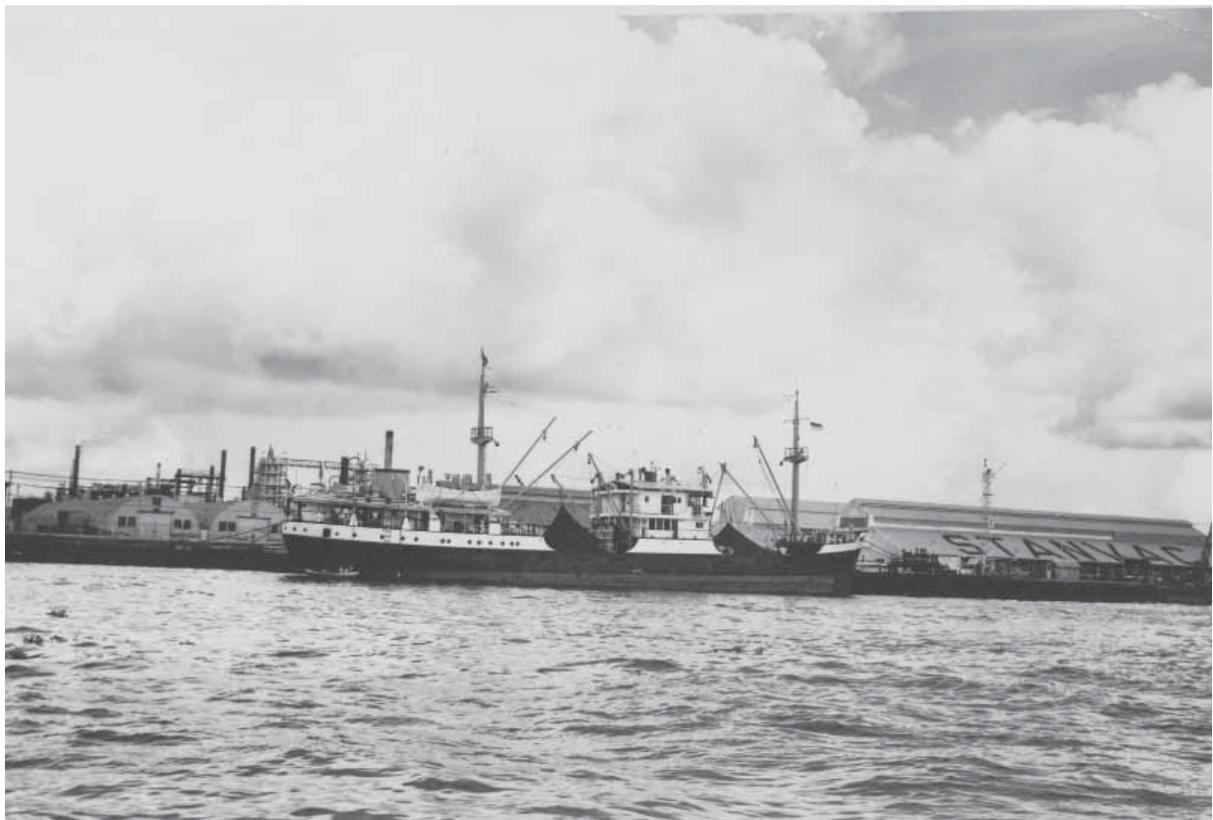
Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 0492



Pemandangan kampung ditepi Sungai Musi di Palembang,
Sumatera Selatan, 18 Desember 1953

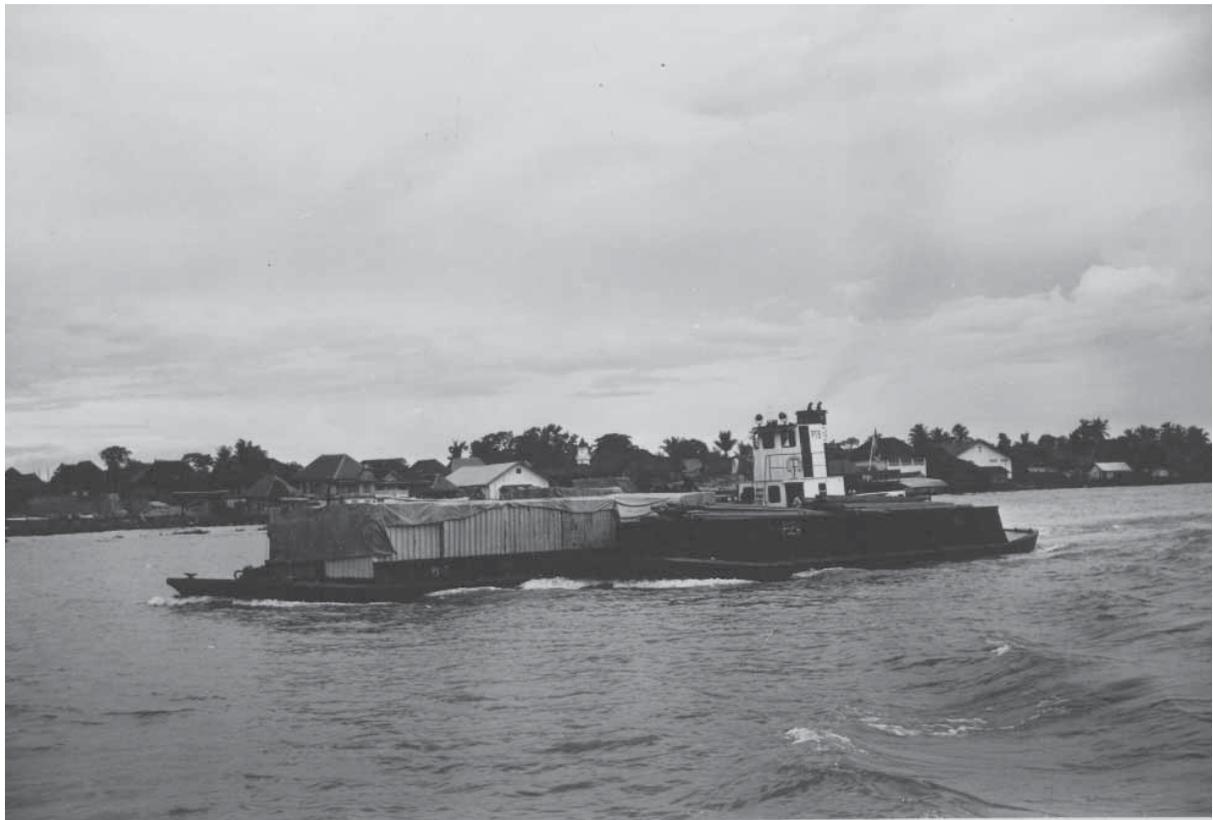
Sumber: ANRI, Kempen K 531218 DD 1





Pemandangan sungai Musi, Palembang, 9 Mei 1965

Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 1372



Pemandangan sungai Musi, Palembang, 9 Mei 1965

Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 1376

Politik dan Pemerintahan



Palembang pada masa prakolonial dijadikan ibukota Kesultanan Palembang. Sejak zaman Kolonial Belanda (awal abad XX) kota tersebut dijadikan ibukota Karesidenan Palembang. Karesidenan Palembang merupakan satu dari tiga karesidenan yang ada di wilayah Pesisir Timur Sumatera (*Sumatra's Oostkust*). Di bagian barat adalah Karesidenan Bengkulu dan Lampung di bagian selatan. Karesidenan Palembang meliputi tiga *afdeeling* yang masing-masing dikepalai oleh Asisten Residen. Kota Palembang termasuk dalam kategori kota "A" pada awal kemerdekaan. Pada masa Revolusi (masa pendudukan Belanda) Palembang dikembalikan sebagai *Stadsgemeente*, namun pada masa pemerintahan RIS (Republik Indonesia Serikat), Palembang ditetapkan sebagai *kota swapraja* atau *kotapraja*.

72X

N^o. 2.

Contract met Palembang

d.d. 20 April 1678.

Palembang 41
7.

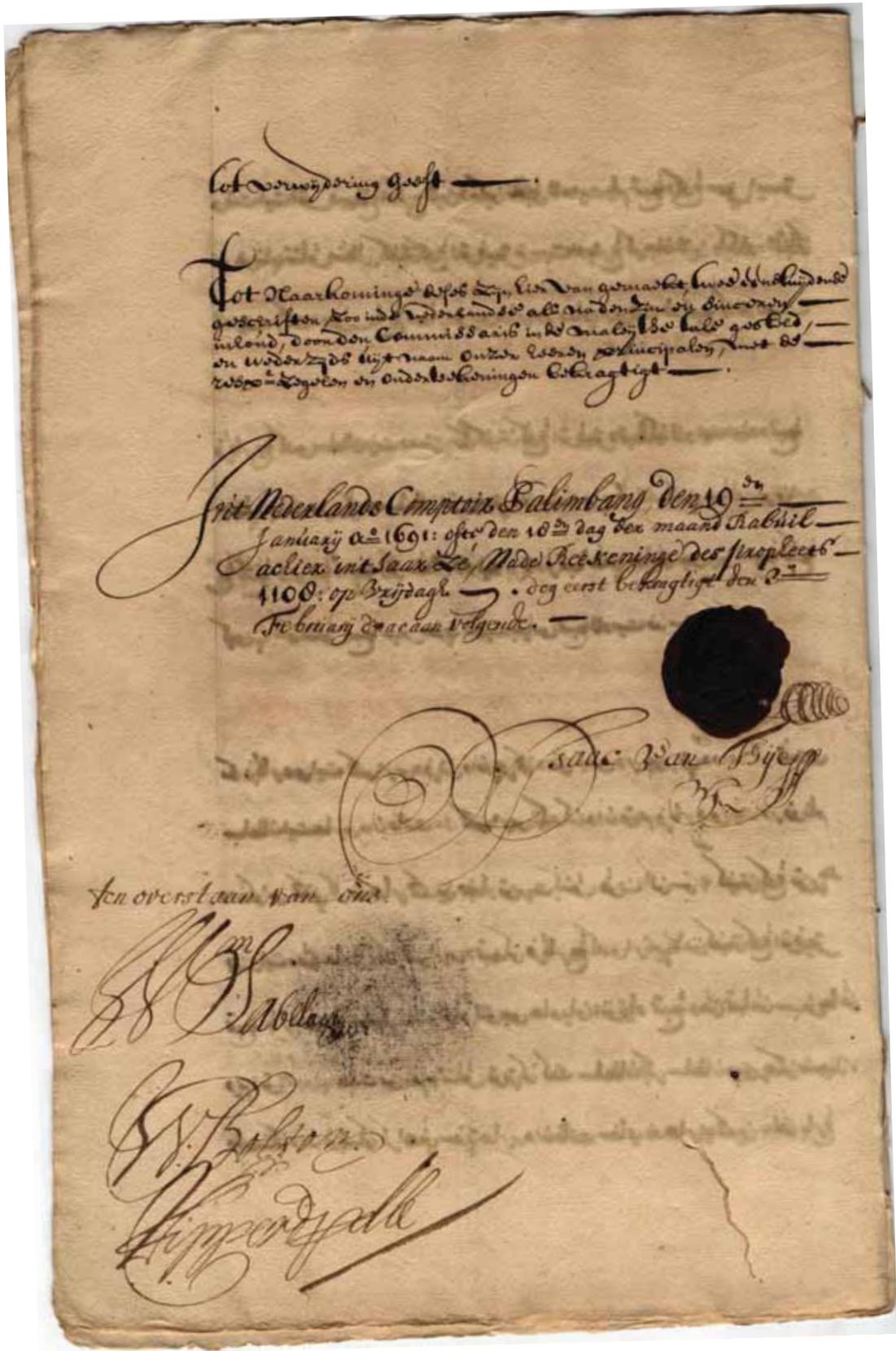
Kontrak perdagangan antara Raja Palembang Sultan Ratu Abdul
Jamal dengan Gubernur Jenderal Rijkloft, 20 April 1678
Sumber: ANRI, Palembang 41/5

Over Inkomende ofte Lout
Tugsten den 10^{den} Maas 1700
Koning van Palembang ter Eere
ende den Heer Ed. Heere Gouverneur
Generaal Ryckloff van Goed, inde
E. Oude Heere Rader van India
ter andere zijde. gestooten door weder-
zijde gesommiteerden, namentlyc
Den Sultan Agon van Sambij
van wege den Koning van Palembang
nise den Commissaris den de
Heer representeerende haer Wilgemite
E. end op Batavia

Over den Sam Goestman

de Negocie Cristelyc dat a Negocie voortaan van Palembang
te buyden den
Cooplieden van
Sikemeng syde
Sal georeven wesen met vier opusje daer toe
aangetelde kooplieden door den Sultan, ende dat
tot Lasten van den Sultan, waerom hij ooc
in Effecte daer voor sal moeten Responderen
dag gem. Cooplieden en zullen op haer liggen
Paive niet Vermogen d Constanten ofte

Coopmansclappen



Bagian akhir dari Pembaharuan kontrak perdagangan tahun 1662, 1678, 1679 dan 1681 antara Raja Palembang Sultan Ratu Abdul Jamal dengan Komisaris Issac van Thieje, 19 Januari 1691
Sumber: ANRI, Palembang 41/6

بسیلینده داننار رهیت سلطان دان کفنی

فدا خریب اکبر فرجین ایت مفجادی توت کمنش سگال سگال مک سد دانتر جینجین دو بو نیی
ساق جوک سبله معاس ولند دان اری نی سبله معاس دغن حروف ملا بو مک کلام سبله
د بلهکن دغن چغی توت ۲ دان تافق تاغن کلام

بکیتوله موخته دکوت فلیج کفد سمین بلس هاری بولن جنول بر تاغن سرب اهر ایش
سمین قرله ساق اتود ولان بلس هار بولن ریج لایر تاغن خر هجره بی سرب سراس
دولان فدهار جمعت تمت الکلام این تافق تاغن دهر فغین دین کسوم
سبب دی صبر بی تاغن اوله دی دسور هکن بوله سلطان ررت کفد کسراس اسماق
د دلم کدی غم همچارکن حال بصبغ لاد دغن کجی مس اری دان کی فچند دان سبله
دو کتیکه دغن جور تولس است کال فغین صبر بی تافق تاغن فدهار سبت
فدامعت هار بولن جماد الاول فدهاغن زین هجره بی سرب سراس
دولان تمت الکلام



24

De Sultan Mahmud Sultan van de
 toe niet in aanwezigheid komen. want behalve
 zijn geboorte in de jaren 1816, en 1819 had hij
 een groot aantal van eigenlijke getrouwde ge-
 zinnen. door getrouwde, en verpanden zijn zij
 loop dat tusschen de eerste en tweede expedities
 plaats had geen eenige poging te doen om een
 onderwerping en verovering de Staat te doen, die
 hem leeren het hoofd te geven.

Zijn leeren waren te. Een gewichtloze indi-
 handelingen van koningen onder dan dat een
 koning het verovering, want hebben koning weten
 van de Gouvernements leeren.

De Sultan Achmat Sultan van de
 van minder mededeling tegen het Nederlandsche ge-
 vernement. had welke koning van een gewone
 leeren, gegeven. van hem kon dan niet ge-
 ligt de laatste behouding van het leeren en de
 invulling van een veldslag, onder een leeren, van
 den veldslag, doch en leeren, geen leeren om
 daartoe niet zijn veldslag te leeren, die
 geen deze had gegeven van de veldslag geleen,
 leeren, en die veldslag was veldslag,
 door zijn algemeen gegeven veldslag,
 en door de veldslag die hij veldslag van zijn
 veldslag

25

13

van een veldslag. Prabu Anom had daartoe
 toe handelingen behouding veldslag van leeren
 van zijn veldslag handelingen, dat het ge-
 vernement veldslag en de gegeven veldslag
 het veldslag te veldslag veldslag van zijn veldslag

Het geest van het veldslag van dat Sultan
Prabu Anom op den 28 April 1821 en aan de
Prabu Anom veldslag veldslag van de Hoge Regering
 van veldslag veldslag, veldslag veldslag en
 veldslag veldslag de veldslag van veldslag
 die hij van het Nederlandsche Gouvernment had
 gegeven, en dat op den veldslag veldslag veldslag
 en dat hem en zijn veldslag veldslag veldslag van
 veldslag van veldslag veldslag veldslag veldslag
 en veldslag veldslag

a. Het zijn van de veldslag veldslag veldslag
 veldslag veldslag veldslag en veldslag veldslag
 veldslag van veldslag veldslag al van leeren van het
 Nederlandsche Gouvernment.

b. Het zijn veldslag veldslag veldslag veldslag veldslag
 veldslag van veldslag veldslag veldslag veldslag
 veldslag veldslag veldslag veldslag veldslag veldslag

c. Het zijn veldslag veldslag veldslag veldslag veldslag
 veldslag veldslag veldslag veldslag veldslag veldslag

d. Het zijn veldslag veldslag veldslag veldslag veldslag
 veldslag veldslag veldslag veldslag veldslag veldslag

veldslag

Pertemuan antara Sultan Najamuddin II, Prabu Anom dan Hoge Regering (Pemerintah Kolonial Belanda) pada tanggal 28 April 1821 di Bogor tentang pemulihan kekuasaan Sultan Najamuddin II dan Prabu Anom yang akan menjalankan pemerintahan dengan gelar Ahmad Najamuddin III, 1811
 Sumber: ANRI, Palembang No. 5.1. 1811-1821

+ 2

Palembang

van 1811 tot 1821

P. Der de veranderingen welke in het waddien van 178 tot 1783 zijn voorgevallen, zijn onze kennis betrefende geworpen met de gebeurtenissen in en om de waddien Palembang het koninkrijk is geweest, vooral in het jaar 1819, als een uitbreiding in de jeugd van de waddien, maar het is dat hun eerdere geschiedenis met eenigenzamen zijn, die veranderingen in een denlooping verhaalt, verhaalt te worden, en daarbij te zien, welke een belangt en een van de vroege veranderingen, welke hebben een belangt gegeven tot den tegenwoordigen stand van zaken in dat land, de onderveranderde legende zijn daartoe bevestigend.

H. Het is bekend dat in het jaar 1811, de koninklijke sultaan van Palembang, Nachoes, Badar, Cedra, door het koninkrijk het Hollandsche fort al, door gedrongen tijden, de geheele bevolking in kleine vaartuigen deed inschepen onder verdundel vande, welke naar para te doen terug gaan, doch dat by

disney

zijn gezag het bevestigd om een onderhandeling met de sultaan te openen, hiervan was het gevolg dat de waddien Palembang terug keerde, in de hoop van weldadig behouding, en het gebied van Palembang met zijn waddien Nagaw, Cedra te zullen waddien, even, koning de veranderingen van den sultaan Badar.

Der de veranderingen welke in het land, gelijk bevestigd afgehoort, dat Nagaw, Cedra, zag met waddien, als eenigen waddien bevestigd.

De handelingen van den sultaan Badar hadden echter de gunstige uitwerking dat Badar, Cedra en waddien, van zijn onderverandering, telkens, terug, en stelde te Palembang terug waddien, en dat dat de koninkrijkslandse waddien kon gemaakt worden, het stelsel te zijn, waddien bevestigd in 1818 door het koninkrijk Government, gezamenlijk, regelden onder, ander, een wet den waddien, waddien Nagaw, Cedra, waddien bevestigd tot het verdundel van zijn waddien, waddien Badar, Cedra.

De opening van de bevestiging van Nagaw, Cedra tot Sultan, was zijn onderverandering over, die lange onderverandering geboden, doch onderverandering, waddien aan den waddien zijn waddien, was zijn bevestiging, welke geboden waddien door de waddien, deze onderverandering, waddien, door het koninkrijk bevestigd.

bevestigd

Pembagian Kesultanan Palembang antara Sultan Badarudin dan Sultan Najamudin oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1818

Sumber: ANRI, Palembang No. 5.1. 1811-1821

Maandag 14 Augustus 1822.

No. 11.

Samarang

11

Heel den tot
Koning Palembang 711
Bandoe 711

Medan

Gelaten een ontwerp van den
 koninkrijke van Palembang,
 van den 12^{de} hem 11^{de} en 14^{de} Januarij
 in het beide, opgewende de
 keuzen, welke hem zijn
 voorgedemon zijn het gebouwen
 van het geprojecteerd fort
 Nederik aldaar en welke
 dezelven ontleend zijn uit het
 byhand onopgelyke de ontwerpen
 van de, tot die constructie
 vermaakt, werklouder kon
 amatenulore, wordende
 bevestigd door genulden koninkrijke
 Janil de redenen opgegeven,
 welke het hem als allereerst
 menschecht doen voorhouden
 dat, en dits van het voerij-
 held fort, de grote keuten
 van Palembang, tot een
 waterberg werde ingericht,
 / Schoon de consideration en
 het advies van den desultant
 Janual, koninkrijke het
 Gaspar, verdat en dezelve
 vopant van den 6^{de} dize 18^{de},
 houdende, in sublaetie, dat
 alhoewel het geprojecteerd fort
 vele voorsigten konde bezitten,
 welke meer in de versterkten
 keuten sul moeten mispen,
 by niet sullen verrijgt niet
 het groeten van den koninkrijke
 Janil van Palembang, onduister
 door den kapitein, eerst naam
 ingenieur aldaar, van den 14^{de}
 als door krachtige redenen

Perubahan fungsi Keraton Kuto Besak menjadi benteng saat diambil alih oleh Pemerintahan Kolonial Belanda. Kuto Besak dijadikan sebagai markas tentara Belanda dan tempat berlindung dari serangan penduduk pribumi, 14 Agustus 1822
 Sumber : ANRI, Algemene Secretarie Besluit 14/8/1822 No.11

II onderaanzigt.)

En dien tingeroyge, goedge,
vanden en verstaan, met
allertie van het bynaald
by besluit van den 21 august,
aet 1821 no. 10,

1) vaststellen dat de boeten
van Palembang zal
worden ingezigt tot een
versterking om de werkkamer
en het garnison aldare
van inlandische aanvallen
te beveiligen, en dat daarin
gevolgd zal worden het
ontwerp door den Kapitein
Jegermeister ~~van de~~ ingediend
van den 21 Juni 21, en

2) den Kommissaris van
Palembang aan te bevelen
om zich over de uitvoering
van voorsz. werk met
den Kapitein Jegermeister van
de troep, en voor een wel
noedig, met den Sultan van
Palembang te verstaan, om
voorts te verhooren de
nodige maatregelen tot
een spoedige uitvoering
van hetzelve werk te nemen,
en daarna naar zoodanige
voorstellers te doen, als naar
omstandigheden dienstig
zullen worden bevonden.

Ind. met. d'gt. Kom. van
Palembang, H. Dr. 21. 21. 21,
21. 21. 21. en 21. 21.

72. *

N^o: 10.

~~A VII~~ D VII.

Ced van Pangeran Krama Djaja
Perdana Mantri van Palembang
d. d. 5 September 1823.

Sumpah Pelantikan Pangeran Krama Jaja, Perdana Menteri
dari Palembang, 5 September 1823

Sumber: ANRI, Palembang 15 DV II - 18

در گفتار در این
 بی ساری خون طری بولون کلد ساد ۳
 اورج کن منجا د دهن کما دیلن یا اینت جانن
 سبکی منولف صحت داز جانن کله هم دستکوت
 بهو بی مان تر سبک دینسی اتول
 منجا دستمند قی عادت ساری داز یک ساری لایق
 د این مگر چک د مکیمن بیله دکتو کن
 الله سپهان تعالی داز رولون

ادار
 مسفاری مننچ بی ساری سمف
 بی تر سبک مکر ساری تا تم دکن تندو تا شن
 ساری دان چی بی دکر نیای

تر شعله دهن تا دچی داز تنه تا فن
 د خدا فن سری حد و ک نه از کسارس
 در کرم فلیم د دالم کراتو
 ساری بولون سبک ۱۱۲۳



نقد ان کرام جایی فردان سنتری

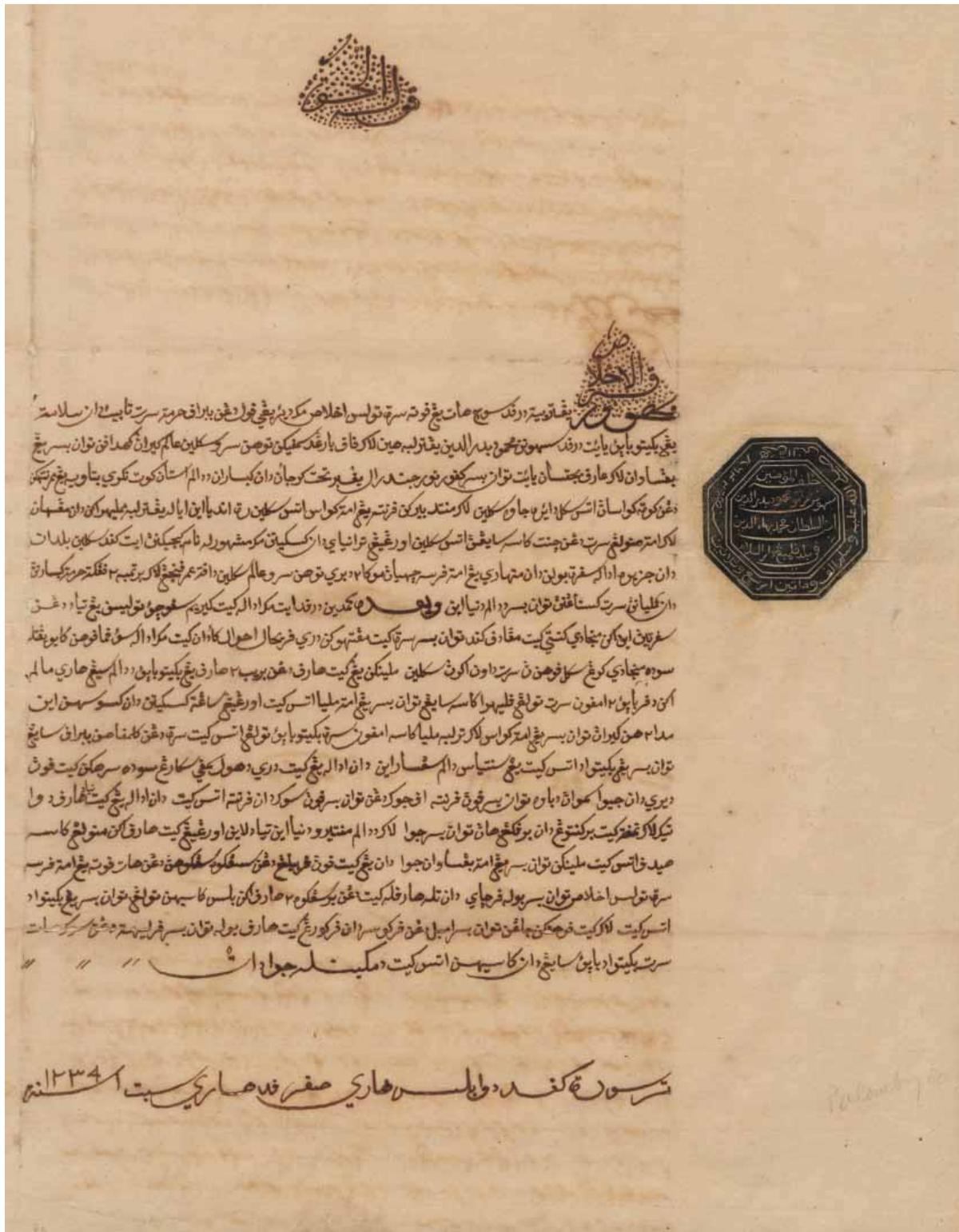
der voormelde overeenkomsten.
 Dat ik een ekk. met tegewortigheid zal
 behandelen, tevens mijn vrees om te hooren
 of mijn vrienden te hooren.
 Deze mijne verklaring gedacht met eenige
 hart en toe ik aan die belofte niet voldoe en
 niet geeft men wat ik hier verstaen, die
 vatte op my den toorn des allerblijghen en
 vanden Troost.
 Ten blyke dat ik doen heb gewonnen het
 dat ik onder den toorn mijn gemene beste
 verklaring onbet Regel my gedachten.

Beswooren, getuichen en gezegd voor
 de Kommissarissen van het A. V. d. v. d. v. d. v.
 Gouvernement in de Grootte Staten
 te Palembang op den 18den Sept.
 1822.

de Kommissarissen
 J. J. van der Meer
 J. J. van der Meer



Surat dari Raja Palembang, Sultan Ahmad Najamuddin kepada Gubernur Jenderal Van der Capellen mengenai keadaan dan kedudukan keluarganya, 26 November 1823 (22 Rabiul Awal 1239 H)
Sumber: ANRI, Surat Emas No. 7 (Palembang 69)



Surat Sultan Mohamad Badaruddin dari Palembang kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengenai keadaannya yang diasingkan ke Ternate, 23 Desember 1823 (12 Safar 1239 H)

Sumber: ANRI, Surat Emas No.22 (Palembang 80)

263

die bevoegdheid gevesst, want nu is het
 dat immer de meeste, reellen, en
 schijnelyk een deel van moeder
 men, die niettemin heb ik ver-
 meent, dat dit overzigt niet ge-
 heel van belang is, het ont-
 bleef is, immers ten bevestiging
 van het geen ik ten aanzien
 van het vorig verster bestaand,
 onder verster terredenheid
 in de eerste afdeling van het
 verslag, heb verzocht, kan
 het misstaken eenig uit heb-
 ken, waarom ik dan ook niet
 gewaagd heb, voorbedacht
 overzigt, te inleiding, van het
 verslag te doen strikken: in de
 hoop, dat het zal een gunstige
 ingesigte overzigt, zal velenge

Chronologisch tabel van
 den Leeftyd der Palembang-
 koningen. Verster.

1785 De eerste verster, die Palembang
 koning was, was van den naam
 is Sri Sri Gudek Sri, die
 overleed op 22 maart 1785 te
 Palembang

... tabel ...
 ...
 ...
 ...

Laporan tahunan Residen Palembang tahun 1834-1835 yang ditulis pada tanggal 25 April 1836 mengenai silsilah periode kekuasaan 16 Raja Palembang dari tahun 1543 s.d. 1821. Kerajaan berubah menjadi Kesultanan pada periode pemerintahan Sultan Abdul Rachman pada tahun 1648-1693
 Sumber: ANRI, Palembang No. 62-2 1854-1855

262
Inleiding.

Als het bij dit verdrag, quage
na geschiedkundig overzigt van
afgegaan van een Chronologisch
tabel, van de regering van verleden
en het Palembangse rijk
hebben bestudeerd, het tabel leest
te van een tijd van dezelfde
vermoedelyken eerste stichting,
hijnt het verhaal van eenige
gebeurtenissen, het het leven der
verleden, begint met Siding
Radjak, de eerste, van men
enige bijzonderheden van het
gebleven. Het heeft mij eenige
maakt gebast om zelfs om want
ge overduidelijk heeren, hoe met
dit overzigt is te samen, welke by
aan te brengen, en overzichten by
enkele in andere binnens gebleven,
en enige oentelkingen, en nu
over die Souveren Salle Ketika
met het geslacht van Beelma
eden II. En medegeduld, ja

hadden.
1545. Hij werd overtuigd door
spanaalsche Konink Syralta
van de Sou en den beest
1577. Enge Sou van eenen beest
van Souveren Madina
Sekte met de Sou reigert.
1607. Sou Souveren Beelma
Madjalel reigert hien en
van reigert Sekte van beest.
Souveren tijd van Sou van
ten gevoelt van.
1610 Souveren Siding
Sekte van Sou van beest
beest.
1615. Sou gevoelt van Sou
van Siding Landjan van
gevoelt van de Beelma
Souveren, de reigert, en
Sou van, het land reigert
te rele van rele hijnt van.
laten, en van van rele
rele en van rele van
gevoelt van rele. Sou van
by de land van het rele
te rele van gevoelt. Sou van
van de rele en na rele
1627

No 118

379

i. Aantekeningen omtrent
 de ligging, naam en oorsprong
 van het land van
 Palembang.

Het Rijk van Palembang
 ligt aan de noord
 oost kant van Sumatra.
 de hoofplaats is 2° 58' sui.
 breedte, is het eenige punt
 welke zuidelijk, door Cinnamon
 is bepaald, de grenzen zijn
 naar oosting (als zijn de niet
 nauwkeurig bepaald) ten
 oosten en Noord oosten aan de
 zee, ten noorden en westen
 ten men het eijk van Sam.
 li ten westen en ten zui.
 den aan de Soengai en
 de Soengai Soengai
 behoorende tot het gebied
 van Benkoelen en ten
 zuid oosten naar de Sam.
 prong.

De naam van Pa.
 Liembang die het gebied
 thans draagt, is een
 de na iken van, het
 het

Asal-usul nama Palembang yang berasal dari kata Liembang dan berasal dari bahasa Jawa yang berarti "membersihkan/membilas/mencuci emas" lalu ditambah dengan kata depan "Pa" sehingga menjadi Pa Liembang yang kemudian digabungkan menjadi Palembang, 1845-1855
 Sumber: ANRI, Palembang No. 62-2 1854-1855

380
het in 1700 jaar
het westen van Java
De Sjarie
in 1700 jaar
kolonisten van Java
naam van het
kond is het niet ver
gen van het westen
Lang in 1700 jaar
was schied eigent
was schied **Sumbang**
het welke gaant
het subelde woord **St**
Lang wordt aang
sreege, wordt en
wordt by en **Beek**
Lang in 1700 jaar
in 1700 jaar
aldoor, gaant
in den ent-ik van
plaats **Sura** van
beek gezonden
naar dit geschied
door bijvoering
ziet **St** de naam van
St Sumbang gaant
anderde / niet naam na
tabel

- a. onderhoud, herstelling, vernieuwing en aanleg van openbare wegen, straten, pleinen en tuinen, met de daartoe behoorende beplantingen, glooiingen, bermen, dijken, slooten, mijlpalen, naamborden, bruggen, duikers, beschooiingen, en andere werken, landingsbruggen en landingstrappen; ten algemeenen nutte strekkende goten en afvoerkanalen (krekken) zoomede passarloosden;
- b. brandweer;
- c. aanleg van begraafplaatsen.

Artikel 4.

De Gouverneur-Generaal bepaalt welke terreinen in de gemeente Palembang onder militair beheer staan.

Artikel 5.

Aan de gemeente Palembang worden in beheer gegeven de aan het Land behoorende of tot dusver van Landswege beheerde zaken, genoemd in artikel 3, zoover die liggen buiten de in het eerste gedeelte van dat artikel uitgezonderde terreinen, zoomede de aan den Lande behoorende brandspuithuizen in de gemeente, daaronder begrepen de drijvende loods voor de waterbrandspuiten; met verplichting om:

- a. al die zaken bij voortduring aan hun tegenwoordige bestemming te doen beantwoorden en ze daartoe in goeden staat te onderhouden en zoo noodig te herstellen en vernieuwen;
- b. te zorgen dat de brandspuithuizen, die tevens eene andere bestemming hebben, ook aan laatstbedoelde bestemming kunnen blijven beantwoorden.

De Gouverneur-Generaal kan de gemeente van deze verplichtingen ontheffen met betrekking tot bij zoodanige ontheffing bepaaldelijk aan te duiden zaken.

Artikel 6.

De aan den Lande behoorende brandspuiten en andere brandweermaterialen, aanwezig in de bij artikel 5 bedoelde brandspuithuizen, worden kosteloos aan de gemeente Palembang afgestaan.

De Gouverneur-Generaal bepaalt welke van de overige inventarisartikelen van den gewestelijken waterstaatsdienst kosteloos aan de gemeente Palembang worden afgestaan.

Artikel 7.

Voor de gemeente Palembang wordt ingesteld een raad, die genoemd wordt: de gemeenteraad van Palembang.

Het aantal leden van dien raad is 13. Hij is samengesteld uit:

- 8 Europeanen of met hen gelijkgestelde personen,
- 3 Inlanders en
- 2 vreemde Oosterlingen.

Artikel 8.

De werkkring van den gemeenteraad van Palembang omvat de voorziening in de behoefte aan plaatselijke verordeningen voor de gemeente

Palembang; verder het bij artikel 5 in de bij artikel 3 omschreven behoefte dering van de openbare gezondheid gemeente, zoomede van hare verfraai

De raad is bevoegd bovendien in Palembang te voorzien, behoudens in Regeering en aan andere autoriteiten

Bij twijfel of geschil over de graa taak van de Regeering, van den geme andere autoriteiten, beslist de Gouver

Artikel

Vast te stellen de volgende overga

A. Met betrekking tot de bij artik bedoelde belasting voor het onderhou en bruggen ter hoofdplaats Palemba

§ 1. De bepalingen der ordonna (Staatsblad No. 198), zooals die zijn van 28 October 1901 (Staatsblad No. van kracht, met dien verstande dat de worden overgestort bij den gemeente door den gemeenteraad te bepalen en inning toegekende belooning van 5-bedrag, plaats heeft uit de gemeent

§ 2. De gemeenteraad van Palembang van artikel 49 der Locale rade No. 181), de bepalingen der vorige andere te vervangen.

§ 3. Zoodra mogelijk, doch in elk g van het jaar 1908, treft de gemeenter voorzieningen, opdat de bemoeiingen, palingen aan het hoofd van gewestelijk

B. Voor het beheer door de geme meene begraafplaatsen.

§ 1. Onder toezicht van den ge streeksch beheer over de algemeene b Europeanen en met hen gelijkgesteld en Mooren en van Chineezen, uitgeo thans mede belast zijn, op den voet va menten; met dien verstande dat:

- a. benoeming en ontslag van leden d maatschap niet ambtshalve is opg gemeenteraad;
- b. van het geldelijk beheer jaarlijks, b van het jaar, rekening en verantwo gemeenteraad, die de uitgaven en gadering vaststelt, nadat de reken rende een maand voor een ieder te

Keputusan mengenai desentralisasi kota Palembang & pembentukan dewan gemeente (kotamadya) di Palembang. Jumlah anggota dewan adalah 13 orang yang terdiri dari: 8 orang eropa - 2 orang timur - 3 Pribumi, 21 Februari 1906

Sumber: ANRI, Staatsblad Van Indie No. 126-1906

artikel 5 bedoeld beheer, de voorziening behoeften en in het algemeen de bevoegdheid en het openbaar verkeer in de verfraaiing.

ien in andere behoeften der gemeente dens inachtneming van hetgeen aan de oriteiten is voorbehouden de grenzen van de bevoegdheid of de n gemeenteraad van Palembang en van Gouverneur-Generaal.

Artikel 9.

overgangsbepalingen.

ij artikel 2 sub b van deze ordonnantie derhouden (en aanleggen) van wegen Palembang.

ordonnantie van 30 September 1877 die zijn gewijzigd bij de ordonnantie ad No. 387), blijven voor de belasting dat de te dier zake ontvangen gelden gemeente-kashouder, op de tijdstippen, alen en de uitbetaling van de voor de van 5 (vijf) percent van het geïnd gemeentekas.

Palembang is bevoegd, met inacht-nale raden-ordonnantie (Staatsblad 1905 vorige paragraaf te wijzigen of door

in elk geval niet later dan met ingang neenteraad van Palembang de noodige eeningen, bij de in § 1 genoemde be-estelijk bestuur opgedragen, vervallen.

le gemeente Palembang van de alge-

den gemeenteraad wordt het recht-teene begraafplaatsen voor lijken van ggestelden, van Inlanders, Arabieren uitgeoefend door de colleges, die er voet van de daarvoor geldende regle-lat:

leden dier colleges, aan wie het lid-is opgedragen, geschieden door den

rlijks, binnen drie maanden na afloop erantwoording wordt gedaan aan den ven en ontvangsten in openbare ver-e rekening en verantwoording gedu-ieder ter lezing is nedergelegd op het

kantoor van 's raads voorzitter en tegen betaling der kosten in druk of in afschrift voor een ieder verkrijgbaar is gesteld, zomede van de nederlegging en de verkrijgbaarstelling openbare kennisgeving is gedaan.

§ 2. De gemeenteraad is bevoegd de bepalingen der vorige para-graaf te wijzigen of door andere te vervangen, onder voorbehoud evenwel, dat het bepaalde onder b in stand blijft zolang nog geen uitvoering is gegeven aan de hieronder in § 3 volgende bepaling.

§ 3. Zoodra mogelijk, doch in elk geval niet later dan in het jaar 1908, komen de uit het beheer der algemeene begraafplaatsen voortvloeiende uitgaven en ontvangsten op de gemeentebegroting voor.

Artikel 10.

Deze ordonnantie treedt in werking op 1 April 1906.

En opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende, zal deze in het Staatsblad van Nederlandsch-Indië geplaatst en, voor zooveel noodig, in de Inlandsche en Chineesche talen aangeplakt worden.

Gelast en beveelt voorts, dat alle hooge en lage Colleges en Ambte-naren, Officieren en Justiciëren, ieder voor zooveel hem aangaat, aan de stipte naleving dezer de hand zullen houden, zonder oogluiking of aanzien des persoons.

Gedaan te Buitenzorg, den 21^{sten} Februari 1906.

J. B. VAN HEUTSZ.

De w^{de} Algemeene Secretaris,
DE GROOT.

Uitgegeven den eersten Maart 1906.

De w^{de} Algemeene Secretaris,
DE GROOT.

STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH-INDIË.

1918 No. 612. BINNENLANDSCH BESTUUR. REIS- EN VERBLIJFKOSTEN. GEVANGENISWEZEN. PALEMBANG. Wijziging van de administratieve indeeling van en van de bestuursmiddelen in genoemd gewest.

Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië van 29 Augustus 1918 N^o 10.

Gelet enz.;

Nog gelet op de besluiten van 12 Januari 1878 N^o 2 (Staatsblad N^o 27), 13 November 1906 N^o 26 (Staatsblad N^o 466), 10 November 1911 N^o 31 (Staatsblad N^o 601), 9 Januari 1913 N^o 37 (Staatsblad N^o 24), 21 Januari, 17 Februari, 20 Maart, 20 Maart, 3 Juli en 12 September 1914 N^{os} 48, 19, 86, 88, 26 en 41 (Staatsblad N^{os} 81, 213, 289, 291, 480 en 611), 16 December 1915 N^o 9 (Staatsblad N^o 717), 25 Januari en 15 Mei 1916 N^{os} 56 en 14 (Staatsblad N^{os} 121 en 375);

Is goedgevonden en verstaan:

Eerstelijk: Met nadere wijziging van den staat Letter A, behorende bij het besluit van 17 Februari 1914 N^o 19 (Staatsblad N^o 213), zooals die staat is gewijzigd bij het besluit van 12 September d.a.v. N^o 41 (Staatsblad N^o 611) en artikel 1 van het besluit van 16 December 1915 N^o 9 (Staatsblad N^o 717), vast te stellen den aan dit besluit gehechten staat, aantonende de administratieve indeeling der residentie Palembang.

Ten tweede: Met buitendienststelling van den bij artikel 1, letter A, onder 1, van het besluit van 10 November 1911 N^o 31 (Staatsblad N^o 601) ten behoeve van de voormalige onderafdeeling Hoofdplaats Palembang der afdeeling Palembangische Benedenlanden in dienst gestelden controleur bij het Binnenlandsch Bestuur en van de twee bij het besluit van 9 Januari 1913 N^o 37 (Staatsblad N^o 24) in dienst gestelde controleurs bij het Binnenlandsch Bestuur, onderscheidenlijk aan den Resident toegevoegd en voor de afdeeling Palembangische Benedenlanden bestemd, zomede van den Inlandschen schrijver, in gevolge letter B, onder V, van het besluit van 20 Maart 1914 N^o 88 (Staatsblad N^o 291) toegevoegd aan elk der controleurs van de onderafdeelingen Moesi Iir (afdeeling Palembangische Benedenlanden), Ogan Oeloe (afdeeling Ogan en Komering Oeloe, thans afdeeling Ogan Oeloe en Komering) en Lematang Oeloe (afdeeling Palembangische Bovenlanden) en voorts met vermindering van de bij artikel 2, letter b, van het besluit van 16 December 1915 N^o 9 (Staatsblad N^o 717) vastgestelde personeelssterkte der kantooroppassers met drie, in de residentie Palembang in dienst te stellen:

a. een assistent-resident ter beschikking van het Hoofd van gewes-

1.1046

STAAT Letter A aantonende de administratie Palembang.

Afdeelingen. (1)	Onderafdeelingen. (1)	Marg
Hoofdplaats Palembang (2). Ctr. (3). (Palembang).		
Palembangsche Benedenlanden A.-R. (Sekajoe).	Moesi Iir. (4) (Sekajoe).	Abal Penc Telo Epil Mani Soen Law Poen Ping Sang Bata
	Banjoeasin en Ko-boo streken. (Talang Betoetoe).	Soen Oepa Soen Moesi Gasi Tan Talu Pang Soew Rim Baba Koe Soen Penc Rant

(1) De tusschen haakjes geplaatste naar aan der afdeelingen en onderafdeelingen.

(2) Het gebied dezer afdeeling wordt g hoofdplaats Palembang.

(3) De letters A.R. en Ctr. achter duiden aan, dat deze worden bestuurd door een controleur bij het Binnenlandsch

(4) Deze onderafdeeling wordt rechtst sistent-resident, hoofd der afdeeling, bij welke ambtenaar mede bestemd is om bin afdeeling te worden belast met zoodanig door het hoofd van plaatselijk bestuur zullen worden opgedragen. Aan het hoofd afdeelingen staat een controleur.

(5) Deze afdeeling heette te voren Og

Surat Keputusan Gubernur Jendral Hindia Belanda tanggal 29/8/1918 No.10 tentang perubahan di beberapa onderafdeeling dan afdeeling di Palembang

Sumber: ANRI, Staatsblad Van Indie No. 612-1918

administratieve indeeling der re-

Marga's en zelfstandige doesoens.

Abab.
Peroskal.
Telok Kidjing.
Epi.
Manteri Melajoe.
Soengei Kroh.
Lawang Wetan.
Poendjoeng.
Pinggep.
Sauga Desa.
Batang Hari Leko.

Soengei Rengas.
Oepang.
Soensang.
Moeara Telang.
Gasing.
Tan jong Laga.
Talang Kelapa.
Pangkadan Balei.
Soewak Tapeh.
Rimbo Asem.
Babat.
Koembang.
Soengei Aren.
Peneogean (zelfstandige doesoens).
Rantau Bajoer.

ste namen duiden de hoofdplaatsen
lingen.

vordt gevormd door de gewestelijke

achter den naam eener afdeeling
wordt door een assistent-resident of
landsch Bestuur.

rechtstreeks bestuurd door den as-
g, bijgestaan door een controleur,
om binnen het gebied dezer onder-
odanige werkzaamheden, als hem
tuur in het belang van de politie
t hoofd van elk der overige onder-

ren Ogan en Komering Oeloe.

1.1048

Afdeelingen. (1)	Onderafdeelin- gen. (1)	Marga's en zelfstandige doesoens.
		Pegagan Oeloe Soekoe II. Kajoe Agoeng. Telaka. Sira Poeloe Padang. Masoejji.

Behoort bij artikel 1 van het besluit van 29 Augustus 1918 N° 10
(Staatsblad N° 612).

Mij bekend:

De Algemeene Secretaris,
HULSHOFF POL.

1.1050

STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH-INDIË

1921 No. 465. BINNENLANDSCH BESTUUR. PALEMBANG
Wijziging van de administratieve indeeling van
genoemd gewest.

Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië
van 4 Augustus 1921 N^o 32.

Gelezen enz.;

De Raad van Nederlandsch-Indië gehoord;

Is goedgevonden en verstaan:

Eerstelijk: Met wijziging in zoover van den staat Letter A, behoorende bij artikel 1 van het besluit van 29 Augustus 1918 N^o 10 (Staatsblad N^o 612), zooals die staat moet worden gelezen ingevolge het besluit van 3 December 1918 N^o 13, de administratieve indeeling der residentie Palembang te wijzigen in diër voege, dat:

I. het gebied der afdeeling Hoofdplaats Palembang als onderafdeeling wordt ingelijfd bij de afdeeling Palembangsehe Benedenlanden;

II. de onderafdeeling Komering Iir wordt afgescheiden van de afdeeling Ogan Oeloe en Komering en gevoegd bij de afdeeling Palembangsehe Benedenlanden;

III. de afdeeling Ogan Oeloe en Komering voortaan den naam zal dragen van Ogan- en Komering Oeloe;

IV. de afdeeling Palembangsehe Benedenlanden wordt bestuurd door een Assistent-Resident met standplaats Palembang, en zal bestaan uit zes onderafdeelingen:

1. Hoofdplaats Palembang, onder den Assistent-Resident, hoofd der afdeeling, bijgestaan door een Controleur bij het Binnenlandsch Bestuur, eveneens met standplaats Palembang;
2. Ogan Iir, onder een Controleur bij het Binnenlandsch Bestuur met standplaats Tandjong Radja;
3. Komering Iir, onder een Controleur bij het Binnenlandsch Bestuur met standplaats Kajoe Agoeng;
4. Banjoearin en Koeboestrecken, onder een Controleur bij het Binnenlandsch Bestuur met standplaats Talang Betoetoe;
5. Moesi Iir, onder een Controleur bij het Binnenlandsch Bestuur met standplaats Selajoe;
6. Rawas, onder een Controleur bij het Binnenlandsch Bestuur, met standplaats Soeroelangoen.

Surat Keputusan Gubernur Jendral Hindia Belanda
tanggal 4/8/1921 No.32 tentang perubahan pembagian
wilayah di Palembang, 4 Agustus 1921

Sumber: ANRI, *Staatsblad Van Indie* No. 465-1921

Ten tweede: Te bepalen, dat artikel 1 van dit besluit in werking zal treden met ingang van 1 October 1921.

Ten derde: enz.

Afschrift enz.

Ter ordonnantie van den Gouverneur-Generaal
van Nederlandsch-Indië:

De Algemeene Secretaris,
CH. WELTER.

Uitgegeven den tweentwintigsten Augustus 1921.

De Algemeene Secretaris,
CH. WELTER.



Rapat Dewan Penasehat Sumatera Selatan. Dari kiri figur pejabat: R.M. Abib (direktur BPNSS); Pangeran Bakri (pasirah dari Lubuk Batang); Kiai H. Mochtar (wakil alim ulama Muara Enim), 16 Agustus 1948

Sumber: ANRI, NIGIS-RVD SUMSEL NO. 80816 DD 3



Rapat Dewan Penasehat Sumatera Selatan. Dari kiri figur pejabat: Ir. A. van Duur Sen (Administratur lama dari Plaju); W.V. Doop (Wnd - Burgermester); Pangeran M. Safe'I (pasirah dari Salatiga), 16 Agustus 1948

Sumber: ANRI, NIGIS-RVD SUMSEL NO. 80816 DD 5



Para pegawai redaksi "Pertja Selatan" diruang kerja surat kabar
Dinas Penerangan, Palembang, 3 September 1949

Sumber: NIGIS-RVD SUMSEL NO. 90903 DD 27



Rombongan Sultan Yogya (Sri Sultan HB IX) tiba di lapangan terbang Talang Betutu, Palembang, 23 September 1949
Sumber: NIGIS-RVD SUMSEL NO. 90923 DD 2





Rombongan Sultan Yogya (Sri Sultan HB IX) tiba di lapangan terbang Talang Betutu, Palembang, 23 September 1949

Sumber: NIGIS-RVD SUMSEL NO. 90923 DD 1





Resepsi diberikan oleh Kol. Luschsinger berkenaan dengan kunjungan Sultan HB IX. Tampak Sultan Yogya bersalaman dengan Kol. Luchsinger dan Raden Hanan menyaksikan di Palembang, 23 September 1949

Sumber: ANRI, NIGIS-RVD SUMSEL NO. 90923 DD 3



Saat resepsi kunjungan Sultan Yogya di Palembang. Dari kiri : Militer peninjau dari KPBBI France dari UNCI; Hr; Waardenburg (utusan WTM untuk Sumatera Selatan) bercakap-cakap dengan Sultan HB IX, 23 September 1949

Sumber: ANRI, NIGIS-RVD SUMSEL NO. 90923 DD 4



Presiden Sukarno ketika tiba di Palembang dalam rangka kunjungan kerja Presiden ke Palembang, Plaju dan Sungai Gerong, Sumatera Selatan, 8 September 1950

Sumber: ANRI, Kempen 501085



Presiden Sukarno berjarah ke makam pahlawan di Palembang, dalam rangka kunjungan kerja Presiden ke Palembang, Plaju dan Sungai Gerong, Sumatera Selatan, 8 September 1950

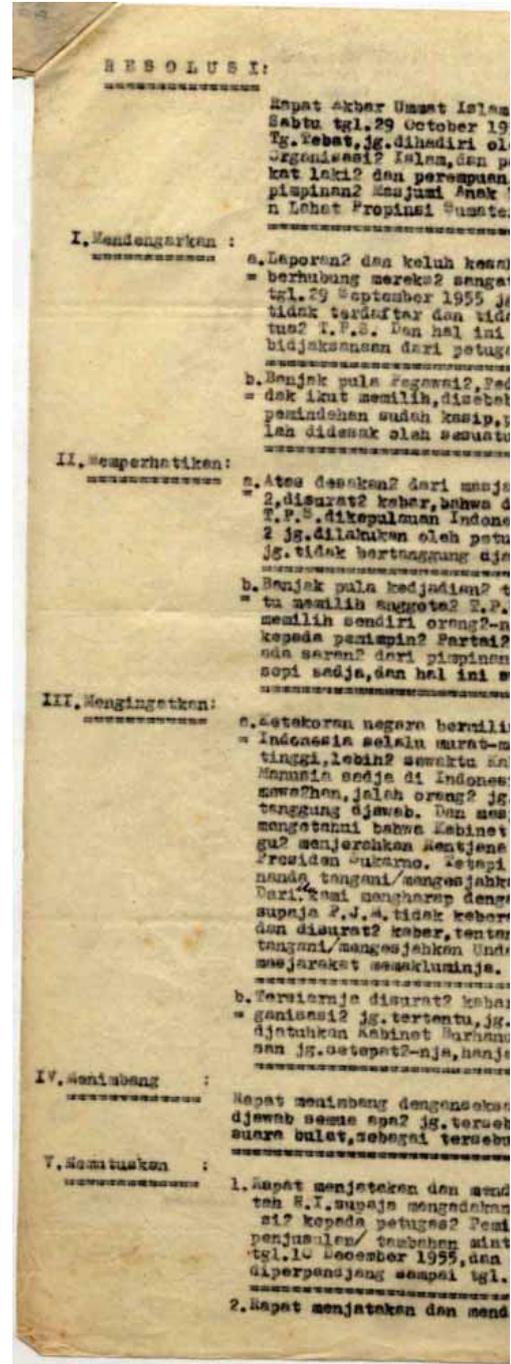
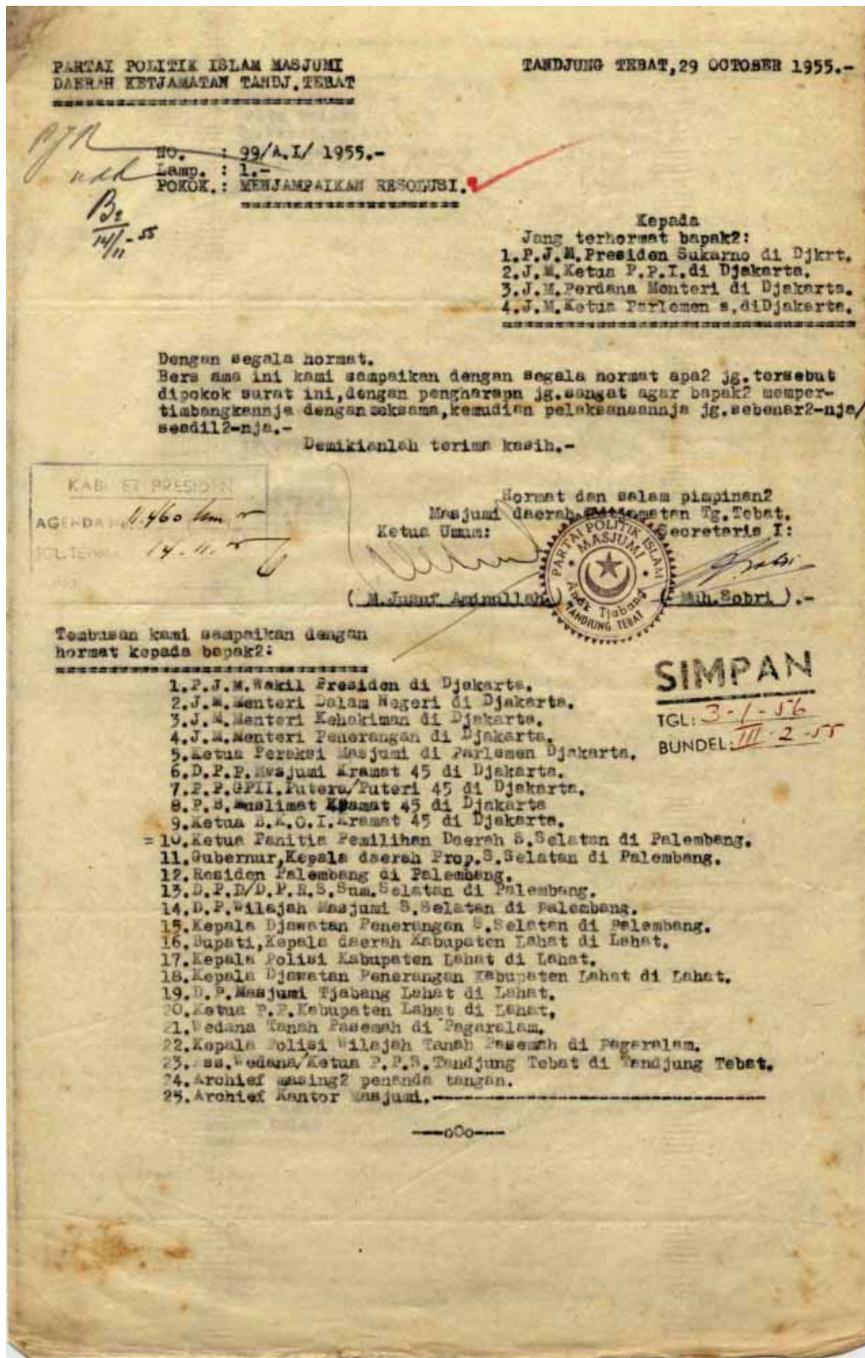
Sumber: ANRI, Kempen 501081



Wakil Presiden Mohammad Hatta meninggalkan bandar udara
Talang Betutu, Palembang, Sumatera Selatan, 14 Juli 1954

Sumber: ANRI, Kempen 540714 DD22





Resolusi Partai Politik Islam Masyumi Daerah Kecamatan Tanjung Tebat Palembang tentang permintaan kepada Pemerintah untuk memperpanjang pendaftaran Pemilihan Umum (pemilu) dan menertibkan kecurangan-kecurangan dalam pemilu tahun 1955, 29 Oktober 1955

Sumber: ANRI, Kabinet Presiden No. 97

Halaman I.

Islam daerah Ketjemenan Tg. Tebat, pada hari 10 Oktober 1955, bertempat di rumah Sekolah Rakyat Liri oleh semua pemimpin Partai Politik/Agama, dan para Alim Ulama, dan semua masyarakat. Rapat dipimpin dan dipelepori oleh Anas Tjebang Ketjemenan Tg. Tebat, Kabupate Sumatra Selatan.

1. Rapat menjabarkan dan mendesak kepada Pemerintah, supaya segera dihapuskan undang-undang yang membolehkan orang-orang yang beragama Islam untuk masuk ke dalam dinas-dinas pemerintah, dan untuk memegang jabatan-jabatan yang penting dalam pemerintahan.

2. Rapat menjabarkan dan mendesak kepada Pemerintah, supaya segera dihapuskan undang-undang yang membolehkan orang-orang yang beragama Islam untuk masuk ke dalam dinas-dinas pemerintah, dan untuk memegang jabatan-jabatan yang penting dalam pemerintahan.

3. Rapat menjabarkan dan mendesak kepada Pemerintah, supaya segera dihapuskan undang-undang yang membolehkan orang-orang yang beragama Islam untuk masuk ke dalam dinas-dinas pemerintah, dan untuk memegang jabatan-jabatan yang penting dalam pemerintahan.

4. Rapat menjabarkan dan mendesak kepada Pemerintah, supaya segera dihapuskan undang-undang yang membolehkan orang-orang yang beragama Islam untuk masuk ke dalam dinas-dinas pemerintah, dan untuk memegang jabatan-jabatan yang penting dalam pemerintahan.

5. Rapat menjabarkan dan mendesak kepada Pemerintah, supaya segera dihapuskan undang-undang yang membolehkan orang-orang yang beragama Islam untuk masuk ke dalam dinas-dinas pemerintah, dan untuk memegang jabatan-jabatan yang penting dalam pemerintahan.

6. Rapat menjabarkan dan mendesak kepada Pemerintah, supaya segera dihapuskan undang-undang yang membolehkan orang-orang yang beragama Islam untuk masuk ke dalam dinas-dinas pemerintah, dan untuk memegang jabatan-jabatan yang penting dalam pemerintahan.

7. Rapat menjabarkan dan mendesak kepada Pemerintah, supaya segera dihapuskan undang-undang yang membolehkan orang-orang yang beragama Islam untuk masuk ke dalam dinas-dinas pemerintah, dan untuk memegang jabatan-jabatan yang penting dalam pemerintahan.

8. Rapat menjabarkan dan mendesak kepada Pemerintah, supaya segera dihapuskan undang-undang yang membolehkan orang-orang yang beragama Islam untuk masuk ke dalam dinas-dinas pemerintah, dan untuk memegang jabatan-jabatan yang penting dalam pemerintahan.

9. Rapat menjabarkan dan mendesak kepada Pemerintah, supaya segera dihapuskan undang-undang yang membolehkan orang-orang yang beragama Islam untuk masuk ke dalam dinas-dinas pemerintah, dan untuk memegang jabatan-jabatan yang penting dalam pemerintahan.

Halaman II

2. Rapat menjabarkan dan mendesak kepada Pemerintah, supaya segera dihapuskan undang-undang yang membolehkan orang-orang yang beragama Islam untuk masuk ke dalam dinas-dinas pemerintah, dan untuk memegang jabatan-jabatan yang penting dalam pemerintahan.

3. Rapat menjabarkan dan mendesak kepada Pemerintah, supaya segera dihapuskan undang-undang yang membolehkan orang-orang yang beragama Islam untuk masuk ke dalam dinas-dinas pemerintah, dan untuk memegang jabatan-jabatan yang penting dalam pemerintahan.

4. Rapat menjabarkan dan mendesak kepada Pemerintah, supaya segera dihapuskan undang-undang yang membolehkan orang-orang yang beragama Islam untuk masuk ke dalam dinas-dinas pemerintah, dan untuk memegang jabatan-jabatan yang penting dalam pemerintahan.

5. Rapat menjabarkan dan mendesak kepada Pemerintah, supaya segera dihapuskan undang-undang yang membolehkan orang-orang yang beragama Islam untuk masuk ke dalam dinas-dinas pemerintah, dan untuk memegang jabatan-jabatan yang penting dalam pemerintahan.

Tanjung Tebat, 29 Oktober 1955.

Tanda tangan kami yg. bertanggung jawab sepenuhnya dan mewakili seluruh masyarakat Ketjemenan Tg. Tebat.

- | | | | |
|---|---|---|-----------------------|
| 1. M. Jusuf Aminullah wakil seluruh anggota2 masyarakat : | | | |
| 2. Burbejah | " | " | Muslimat: |
| 3. Sekup Linggang | " | " | GPII. Putera : |
| 4. Nurainah | " | " | GPII. Puteri : |
| 5. A i r | " | " | Muhammadiyah : |
| 6. Onodidjah Jusuf | " | " | Misjiah : |
| 7. Djankas | " | " | Mis. Wathon : |
| 8. Rasip | 2 | 2 | 'Alim 'Ulama : |
| 9. Mah. Sobri | " | " | Partai2 Islam 'BROI : |
| 10. Hadji Muhammad | " | " | S. S. I. I. : |
| 11. Mangka | " | " | Ex. P. djuang Islam : |



Timbang terima Residen Palembang, kiri Residen Palembang yang baru H.M. Hosen, kanan Residen Palembang yang lama Abdul Rozak, 1 Februari 1956

Sumber: ANRI, Kempen 560201/2



Presiden Sukarno berbincang di atas kapal
waktu menyebrang Sungai Musi di Palembang,
Sumatera Selatan, 10 April 1956
Sumber: ANRI, Kempen 560410 DD 11



Presiden Sukarno tiba di resepsi muktamar Muhammadiyah ke-33 di Palembang, disambut oleh barisan pandu, 23 Juli 1956

Sumber: ANRI, Kempen 560723 DD 7



Ketua Umum Muhammadiyah Abdul Rasyid St. Mansur berpidato pada Mukhtamar ke-33 Muhammadiyah tentang perjuangan Muhammadiyah di Palembang, Sumatera Selatan, 23 Juli 1956

Sumber: ANRI, Kempen 560723 DD 17



Presiden Sukarno mendengarkan laporan dari *Acting* Panglima Teritorial-II/Sriwijaya Letnan Kolonel Burlian, dalam rangka kunjungan Presiden ke Staf Komando Teritorial-II/Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan, 28 Juli 1956

Sumber: ANRI, Kempen 560724 DD 3



Upacara Timbang terima Jawatan Lalulintas Darat Pusat kepada Daerah Otonom Swatantra Tingkat I Sumatera Selatan di Palembang, 2 Oktober 1958

Sumber: ANRI, Kempen Nomor 581002/1



Pawai dan rapat raksasa mendukung ide kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dilapangan Mohammad Hatta Palembang, 17 April 1959

Sumber: ANRI, Kempen 590417 DD 1





nst.389/62.-

BEKUM DIKOREKSI
PIDATO P.J.M. PRESIDEN PADA RAPAT RAKSASA DEPAN KANTOR
GUBERNUR PALEMBANG PADA TANGGAL 10 APRIL 1962.

Saudara-Saudara, sekarang diam, diam, diam, diam. Itu sembojan-
sembojan tjoba turunkan. Jang kain digulung, jang buana lain diturun-
kan, turunkan. Ajo "T.G.M.I." itu turun. ...Itu...turun
atau dimiringkan. ...Ini, ini ini, ini "Front Nasional" digulung.
Kasih tahu "Front Nasional" gulung. Ja itu "Front Nasional" itu terus
gulung. Bendera itu turun.

Itu, itu, itu, kuning, kuning, kuning, miring, miring. Ja.
PNI 3 Ilir, miring. Itu, apa itu, "M.N.A.M.U." itu miring.
Saudara-Saudara sekarang diam, betul-betul diam, diam, diam, diam.
Nah, Saudara-Saudara, ...eh 26 Ilir.... turunkan saja, turunkan.
Saudara-Saudara lebih dahulu sebagai biasa salam Islam, AWW!
Wa'alaiikum salam! (sahut hadirin - red).
Kemudian pelak merdeka, Merdeka! Merdeka! Merdeka!
"Wanita Demokrat" turun.

Saudara-Saudara sekalian, Nopember 1960 Bapak datang disini, dan
sekarang sjukur alhamdulillah datang lagi disini. Sekarang bulan
April 1962. Waktu Bapak dalam bulan Nopember 1960 datang disini, Ba-
pak berdjandji kepada rakjat bahwa pembangunan djembatan Musi segera
akan dimulai. Dan pada waktu itu Bapak berkata, djembatan Musi ini
harus selesai dalam waktu 3 tahun. Djadi sebenarnya djembatan Musi
harus sudah dibuka Nopember 1960 ditambah dengan 3 tahun, Nopember
1963. Tapi, ja Saudara-Saudara, ja berhubung dengan beberapa kesulitan
jang harus diatasi lebih dahulu, pemantjangan tiang pertama daripada
djembatan Musi itu insja Allah SWT baru dapat didjalkan hari ini,
10 April 1962. Djadi kalau saja hitung 3 tahun lagi mendjadi 10 April
1965. Tidak setuju saja. Karena itu, jah meskipun Bapak minta maaf
kepada Saudara-Saudara sekalian bahwa permulaan pekerdjaan membuka
atau membuat djembatan Musi itu baru bisa berdjalan hari ini, Bapak
sekarang perintahkan supaja djembatan Musi bisa dibuka tanggal 10
April 1964. 10 April 1964, dan terutama sekali kepada pihak Djepang
jang akan mendjadi aannemer.

Duta Besar Oda saja minta berdiri. (hadirin bersorak2 - red).
"Arigato gozaimasu", djawab Duta Besar Djepang.

Ini Saudara-Saudara, Duta Besar Djepang. Saja minta agar dari pi-
hak Djepang jang mendjadi aannemer daripada djembatan ini bekerdja
keras supaja pada tanggal 10 April 1964 djembatan Musi sudah bisa
dibuka. Kepada rakjat saja minta bantuan djuga sekeras-kerasja per-
mulaan bulan April 1964 itu, ja sedialah masing-masing kambing untuk
dipotong nanti, ajam untuk dipotong nanti. Pada tanggal 10 April 1964
kita insja Allah SWT dengan berkat Allah, potong kambing, potong ajam,
ikan beladomembuka djembatan Musi.

Ja, ketjuali

Pidato P.J.M. Presiden pada rapat
raksasa di depan Kantor Gubernur
Palembang pada tanggal 10 April 1962
Sumber: ANRI, Pidato Presiden Sukarno No. 382

daripada kedjajaan manusia didunia ini. Lambang daripada kedjajaan insan ul kamil didunia ini. Lambang daripada tekad sesuatu bangsa jang sekali telah bersumpah, sekali merdeka tetap merdeka. Dan mendjalankan sumpahnja itu dengan segala konsekwensinja.

Saudara-Saudara saja sekarang hendak pergi ke djembatan Musi untuk mulai pekerdjaan membangun djembatan Musi itu. Sekali lagi saja minta agar supaja djembatan Musi ini dengan kerdja keras daripada sannemer, dengan bantuan kerdja keras daripada seluruh masjarakat Indonesia, pada tanggal 10 April 1964 bisa dibuka. Dan insja Allah SWT djikalau diberi oleh Tuhan hendaknja saja ingin mendjadi manusia pertama jang meliwati djembatan Musi pada tanggal 10 April 1964.

Sekian Saudara-Saudara AWW.

Wa'alaikum salam!

Merdeka!



Rapat Umum dengan slogan "Ganyang Pangkalan Militer Asing"
di Palembang, Sumatera Selatan, 19 September 1965

Sumber: ANRI, Kempen 650919-SS-1



Keagamaan

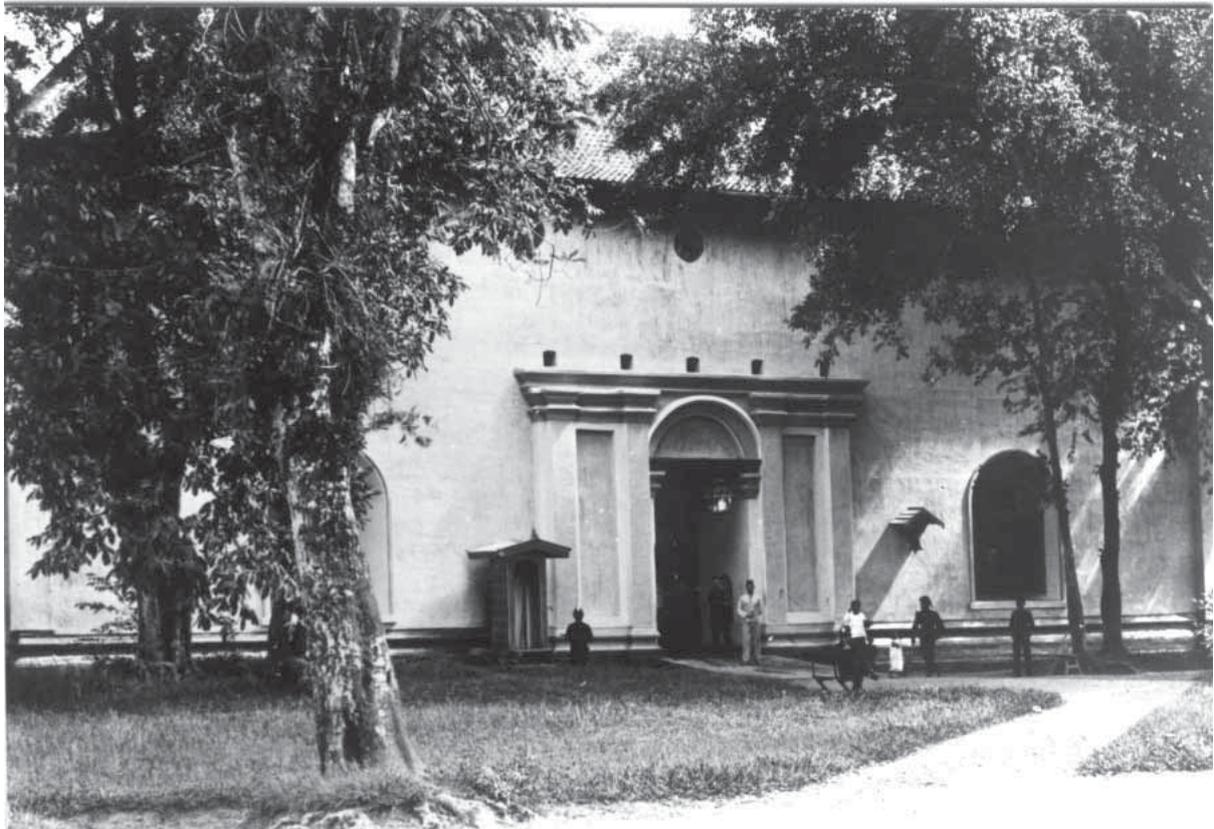


Kedatangan Islam di Palembang menjadikan wilayah ini salah satu pusat berkembangnya tradisi intelektual baik menyangkut keagamaan maupun sastra. Antara abad XVIII dan XIX, Palembang telah melahirkan sejumlah ulama penting dalam penulisan naskah dan kitab keagamaan yang produktif, diantaranya Syekh Abdus Samad al-Palimbani, Syihabuddin bin Abdullah Muhammad, Muhammad Muhyiddin bin Syihabuddin, Kemas Fakhrudin, Muhammad Ma'rif bin Abdullah, dll. Para ulama tersebut telah memberikan kontribusi penting terhadap munculnya tradisi keilmuan Islam di Palembang khususnya dan Nusantara-Melayu umumnya dengan mengarang dan menerjemahkan kitab keagamaan sehingga masyarakat muslim di wilayah ini dapat mengakses berbagai pengetahuan keislaman.. Pada akhir abad XVI Palembang merupakan *enclave* Islam terpenting bahkan pusat Islam di bagian selatan "Pulau Emas". Masjid Agung yang peletakan abut pertamanya masa Sultan Mahmud Badaruddin I (1724-1758) menjadi bukti perkembangan Islam di Kota Palembang. Selain berdiri mesjid megah, di Palembang juga berdiri beberapa gereja, klenteng Cina.



Klenteng orang Cina Palembang, Sumatera Selatan, [1930]

Sumber: ANRI: KIT 791/63



Salah satu gereja di Palembang, Sumatera Selatan, [1930]

Sumber: ANRI, KIT 1099/24



Para peserta yang menghadiri Kongres Protestan - Kristen meninggalkan gereja Haantjes di Palembang, 15 Agustus 1948
Sumber: ANRI, NIGIS-RVD SUMSEL NO. 80815 DD 5



Para undangan yang hadir saat pembukaan Kongres
Umum Kaum Protestan - Kristen, 15 Agustus 1948

Sumber: ANRI, NIGIS-RVD SUMSEL NO. 80815 DD 10071



Masjid Agung di Kota Palembang, yang dibangun abad ke-15 oleh Sultan Machmud Badaruddin II, 25 Agustus 1950

Sumber: ANRI, Kempen 50586





Masjid Agung di Kota Palembang, yang dibangun abad ke-15 oleh Sultan Machmud Badaruddin II, 19 April 1951

Sumber: ANRI, Kempen 512294



Suasana Masjid Agung di Kota Palembang yang sedang diperluas, dibangun abad ke-15 oleh Sultan Machmud Badaruddin II, 23 November 1955
Sumber: ANRI, Kempen 512294



Kedatangan Djemaah Hadji di Palembang, 5 Mei 1965

Sumber: ANRI, ID-ANRI_F-12_0285



Barang-barang Jemaah Haji yang datang
di Palembang, 5 Mei 1965

Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 0291



Kedatangan Jemaah Haji di Palembang, 5 Mei 1965

Sumber: ANRI, ID-ANRI_F-12_0284, ID-ANRI_F-12_0292



PENGURUS TJABANG

Palembang, 21 Djumadil Achir 13 91.
13 Agustus 1971.



PARTAI NAHDLATUL ULAMA
KOTAMADYA PALEMBANG
Alamat : Djl. T.P. Rostam Efendi 22
Telp. 21494.
PALEMBANG

Kepada
Jd. : Bapak Pengurus Besar
Partai Nahdlatul Ulama
Kramat Raya 164
DI JAKARTA.

Djika membalas, silau dalam surat silu, nomor surat silu

No. : 002..... / Tanf. / Tjab. / 1971.-

Lamp. : 2 (dua).-

Hal. : LAPORAN HASIL KONTJAB. PALEMBANG.-

*211
18/8/71*

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
Assalamu'alaikum w. w.

Dengan hormat,

Bersama ini kami kirimkan Notulen Konperensi Tjabang Partai Nahdlatul Ulama Kotamadya Palembang, yang berlangsung pada 31 Djuli 1971, dan daftar susunan Pengurus Tjabang priode 1971-1973 hasil keputusan Konperensi Tjabang tersebut.-

Demikianlah laporan kami dan dengan harapan semoga segera mendapat pengesjahan.-

Wa s a l a m,-

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamit Thoriq.-

*Pro. Bpk.
H. Hidayat*

*Dalam rangka
SK pagas ahs
segu*

18/8/71
(Dr. A. Hidjezi)



Pengurus Tjabang
Partai Nahdlatul Ulama Kotamadya
Palembang,

Sekretaris,
(Kms. Hasan Ashari)

Tembusan:

Jth. Bapak Pengurus Wilayah NU Sum.Sel.

----- a r s i p -----

Daftar : Dari keputusan Konferensi ke VII Partai Nahdlatul Ulama Tjebang Kotamadya Palembang bertempat di Balai Pertemuan Palembang tgl. 8 Djumadil Akhir 1391 H./31 Juli 1971 M.-

**DAFTAR PENGURUS Tjebang PARTAI NAHDLATUL ULAMA
KOTAMADYA PALEMBANG
Periode 1971-1973**

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| PANASERHAT | : | K.H. Daud Rusjdi
K.H.M. Hjadjari
Taufiq Abdullah Gathayr
H. Hamdani Neid |
| PURIBJAH | : | So'ia : K.H.M. Sen Djukri
WkI. So'ia I : K.H.A. Hamid Ajil
WkI. So'ia II : K.H.M. Salah Pathany
WkI. So'ia III : K.H.M. Amin Ashari
WkI. So'ia IV : K. Mattjik Achir
K a t i b : K.M. Sen Ismail
WkI. Katib : K. Kgo. H. Mattjik Asjad
Pars A'wan : K. S. Masin Al-Munawar
K.H. Makmin
K.H.M. Jusuf Hamid
K. U m a r |
| PIMPINDRIJAH | : | K e t u a : K.M. Jusuf Umar
WkI. Ketua I : Drs. Achmad Hidayat
WkI. Ketua II : Ems. Usman Fikri
WkI. Ketua III : Taufiq Ali Gathayr
WkI. Ketua IV : H.M. Hassan
Sekretaris : Ems. Usman Ashari
WkI. Sekretaris I : Gafroh Ba.
WkI. Sekretaris II : Mungtjik Hamid
Bendahara : H.A. Asis Siddik
WkI. Bendahara : S. Alwi Alkaf |
| FINAN BAYANG / LEMBAGA | : | L e p a n a : N. Usman Nains
Konsel : K.A.S. Amantjik
Keuangan : H.A. Asis Siddik
Da'wah : Ustaz A. Malik Tedjuddin
Islah : K. Jusuf Umar
Prakai : Ir. K. Madani Idrus
Ma'srif : Ustaz A. Malik Tedjuddin
Anggota2 Pleno : Sama Ketua2 Ormas2 N.U.
Tjebang Kodya Palembang. |

Palembang, 8 Djumadil Akhir 1391 H.
31 Juli 1971 M.

Pengurus Tjebang
Nahdlatul Ulama Kotamadya
Palembang.

WkI. Ketua I, (Drs. Achmad Hidayat)
Sekretaris, (Ems. Usman Ashari)



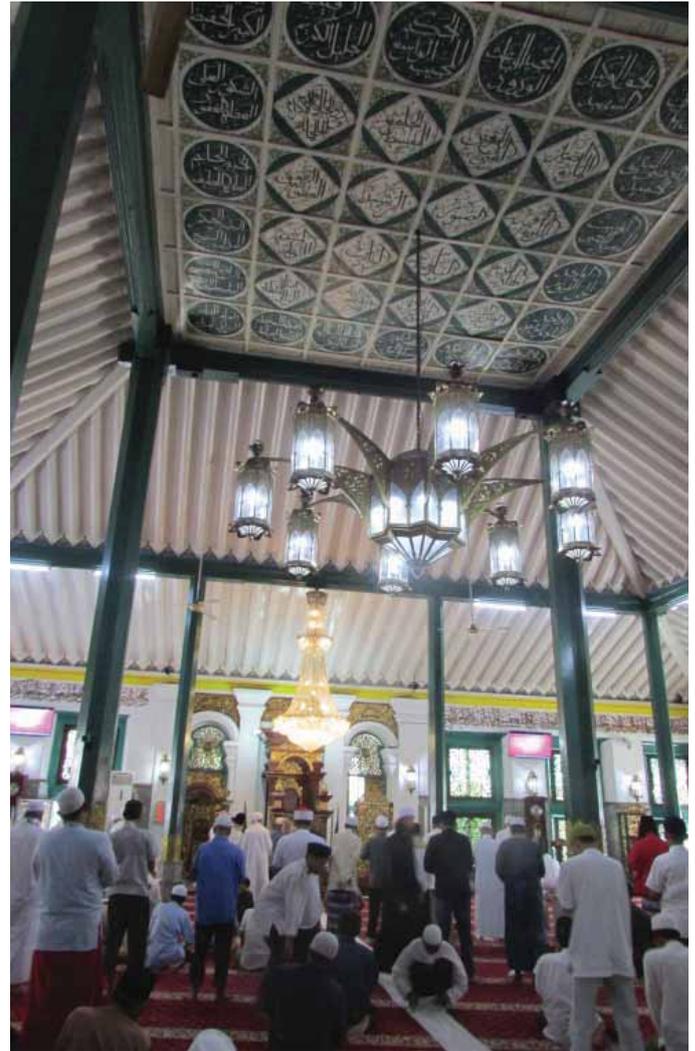
Laporan hasil konfrensi cabang
Partai Nahdlatul Ulama Kotamadya
Palembang, 13 Agustus 1951
Sumber: ANRI, Nahdlatul Ulama (NU) No. 706



Masjid Agung di Kota Palembang, yang dibangun abad ke-15 oleh Sultan Machmud Badaruddin II, setelah perluasan masjid di belakang masjid utama, 18 Desember 2008

Sumber: ANRI, PNSAP Sumsel 1





Masjid Agung di Kota Palembang, yang dibangun abad ke-15 oleh Sultan Machmud Badaruddin II, 3 Mei 2019
 Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang





Mesjid Cheng Ho, Palembang, 2019

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Palembang

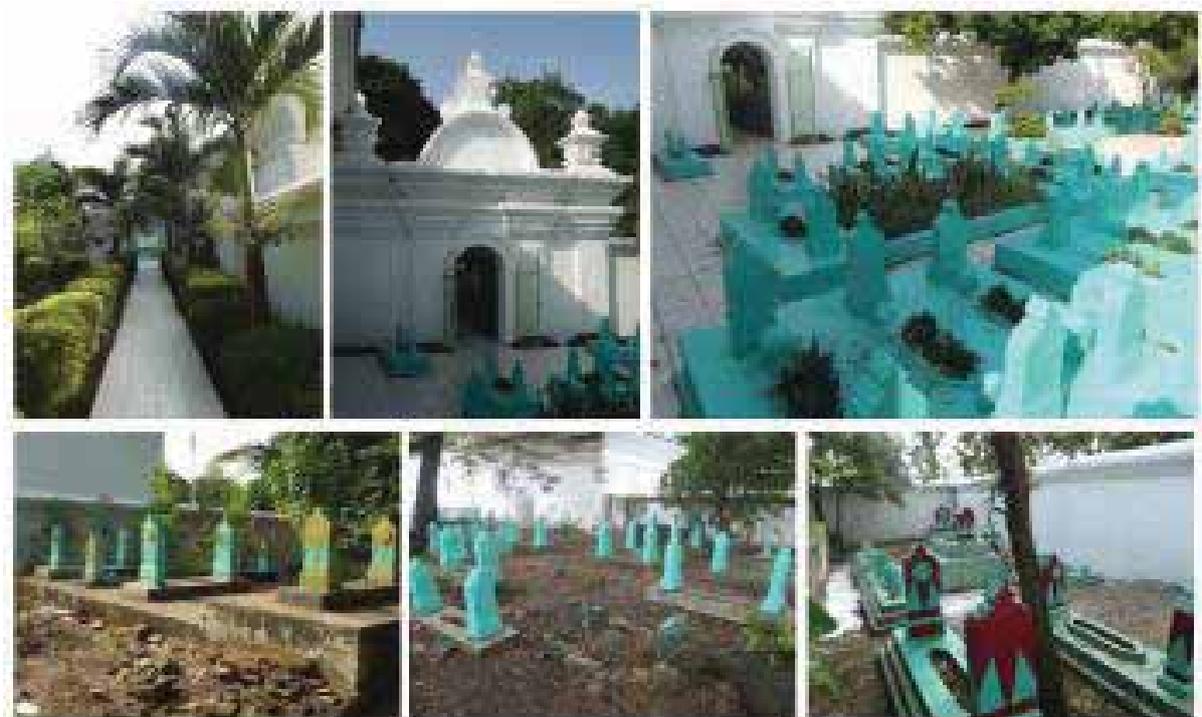


Klenteng Dewi Kwan Inn, Palembang, 2019

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Palembang



Makam Cinde Walang, Palembang, 2019
 Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang



Makam Kawah Tekurep, Palembang, 2019
 Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang



Makam Bagus Kuning, Palembang, 2019

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang



Makam Ki Gede Ing Suro Tuo, Palembang, 2019

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang



Makam Sabo King king, Palembang, 2019
 Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang



Makam Sultan Agung, Palembang, 2019
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang

Budaya dan Pariwisata



Arsitektur masjid Agung Palembang sekilas terlihat gaya seperti bangunan klenteng Cina berpadu dengan gaya Kolonial Belanda. Pengaruh arsitektur Cina tampak pada bentuk atap masjid dan menara. Sedangkan pengaruh arsitektur Belanda terlihat pada bentuk tiang-tiang beton berbentuk doric order di ruangan serambi Masjid.

Warisan *heritage* diantaranya, Benteng Kuto Besak, bangunan Jacobson van Den Berg, Mesjid Agung, Mesjid Chengho, serta warisan seni budaya seperti Tari Gending Sriwijaya, Perkawinan Adat Sumatera Selatan, Tari Menumbuk Padi, Orkes Arab, dll. Selain itu, Palembang juga terkenal dengan wisata kuliner , seperti mpek mpek, mie celor, kerupuk kemplang, kue dadar jiwo, kue gandis, kue jongkong, dll. Pulau Kemaro, Bukit Siguntang dan Danau Opi salah satu wisata alam di Palembang.





Tiga gadis penari berpakaian adat
Palembang, 30 Agustus 1949
Sumber: ANRI, Kempen 90830 DD 6-5



Masyarakat penduduk setempat menyaksikan balap sepeda keliling Palembang dalam rangka ultah Negara Sumatera Selatan di Palembang, 30 Agustus 1949

Sumber: ANRI, NIGIS-RVD SUMSEL No. 90830 DD 5-1



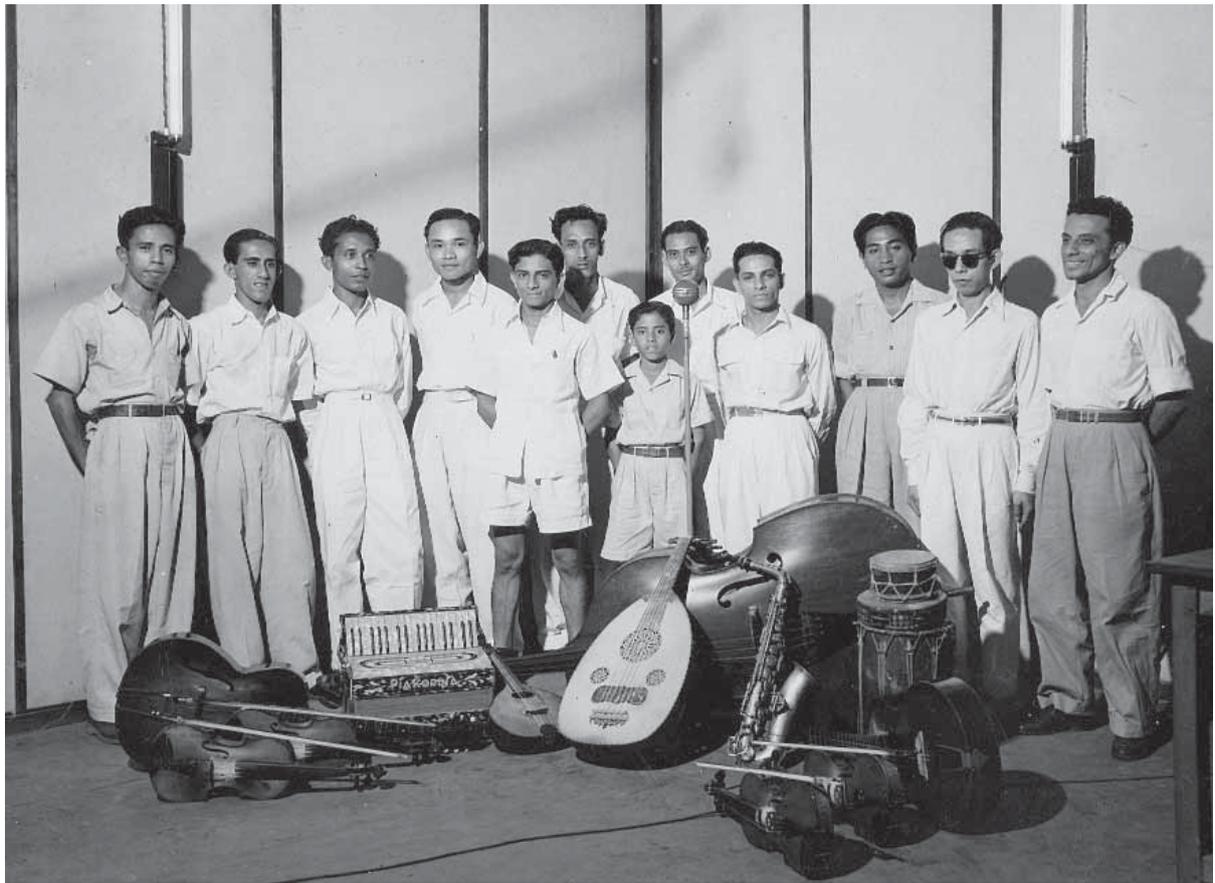


Masyarakat menyaksikan pertandingan balap perahu di Sungai Musi dalam acara ulang tahun Negara Sumatera Selatan di Palembang, 30 Agustus 1949
Sumber: ANRI, NIGIS-RVD SUMSEL No. 90830 DD 5-3





Seorang gadis berpakaian adat sedang menarikan tari Gending Sriwijaya di pasar malam, 30 Agustus 1949
Sumber: ANRI, NIGIS-RVD SUMSEL No. 90830 DD 6-7



Rekaman orkes Arab di Radio Palembang. Tampak personel dan alat-alat musik Arab, 3 September 1949
Sumber: ANRI, NIGIS-RVD SUMSEL NO. 90903 DD 24



Seorang lelaki keturunan Arab sedang berpiano untuk rekaman orkes Arab di Palembang, 3 September 1949
Sumber: ANRI, NIGIS-RVD SUMSEL No. 90903 DD 33



Pertunjukan tari Gending Sriwijaya oleh gadis-gadis Palembang di teater initium saat pelantikan Wali Negara Sumatera Selatan, 21 September 1949

Sumber: ANRI, NIGIS-RVD SUMSEL No. R 90921 FG 1-3



Penari Gending Sriwijaya oleh gadis
di Palembang, 8 September 1950
Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 1530



Para gadis berpakaian khas adat Palembang yang menari
Tari Gending Sriwijaya, 30 November 1950

Sumber: ANRI, Kempen 50597



Tari Gending Sriwijaya, menyambut kedatangan Presiden
Sukarno di Palembang, Sumatera Selatan, 30 November 1950

Sumber: ANRI, Kempen 501129



Presiden dengan para penari Gending Sriwijaya,
Palembang, Sumatera Selatan, 30 November 1950

Sumber: ANRI, Kempen 501130



Tari Menumbuk Padi, Palembang,
Sumatera Selatan, 30 November 1950

Sumber: ANRI, Kempen 501167



Presiden Sukarno dan Ibu Fatmawati disambut dengan tarian adat, ketika tiba di rumah Gubernur Sumatera Selatan di Palembang, 9 November 1954
Sumber: ANRI, Kempen 541109 DD 9





Kunjungan misi kebudayaan Cekoslowakia di Indonesia, ketua misi Pavel Dubovsky dan para penari, sedang berjabat tangan dengan Gubernur R. Winarno, Palembang 17 Januari 1957

Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 0301, ID-ANRI F-12 0308-a



Pertunjukan tarian oleh misi kebudayaan Cekoslowakia di Palembang, 17 Januari 1957

Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 0304-a, ID-ANRI F-12 0306-a



Bukit Siguntang, Palembang, 2019
Sumber: Dinas Pariwisata Kota Palembang



Danau Opi, Palembang, 2019
Sumber: Dinas Pariwisata Kota Palembang



Kampung Kapitan, Palembang 3 Mei 2019
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang



Museum Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang, 2019

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang



Museum Bala Putra Dewa, Palembang, 2019

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Palembang



Benteng Kuto Besak, Palembang, 2019
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang



Bangunan cagar budaya Jacobson Van Den Berg, Kota Palembang, 3 Mei 2019
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang





Pulau Kemaro, Palembang, 2019
Sumber: Dinas Pariwisata Kota Palembang





Pempek atau empek-empek makanan khas Kota Palembang, 2019
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang



Pempek atau empek-empek makanan khas Kota Palembang, 2019
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang



Mie Celor makanan khas Kota Palembang, 2019
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang



Tekwan makanan khas Kota Palembang, 2019
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang



Kerupuk Kemplang makanan khas Kota Palembang, 2019

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang



Kue Dadar Jiwo makanan khas Kota Palembang
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang



Kue Jongkong makanan khas Kota Palembang, 2019
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang



Kue Gandus makanan khas Kota Palembang, 2019

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang

Pendidikan dan Olahraga



Sejak masa kolonial di Kota Palembang telah dibangun sekolah-sekolah rakyat. “Gubernemen” menambah lagi sarana pendidikan dalam Sekolah Standard (*Vervolgschool*). Pada tahun 1927 di Kota Palembang telah berdiri HIS dan MULO. Berbeda dengan Sekolah Rakyat lainnya, MULO hanya diperuntukkan bagi anak-anak kelompok pejabat pemerintah yang berlatar sosial bangsawan dan pasirah dari uluan. Pada tahun 1956, di Kota Palembang sarana pendidikan sangat memadai. Terlihat dengan berdirinya Sekolah Rakyat Negeri, Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri, Sekolah Swasta (Misi Katolik Roma, Xaverius dan Methodist). Sekolah-sekolah kejuruan serta pada tahun 1960 peresmian status negeri Universitas Sriwijaya bahkan sebelumnya telah dibangun Universitas “Shakyakerti” oleh Zeni Pionir AD.

Dalam bidang Olahraga di Kota Palembang telah dibangun Kompleks Olahraga Jakabaring yang merupakan kompleks dari berbagai fasilitas Olahraga di Palembang. Kota yang memiliki lambang Bangunan Sirih atau Rumah Palembang, dipilih oleh Dewan Olimpiade Asia pada tanggal 25 Juli 2014 menjadi tuan rumah pendukung pada Pesta Olahraga Asia XVIII tahun 2018, yang merupakan ajang Olahraga wilayah Asia.



Kunjungan Major John Lie di Palembang, sedang memberikan ceramah pada murid-murid SMA di balai pertemuan, Palembang 23 Oktober 1952

Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 1015, ID-ANRI F-12 1019







Ibu Walikota Palembang ketika memberikan sebuah piala kepada juara wanita pemilihan bintang pelajar, 5 Februari 1956

Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 0879



Pembangunan Universitas "SHAKYAKERTI"
oleh Zeni Pionir AD di Palembang, 23 Juli 1960
Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 0255, ID-ANRI F-12 0253



nst.1659/60.-

AMANAT PJM PRESIDEN SUKARNO PADA PENEGARAAN
UNIVERSITAS SRIWIDJAJA; PALEMBANG
3 NOVEMBER 1960.

Saudara-Saudara sekalian,

Sebagai tadi dikatakan oleh Sdr. Dr. Mohammad Isa, memang benar didalam satu perijalanan ini saja meresmikan penegerian dua Universitas, yaitu satu Universitas di Bandjarmasin, Universitas Lambung Mangkurat, dan sekarang ini Universitas di Palembang, Universitas Sriwidjaja.

Prof. Dr. Prijono berkata bahwa kejadian ini adalah satu kejadian yang unik -- tidak, Dr. Isa yang berkata demikian -- bahwa seorang Kepala Negara didalam satu perijalanan meresmikan dua Universitas dan Dr. Prijono berkata bahwa kita sekarang sudah mempunyai 10 Universitas Negeri, yang 10 Universitas Negeri itu, jumlah mahasiswa sekarang telah 55 ribu orang, dan di kala ditambah dengan mahasiswa-mahasiswa Universitas-Universitas Swasta, jumlah mahasiswa kita pada saat sekarang ini lebih dari 65 ribu.

Bandingkanlah hal itu dengan djaman kolonial. Misalnja tatkala saja -- demikianlah saja katakan di Bandjarmasin -- menjadi mahasiswa di Bandung pada Sekolah Teknik Tinggi, maka pada waktu itu saja adalah satu mahasiswa Indonesia diantara 11 mahasiswa Indonesia. Waktu itu adalah tahun 1921. Satu diantara 11, sekarang ini jumlah mahasiswa Indonesia 65 ribu. Hasil pekerdjaan dari, katakanlah kurang daripada 10 tahun. Jumlah murid kita sekarang adalah 9 djuta, didjaman Belanda, sebelum Perang Dunia, hanya 2 djuta. Duabelas kali saudara-saudara, bertambah jumlah murid-murid kita, boratus-ratus kali bertambah jumlah mahasiswa kita.

Ketjuali itu, haruslah memberi kita satu dorongan untuk beresukur terhadap Allah bahwa kita diberi negara yang merdeka, yang terbukti sekarang, yang didalam negara merdeka itulah kita bisa memperhebat usaha pentjerdasan rakjat sesuai dengan apa yang saja katakan didalam pidato saja didalam djaman Djeyang yang tadi disitir oleh Dr. Mohammad Isa. Pidato disidang Dokuritsu Zyumbi Chosakai, yang berlainan dengan beberapa anggota daripada Dokuritsu Zyumbi Chosakai itu, yang berkata:.... Sebelum kita merdeka kita harus lebih dahulu pandai ini, tjakap itu, tjerdas ini.... saja berkata:.... Tidak, sebaliknya, merdeka adalah syarat untuk mendjawi tjerdas, didalam alam kemerdekaan kita bisa mentjerdaskan rakjat kita, didalam alam kemerdekaan kita bisa menjehatkan rakjat kita, didalam alam kemerdekaan kita, kita bisa memakmurkan rakjat kita. Sesuai dengan utjapan saja bahwa kemerdekaan adalah

djembatan emas

Amanat Presiden Sukarno pada peresmian status negeri
terhadap Universitas Sriwijaya Palembang, 3 November 1960

Sumber: ANRI, Pidato Presiden 236



Presiden Sukarno menandatangani piagam peresmian Universitas Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan, disaksikan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PPK) Prof. Prijono, 3 November 1960

Sumber: ANRI, Kempen 601103 DD 35



Gedung Universitas Negeri Sriwijaya di Palembang,
Sumatera Selatan, 3 November 1960

Sumber: ANRI, Kempen 601103 DD 40





Hari Pendidikan Nasional di Palembang, 2 Mei 1965

Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 0865, ID-ANRI F-12 0871







Ir. Sadono (memegang microphone) adalah perancang roket "Pramuka Sriwijaya I" menjelaskan kepada Panglima Kodam IV/ Sriwijaya Brigadir Jenderal Makmun Murod, 16 Mei 1965

Sumber: ANRI, Kempen 65-0516-4





Gubernur Sumatera Selatan Brigadir Jenderal TNI HAJ. Bustomi, Jaksa Tinggi Sugiarto SH., dan Panglima Daerah Militer IV/ Sriwijaya Brigadir Jenderal Makmun Murod pada saat peluncuran roket "Pramuka Sriwijaya I" di Km 19, 16 Mei 1965

Sumber: ANRI, Kempen 65-0516-5, Kempen 65-0516-1





Kejuaraan tennis terbuka Sumatera Selatan-Jambi-Lampung
15 sampai 20 Juni 1965 di Palembang

Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 0857, ID-ANRI F-12 0864







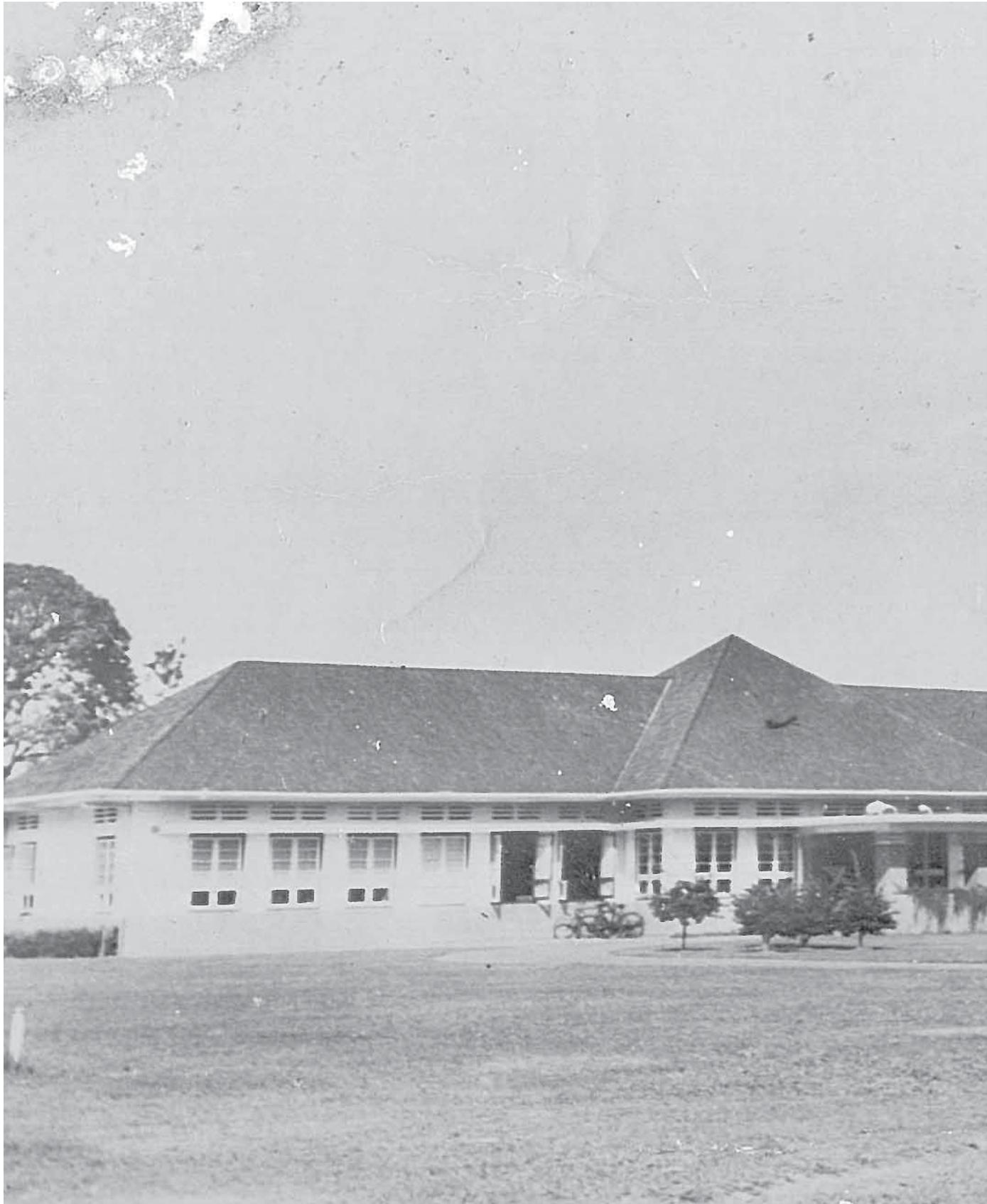
Jakabaring Sport City (JSC) atau Kompleks Olahraga Jakabaring merupakan kompleks dari berbagai fasilitas olahraga di Palembang, 2019
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang



Kesehatan

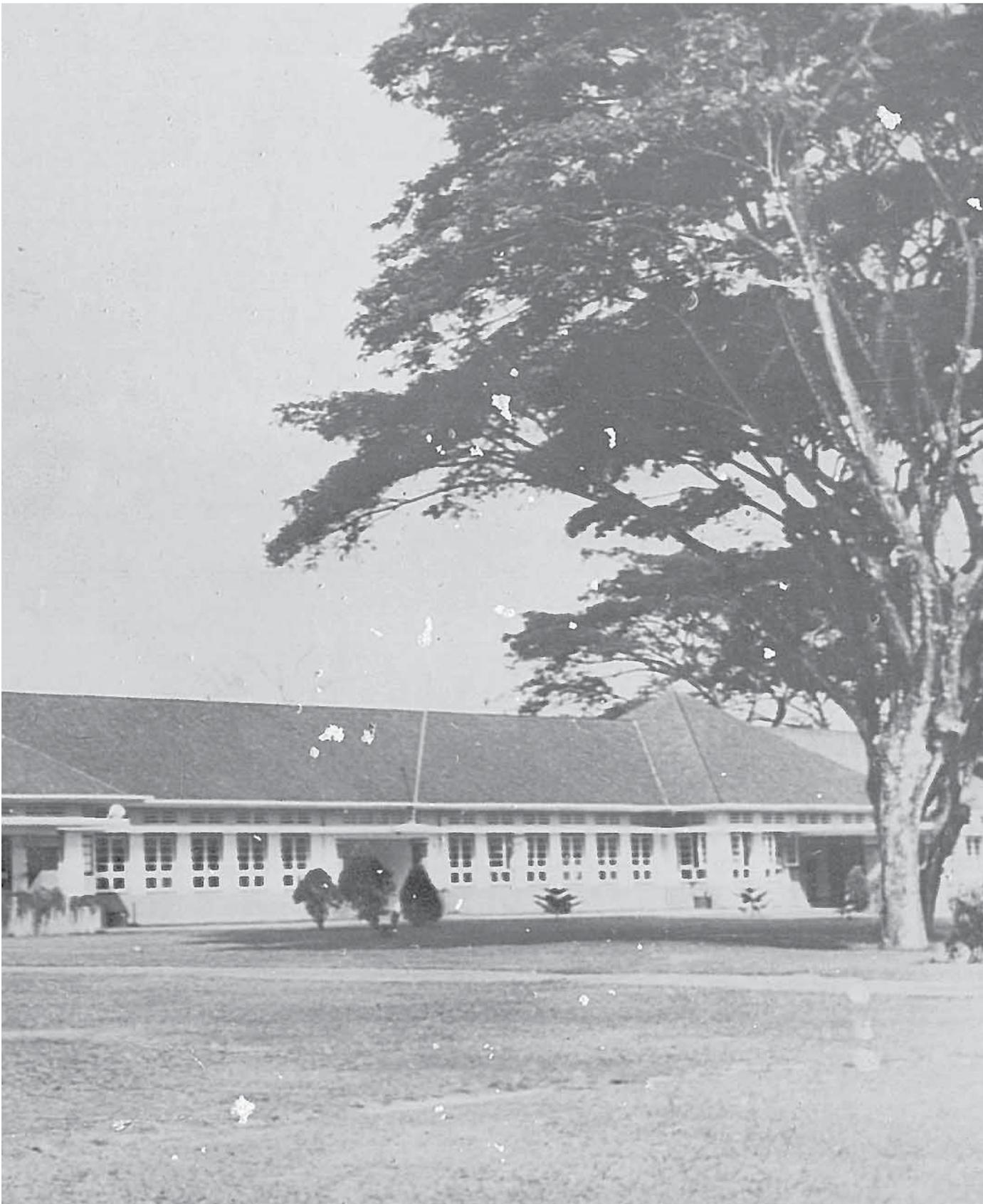


Fasilitas untuk urusan kesehatan di Palembang tahun 1940-an sudah memadai. Beberapa pekerja perkebunan perusahaan Karet mendapat fasilitas kesehatan bahkan sampai fasilitas pemeriksaan mata oleh dokter militer Belanda. Beberapa Rumah Sakit berdiri di Palembang, diantaranya Rumah Sakit Palembang, Rumah Sakit Plaju.



Bangunan rumah sakit di Plaju, [1940]

Sumber: ANRI, NIGIS-RVD SUMSEL No. B615

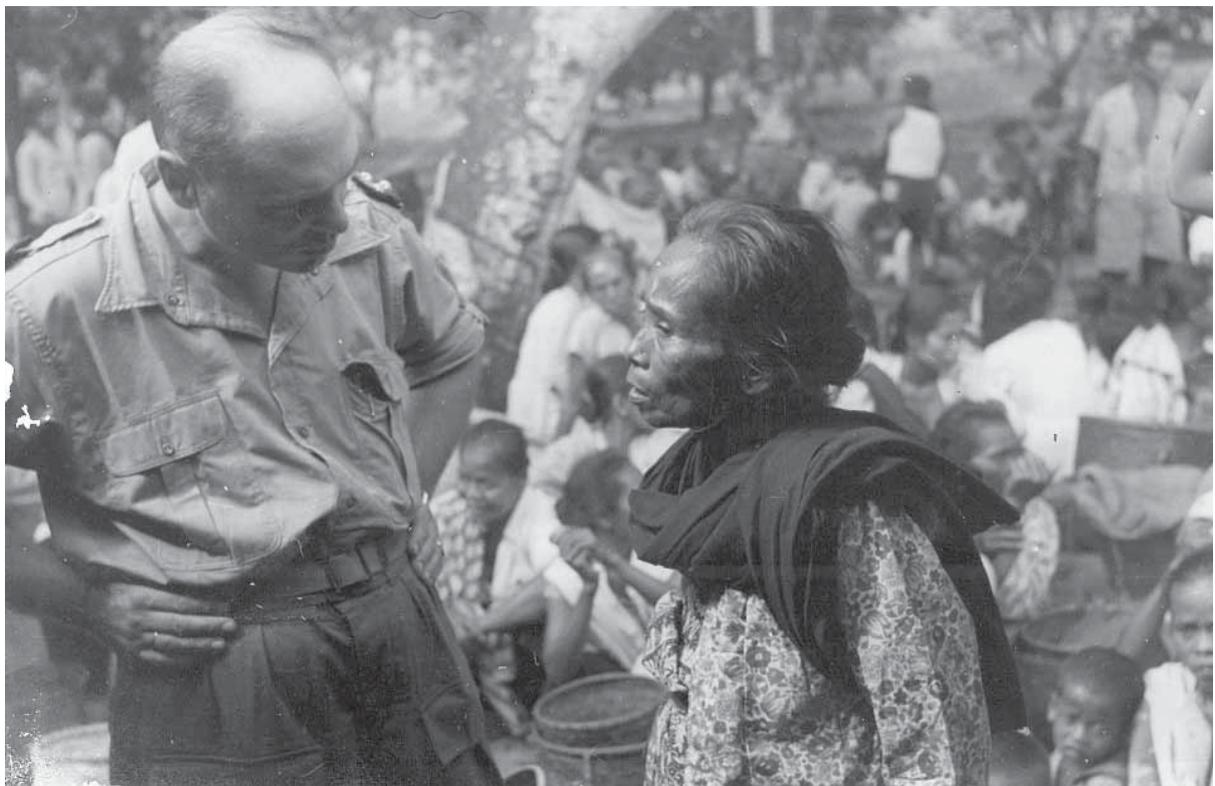




Seorang pekerja perkebunan perusahaan karet "Tebanan" sedang diperiksa matanya oleh dokter militer Belanda di Palembang, [1940]
Sumber: ANRI, NIGIS-RVD SUMSEL No. FB 60095



Seorang ibu dan anaknya sedang diperiksa oleh dokter. Tampak dibelakang para pekerja perkebunan menunggu untuk diperiksa kesehatannya di Palembang [1940]
Sumber: ANRI, NIGIS-RVD SUMSEL No. FB 70093



Seorang ibu dan anaknya sedang diperiksa oleh dokter militer di Palembang, [1940]

Sumber: ANRI, NIGIS-RVD SUMSEL NO. FB 80094



Pembagian beras untuk para pekerja perkebunan karet "Tebanan" di Palembang, [1940]

Sumber: ANRI, NIGIS-RVD SUMSEL NO. FB 90092



Rumah Sakit Umum Palembang,
Sumatera Selatan, 11 Maret 1958
Sumber: ANRI, Kempen 580311 DD 3



KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

NR: 89/Kab/Rahasia.

LAMPIRAN: ---

PERIHAL: Mendirikan Rumah Sakit
di Palembang.

Untuk sendiri.

DJAKARTA, 23 Djuni 1951.

Saudara Presiden Jang Mulia,

Dengan utjapan banjak terima kasih, kami telah menerima dari Saudara Presiden Jang Mulia seputjuk surat dari Saudara Gubernur Sumatera Selatan, Dr. M. Isa, jang disertai dengan surat Dr. Hakim, Inspektur Djawatan Kesehatan Rakjat Propinsi Sumatera Selatan, sebagai lampiran.

Pada hemat kami tidak perlu Saudara Dr. Isa menjampaikan keluh kesahnja kepada Saudara Presiden Jang Mulia, djika beliau mengerti duduk perkaranja mendirikan Rumah Sakit di Palembang. Segala sesuatu kami telah terangkan lagi kepada Saudara Dr. Isa, waktu beliau berada di Djakarta pada minggu jang lalu. Meskipun demikian, kami menganggap perlu menerangkan kepada Saudara Presiden Jang Mulia sedikit tentang soal mendirikan Rumah Sakit Palembang itu.

Karena memang soal Rumah Sakit ini mengenai nama Presiden dan mengenai pula suatu Kepentingan dan kebutuhan masjarakat di Palembang dan sekitarnja, kami, sesudahnja pulang dari perdjalenan dengan rombongan Presiden, berusaha mendapat ke-longgaran dari Kementerian Keuangan untuk mendirikan Rumah Sakit tersebut. Segala sesuatu jang berhubungan dengan hal keuangan telah diurus, uang jang diperlukan untuk mulai bekerdja telah ada. Saudara Dr. Hakim dan Dr. Isa mengetahui hal ini. Jang diperlukan ialah gambar-gambar (ontwerp). Saudara Hakim mendapat dari Kementerian kami satu tjontoh "ontwerp", jang tentu sadja tidak dapat "ditjiplak" begitu sadja untuk Palembang, oleh karena segala sesuatu harus disesuaikan dengan keadaan dan keperluan setempat. Lagi pula Kementerian Kesehatan tidak mempunjai tugas membikin "ontwerp" dari rumah-rumah sakit - pekerdjaan ini senantiasa diserahkan kepada Djawatan Pekerdjaan Umum didaerah -, ia hanja menjelidikinja dari sudut hospitaalhygiene. Rupanja di Palembang tidak ada pegawai Pemerintah jang dapat membikin gambar-gambar itu. Dalam hal ini biasanja gambar-gambar itu dapat dibikin oleh instansi partikelir atau daerah minta pertolongan dari Kementerian Pekerdjaan Umum di Djakarta. Hal ini djuga telah diterangkan kepada Dr. Hakim, tetapi ia belum mengerdjakannja. Tidak

mungkin

Kehadapan Jth.

Paduka Jang Mulia
Presiden Republik Indonesia,
Istana Merdeka,
Djakarta.

Surat dari Menteri Kesehatan kepada Presiden RI tentang pendirian rumah sakit di Palembang, Sumatera Selatan, 23 Juni 1951

Sumber: ANRI, ANRI: Kabinet Presiden 634



Para juru rawat di Rumah Sakit Umum Palembang, 11 Maret 1958
Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 0941

Ekonomi dan Industri

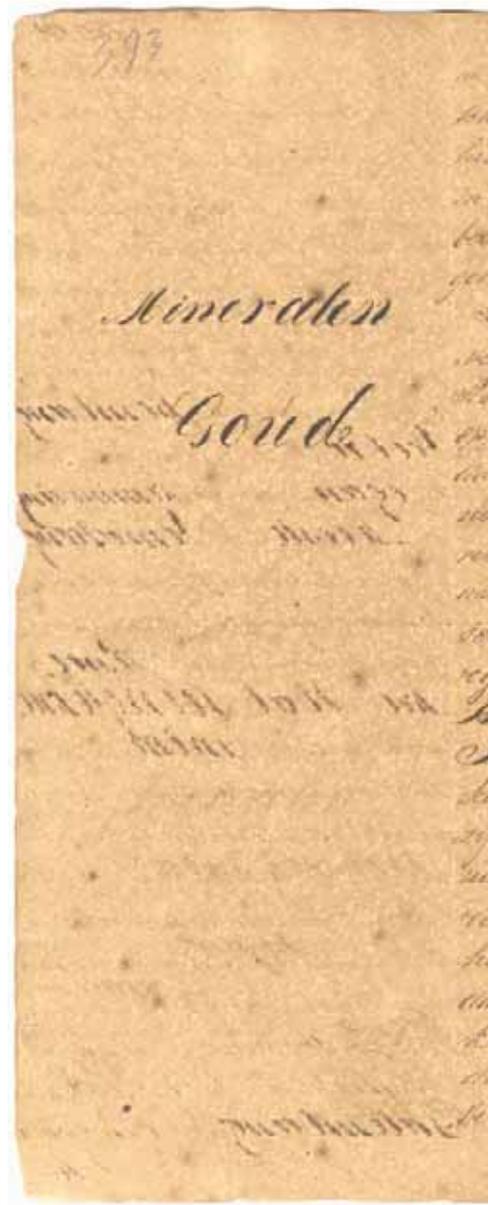
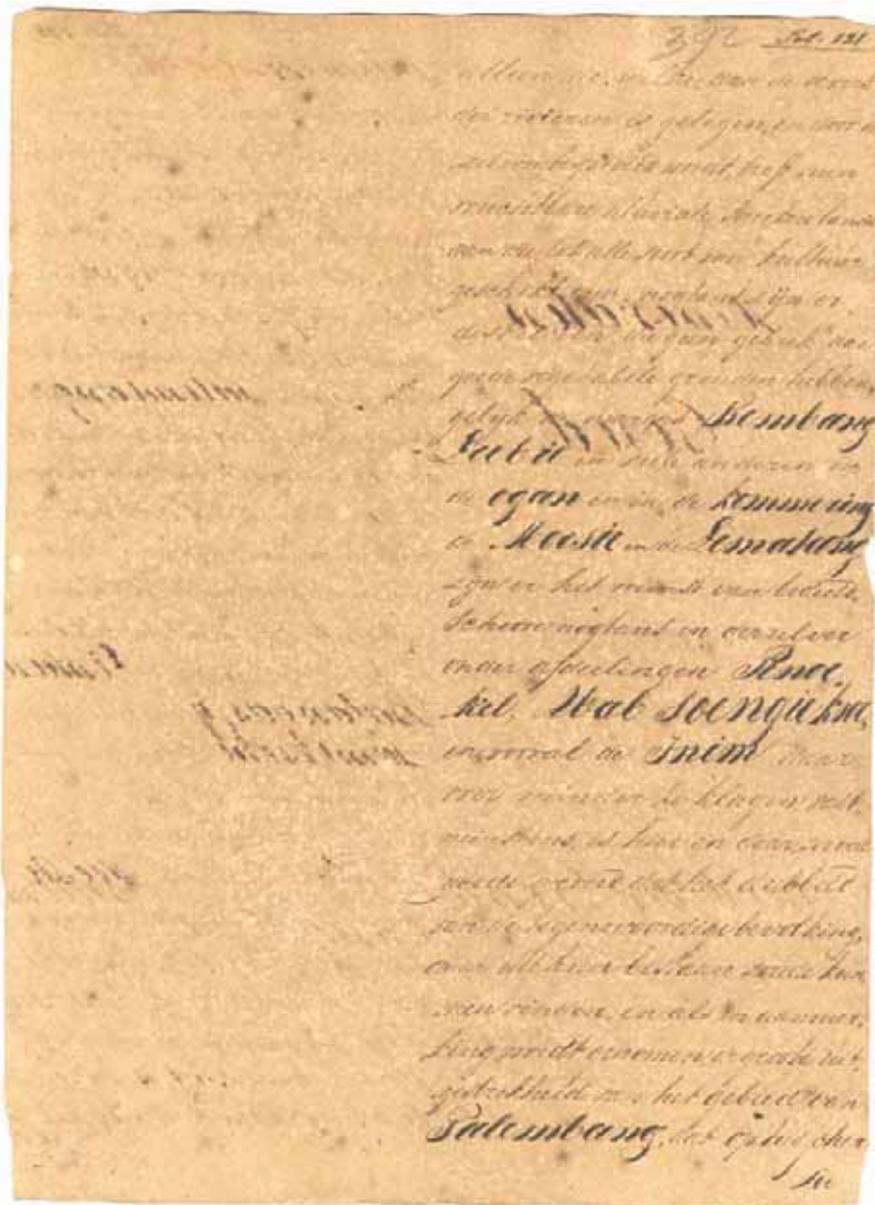


Kota Palembang sebagai ibu kota karesidenan tetapi di sisi lain merupakan ibu kota dari perdagangan untuk seluruh wilayah karesidenan. Sebagai ibu kota dagang, Kota Palembang memiliki letak strategis terhubung secara luas dengan daerah-daerah sekelilingnya. Kota Palembang menjadi sentra dan penyaji utama dalam perhubungan baik lewat jalan air maupun jalan darat. Palembang sebagai kota dagang dan industri, di mana kilang-kilang minyak dan penggilingan karet di kota membutuhkan pegawai dan karyawan, menyebabkan imigrasi berjalan pesat. Masyarakat Palembang mencari nafkah bersumber pada 3 (tiga) sektor, yaitu pertanian, perkebunan, kehutanan dan perdagangan. Pertambangan memegang peranan penting di Palembang, yaitu minyak bumi dan batu bara.

Para pedagang besar yang mendominasi sektor perekonomian padat modal dan bergerak dalam bentuk badan hukum firma atau perusahaan impor ekspor. Roda perekonomian rakyat sejak akhir tahun 1930-an, berada di puncak pertumbuhan ekonomi. Hasil pertanian seperti karet, kopi dan hasil tambnag (minyak bumi dan batu bara) mulai dikenal luas dan terbuka lebar untuk digarap masyarakat.



Surat Sultan Ratu Ahmad Nadjamudin dari Palembang kepada Komisaris Jenderal van der Capellen mengenai kesepakatan perdagangan, 7 April 1823 (13 Rajab 1238 H)
 Sumber: ANRI, Surat Emas No. 18 (Palembang 15)



Sumber daya mineral yang ditemukan di Palembang:

1. Emas di Sungai Liman Batangassij
2. Belerang di Bukit Kaba, Rejang
3. Timah di Banka
4. Batu Bara di Sungai Ogan
5. Kalium Nitrat di Bukit Kaba, Rejang
6. Garam di Lematang, Ogan, Kikim
7. Batu Kapur di Sungai Ogan

Sumber: ANRI, Palembang No 62-2 1854-1855



Kapal-kapal dagang tradisional di Sungai Musi,
Palembang, Sumatera Selatan [1930]

Sumber: ANRI: KIT 536/43



Tanaman Lamtoro dan kopi Robusta di Pasemah,
Palembang, Sumatera Selatan, [1930]
Sumber: ANRI, KIT 609/4



Kampung eksplorasi minyak di Plaju, Palembang, Sumatera Selatan, [1930]

Sumber: ANRI, KIT 471/20





Pangkalan bambu-bambu di kanal
Sungai Musi, Palembang, 8 Maret 1948
Sumber: ANRI, NIGIS RVD NO 80308 DD 18



Pekerja pabrik karet sedang mencuci lembaran karet dan dipres dengan mesin remilling di Palembang, 20 April 1948

Sumber: ANRI, Kempen 80420 DD 1



Buruh karet sedang mengangkat tumpukan karet untuk dinaikkan dalam kapal di Palembang, 20 April 1948

Sumber: ANRI, Kempen 80420 DD 3





Kegiatan pekerjasedang memindahkan bongkahan karet ke perahu di Palembang, 21 April 1948

Sumber: ANRI, Kempen 80421 DD 16





Suasana kegiatan di pelabuhan tempat penyimpanan sementara batubara, tampak kapal, alat krant, gerbong-gerbong kereta batubara, 7 Mei 1948
Sumber: ANRI, Kempen K 80507 DD 14



Rangkaian lori dan gerbong kereta berisi tambang batu bara Bukit Asam di Kertapati, 17 Juli 1948

Sumber: ANRI, Kempen K 80717 DD 9



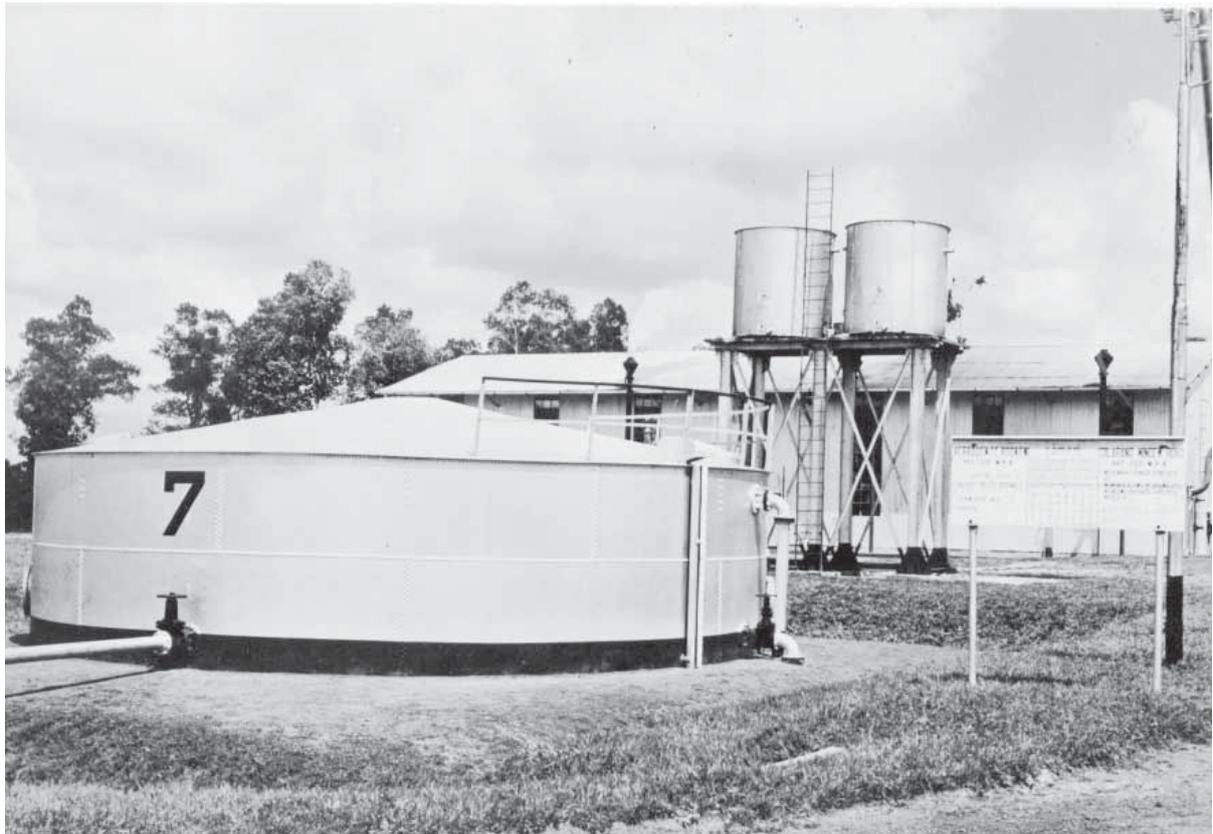
Pangkalan-pangkalan perahu dagang "kampong" di Sungai Musi, yang juga dijadikan sebagai tempat tinggal, Palembang, 18 Desember 1948

Sumber: ANRI, NIGIS RVD NO 81218 DD 4

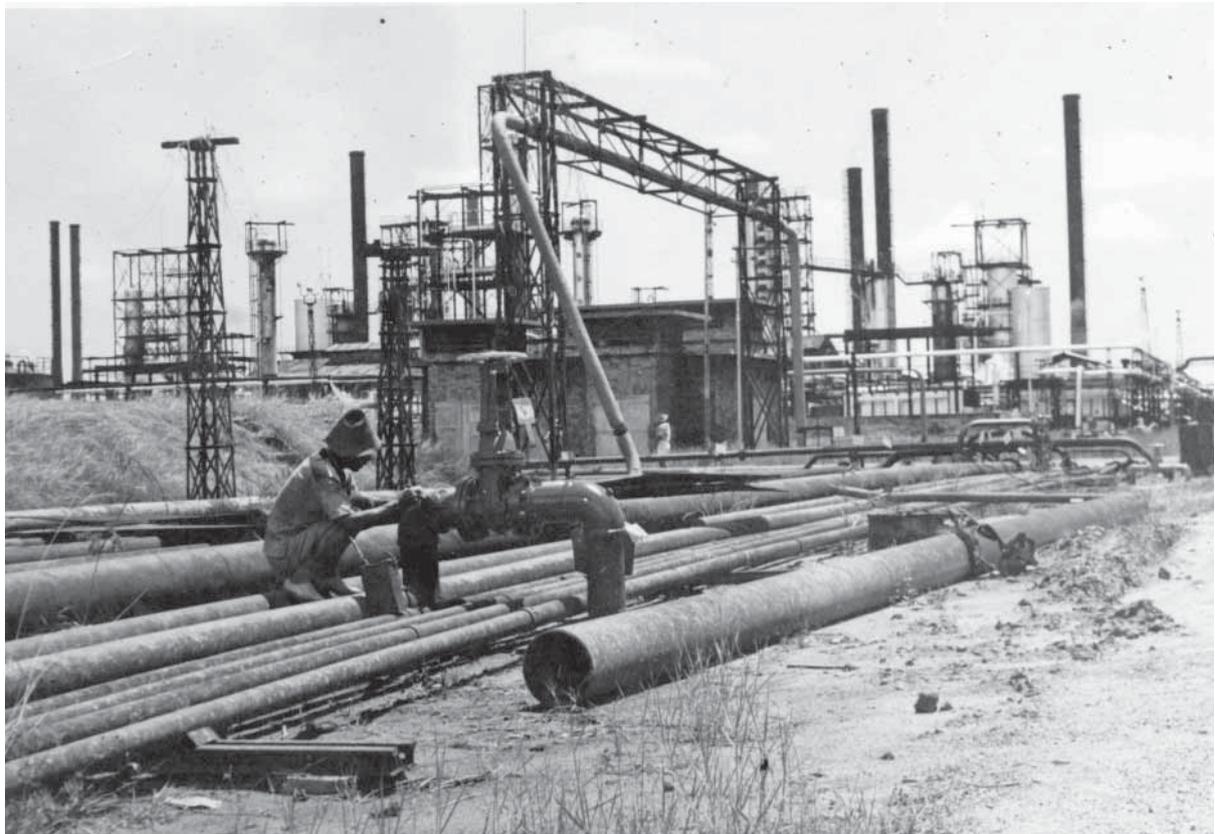
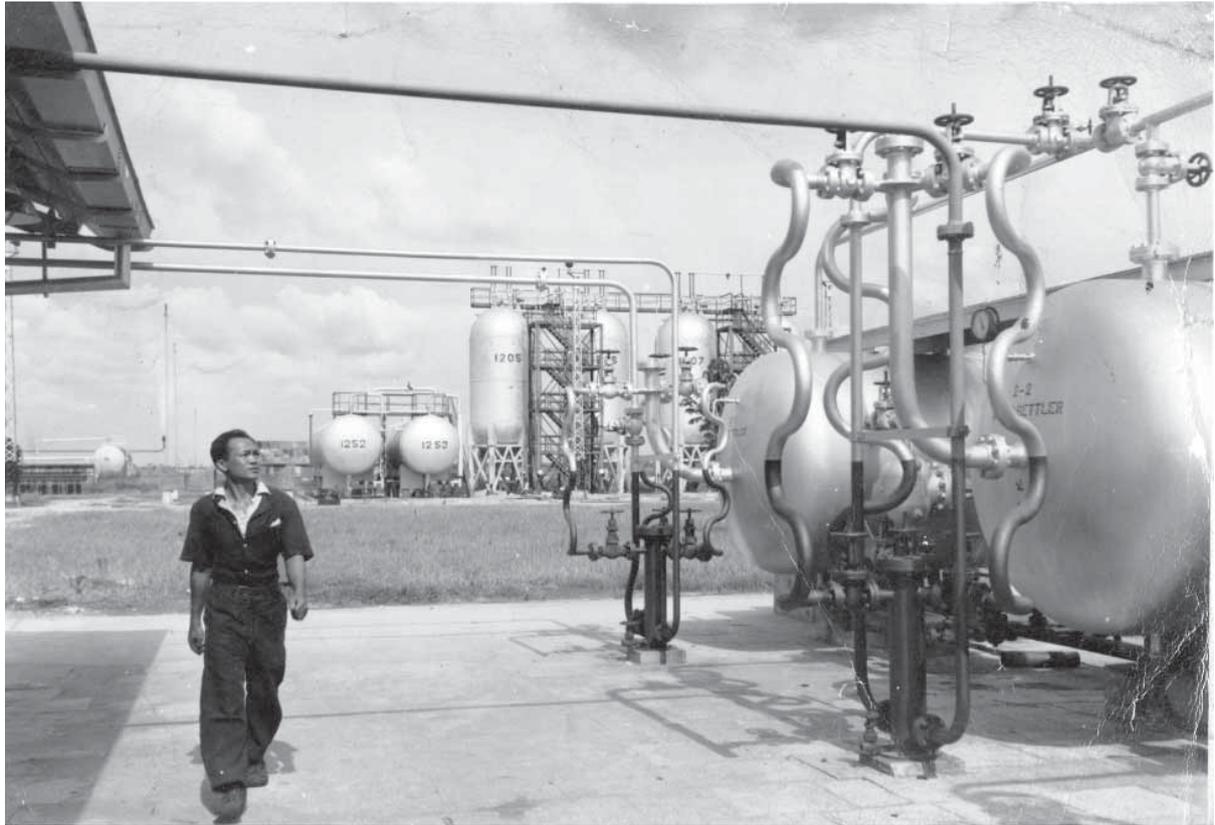


Pedagang makanan di perahu-perahu dagang
di Palembang, 3 September 1949

Sumber: ANRI, NIGIS RVD NO 90903 DD 15



Area kilang minyak di Plaju, Palembang 26 September 1949
Sumber: ANRI, NIGIS RVD B2022, NIGIS RVD B1692



Instalasi kilang minyak BPM Plaju, Palembang 26 September 1949

Sumber: ANRI, NIGIS RVD 90926 DD 5, NIGIS RVD K80217 DD 33



Warung-warung diatas Sungai Musi, Palembang, menyediakan berbagai kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari, 31 Agustus 1950

Sumber: ANRI, Kempen 50620



Warung-warung di tepi Sungai Musi, Palembang 19 April 1951

Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 0249



Pembutan sagu aren di Selat Panjang,
Sumatera Selatan, 28 Juli 1951
Sumber: ANRI, Kempen 516628



Bupati Lahat meninjau pameran "Indonesia Maju", di Palembang, Sumatera Selatan, 1951

Sumber: ANRI, Kempen 515296



Gubernur Sumatera Selatan Dr. Mohammad Isa meninjau pameran "Indonesia Maju", di Palembang, Sumatera Selatan, 1951

Sumber: ANRI, Kempen 515585



Wakil Presiden Mohammad Hatta melihat-lihat hasil kerajinan rakyat di Palembang, Sumatera Selatan, 26 Juni 1957

Sumber: ANRI, Kempen 570626 DD 3



Pembangunan oleh Zeni PIONIR A.D. untuk pembangunan pabrik pupuk "Sriwidjaja" oleh kesatuan tersebut, Palembang, 21 Juli 1960
Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 0181



WEDJANGAN PJM PRESIDEN PADA PERESMIAN PEMANTJANGAN DASAR
PABRIK PUPUK DI PALEMBANG SUMATERA SELATAN PADA TG. 4 NOPEMBER 1960.

Saudara-Saudara sekalian,

Tidak salah saja memerintahkan kepada Menteri Chaerul Saleh untuk memberi penerangan dan keterangan setjukupaja mengenai pabrik Pupuk ini. Sekarang keadaan sudah mendjadi lebih terang dan djelas, baik kepada kita semuanya, maupun kepada pihak Amerika jang responsible pula mengenai execution daripada pabrik Pupuk ini.

Saudara-Saudara, sekarang saja diminta mengadakan sedikit wedjangan, demikian kata seorang announcer tadi.

Di djaman Belanda Saudara-Saudara, ada satu trilogi pembangunan. Pada waktu imperialisme Belanda mau berusaha berkembang biak, terutama sekali dibidang ekonomi di Indonesia, pada waktu itu diadakan oleh satu golongan jang berpengaruh satu trilogi: edukasi, irigasi, migrasi.

Edukasi: berilah pendidikan, peladjaran, sekolah-sekolah lebih banyak kepada bangsa Indonesia.

Dua: irigasi, adakanlah pengairan sebanjak mungkin.

Ketiga: imigrasi, pindahkanlah sebagian daripada rakjat di pulau Djawa itu ke pulau lain.

Pernah saja djelaskan bahwa timbulnja haluan baru didalam politik kolonial Belanda, "de nieuwe richting in de koloniale politiek" jang ingeluid oleh Mr. C. Th. van Deventer, pada pokok dan hakekatnja ialah satu pemenuhan daripada kebutuhan-kebutuhan imperialisme, terutama sekali imperialisme ekonomi daripada pihak Belanda. Sembojan ini memang muluk Saudara-Saudara, dan starting point daripada sembojan-sembojan ini ialah kemiskinan jang ternjata mendjalar di tanah Djawa, terutama sekali di Djawa Tengah bagian Utara, jang tiap-tiap tahun Djawa Tengah bagian Utara tetapi djuga Djawa Timur diserang oleh bahaja kelaparan, sehingga perlu diselidiki.

Apa sebabnja ini tiap-tiap tahun bahaja kelaparan mengamuk, ratusan, ribuan, bahkan pernah setengah djuta manusia mati didalam satu bahaja kelaparan, satu famine di Djawa Tengah? Diselidiki dan sudah diselidiki dikasihkan remedi, dikasihkan obat. Obatnja ialah ini, trilogi Mr. van Deventer jang berkata kepada pihak Belanda bahwa djikalau pihak Belanda memang ingin membajar hutang budi kepada bangsa Indonesia -- dinamakan olehnja hutang budi oleh karena Mr. van Deventer berpendapat bahwa pihak Belanda berhutang budi kepada bangsa Indonesia, pihak Belanda jang mengambil kekajaan daripada Indonesia tiap-tiap tahun sekian, sekian, sekian, sekian, sekarang sudah

Bagian awal Pidato Presiden Sukarno pada peresmian pemancangan dasar Pabrik Pupuk di Palembang, Sumatera Selatan, 4 November 1960

Sumber: ANRI, Pidato Presiden 237



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 48 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah tentang mengadakan pajak pendaftaran perusahaan dalam Daerah Kotapradja Palembang, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 13 Agustus 1959;
- b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 9 Djanuari 1961 No. Des.9/2/43 yang mengusulkan agar supaya peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No.11 tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan-Daerah tentang mengadakan pajak pendaftaran perusahaan dalam Daerah Kotapradja Palembang", yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 13 Agustus 1959.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Sumatera Selatan di Palembang (2x),
5. Walikota Kepala Daerah Palembang di Palembang (2x).

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 31 Djanuari 1961.

1/3
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno

SUKARNO.

Keputusan Presiden RI Nomor 48 Tahun 1961 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Pajak Pendaftaran Perusahaan dalam Daerah Kotapraja Palembang yang ditetapkan oleh DPRD dalam sidangnya tanggal 13 Agustus 1959, ditetapkan di Jakarta, 31 Januari 1961

Sumber: ANRI, Sekretaris Kabinet Keppres Tahun 1961



Pelabuhan Pusri, Pabrik Pupuk Sriwidjaja "Pusri"
di Palembang, Oktober 1963
Sumber: ANRI, ID-ANRI_F-12_1021





Kunjungan Delegasi Parlemen Jepang di Indonesia ke kilang minyak Stanvac di Sungai Gerong, Palembang 9 Mei 1965

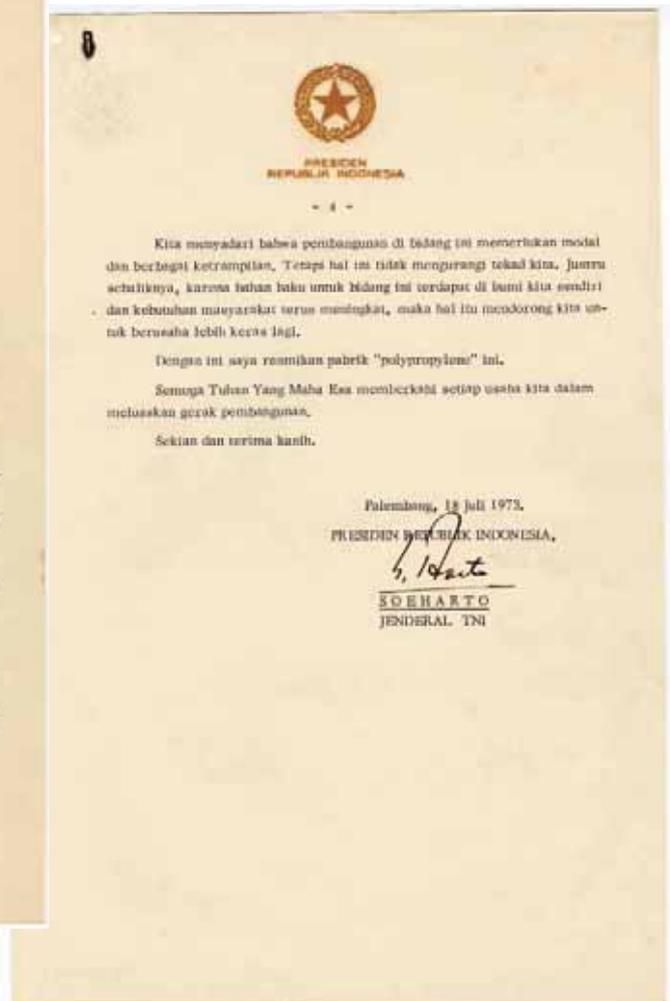
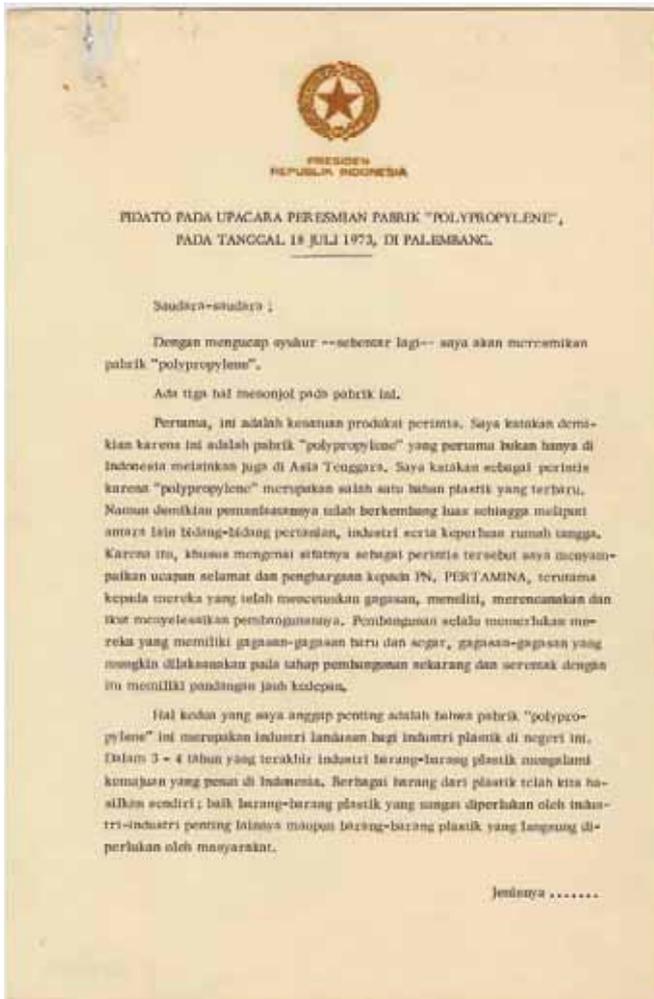
Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 1338, ID-ANRI F-12 1336



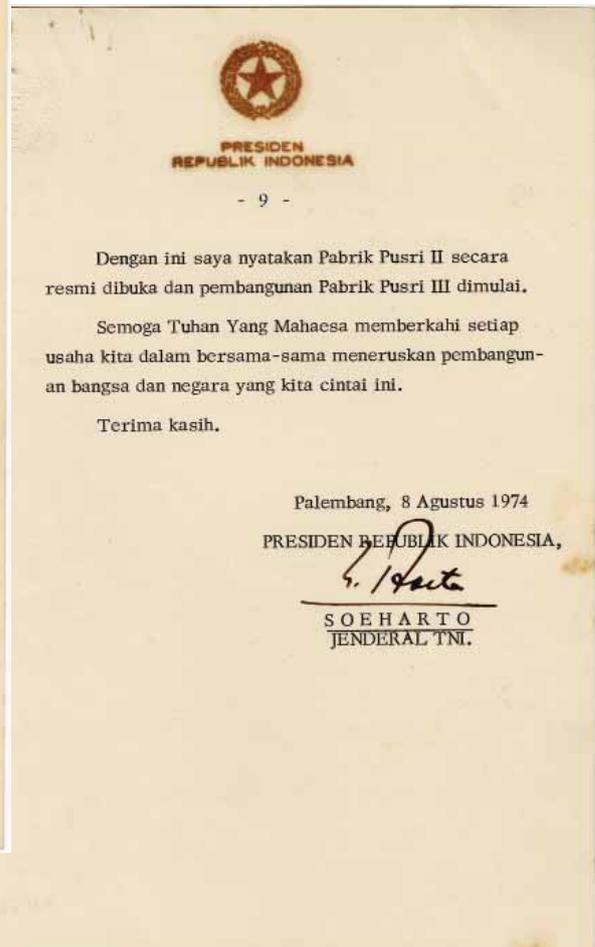
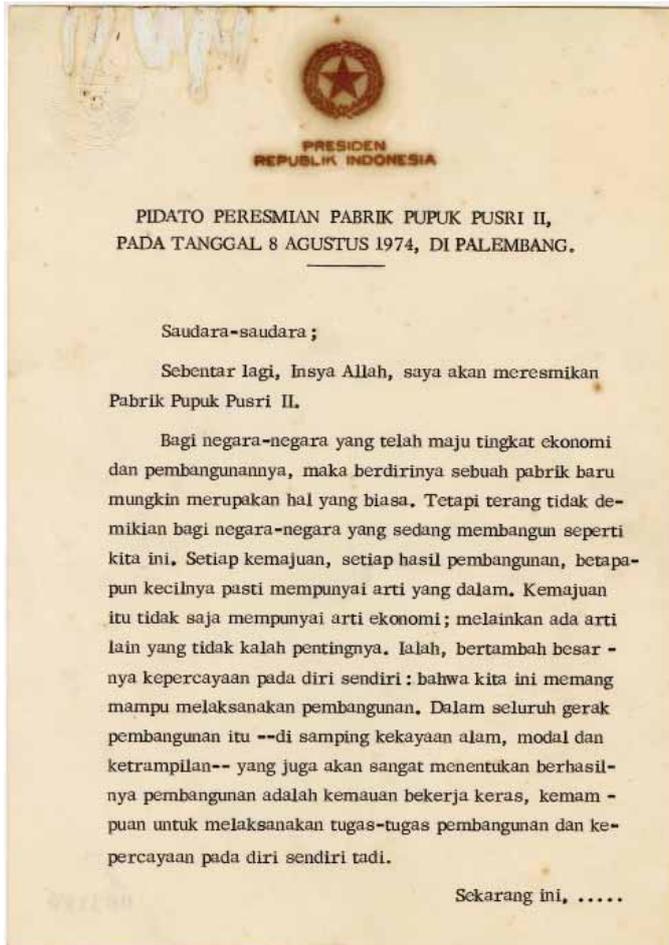


Kunjungan Delegasi Parlemen Jepang di Indonesia, 5-14 Mei 1965. Ketua Tokuma Utsunomya di tambang batubara, Kertapati, Palembang, 9 Mei 1965

Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 1365, ID-ANRI F-12 1364

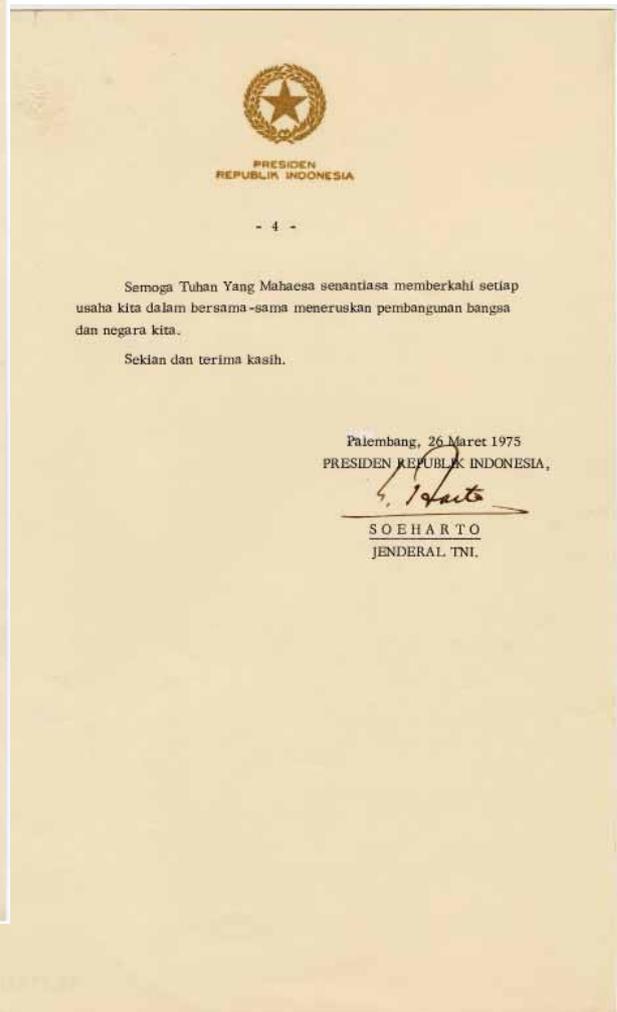
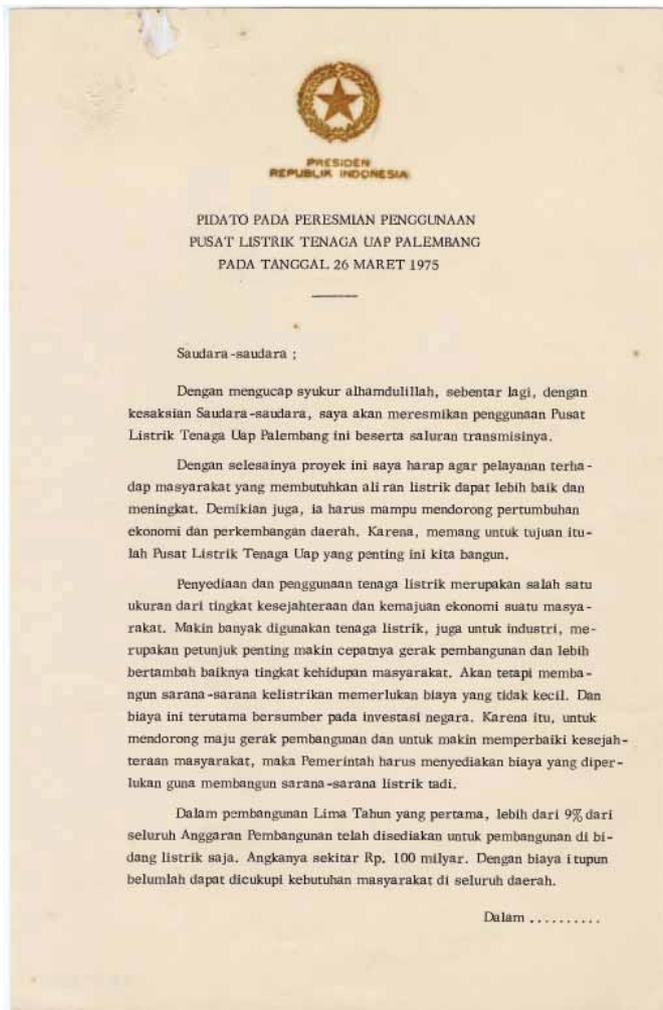


Pidato Presiden Soeharto pada Upacara Peresmian Pabrik "Polypropylene di Palembang, 18 juli 1973
Sumber: ANRI, Pidato Presiden Soeharto No. 776



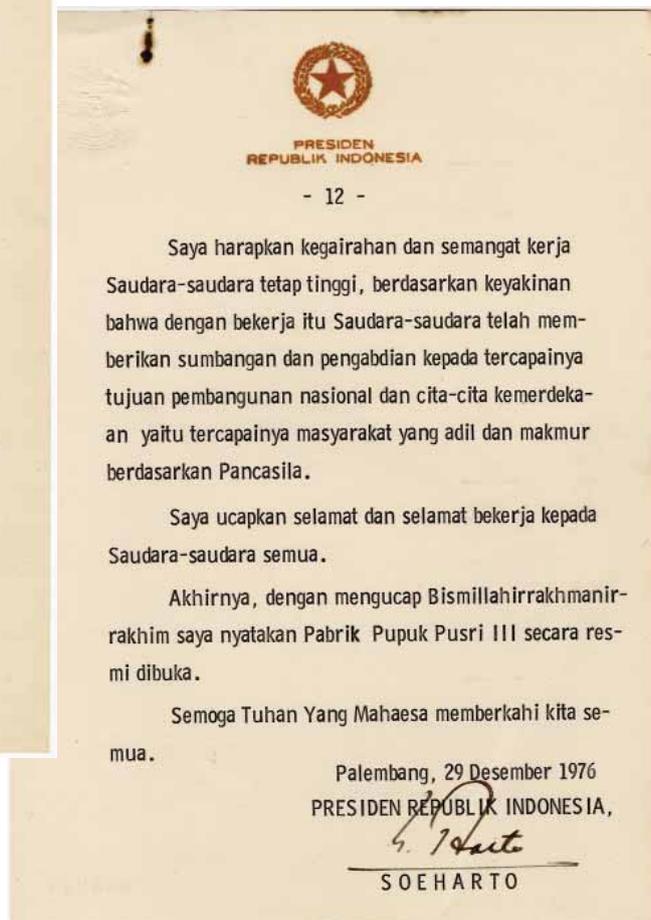
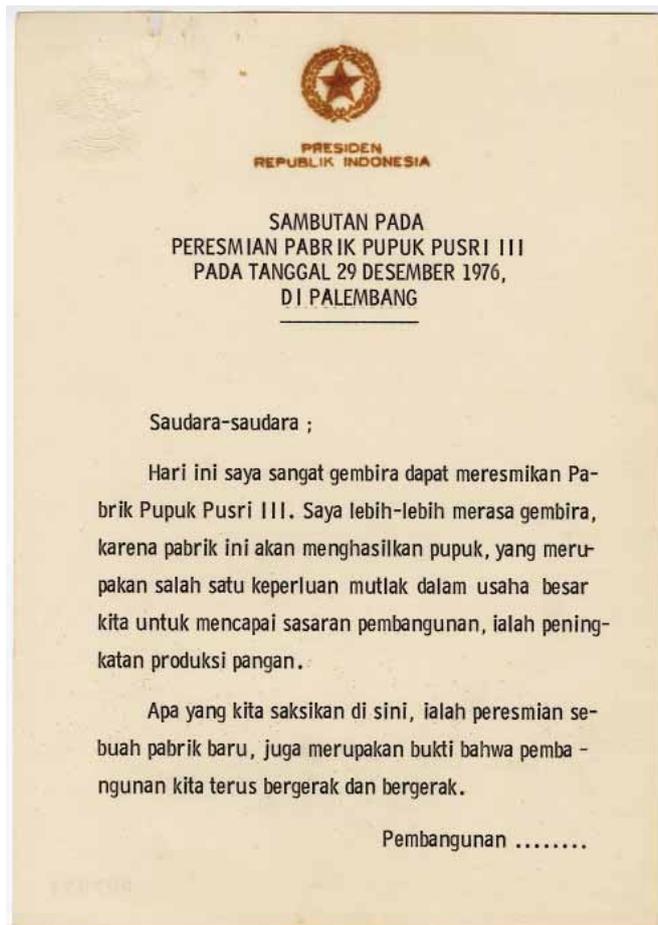
Pidato Presiden Soeharto pada peresmian Pabrik Pupuk Pusri II di Palembang, 8 Agustus 1974

Sumber: ANRI, Pidato Presiden Soeharto No. 772.2



Pidato Presiden Soeharto pada Peresmian penggunaan Pusat Listrik Tenaga Uap Palembang, 26 Maret 1975

Sumber: ANRI, Pidato Presiden Soeharto No. 912.3



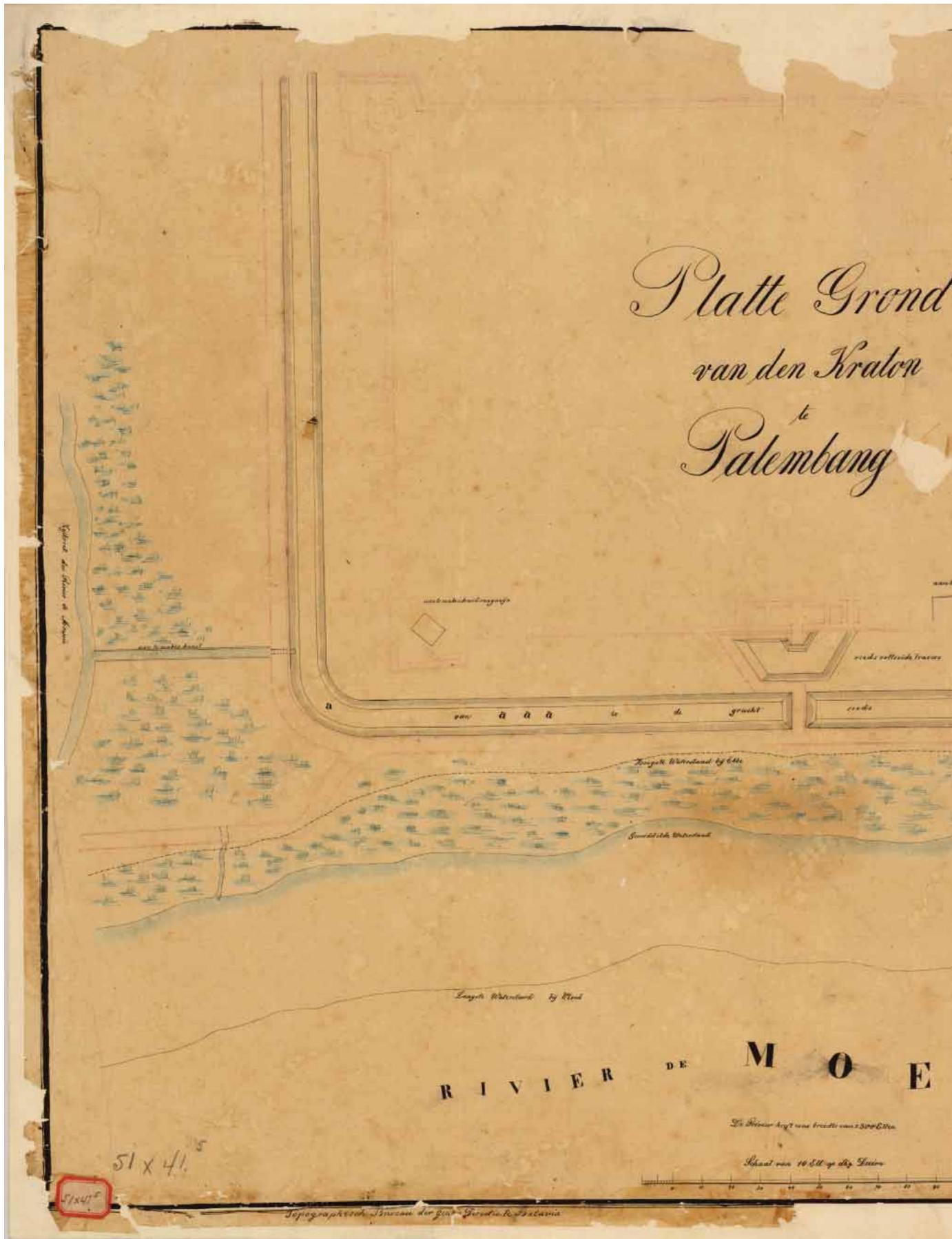
Pidato Presiden Soeharto pada Peresmian Pabrik Pupuk Pusri III di Palembang, 29 Desember 1976

Sumber: ANRI, Pidato Presiden Soeharto No. 772.3

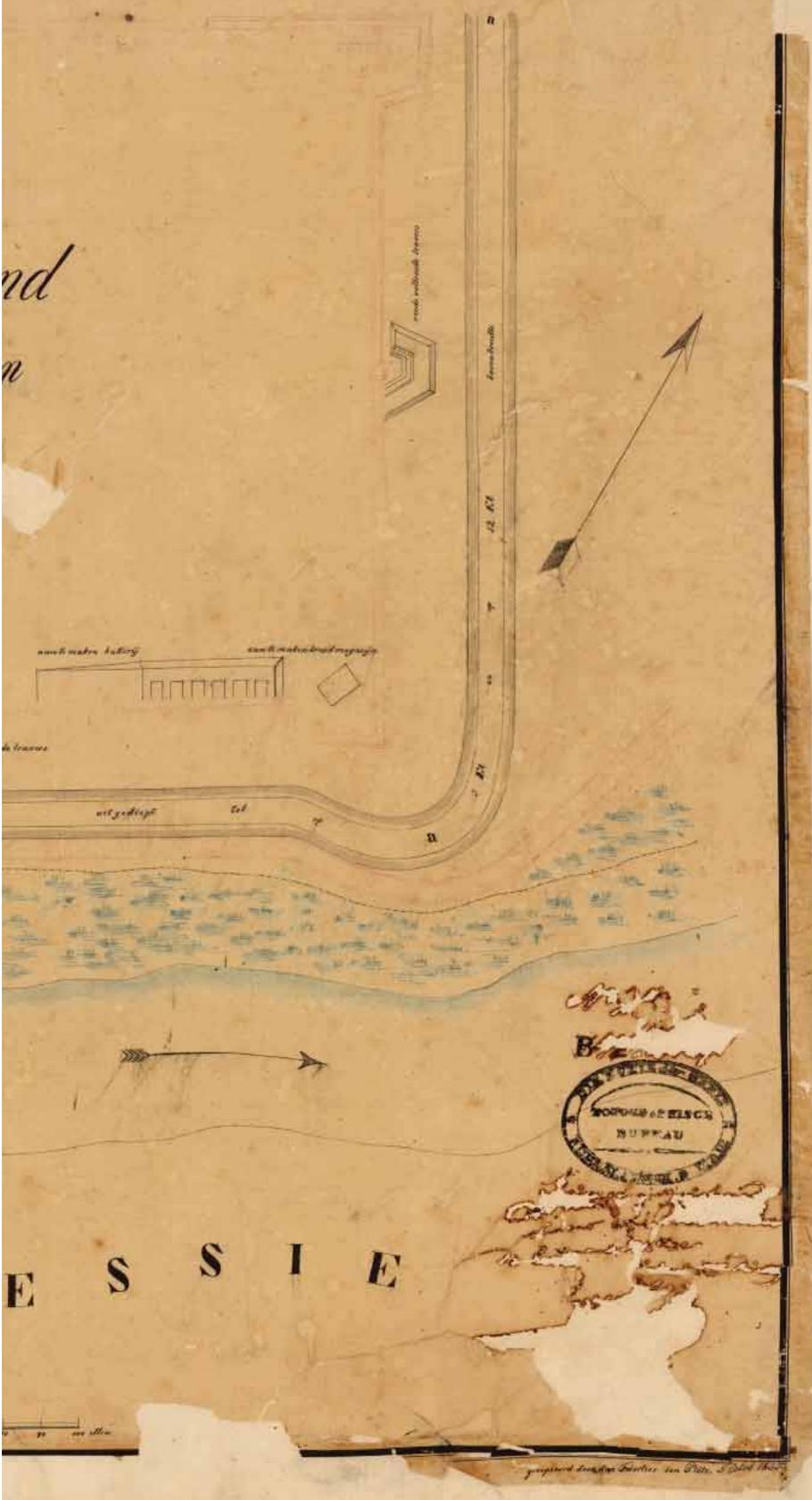
Infrastruktur



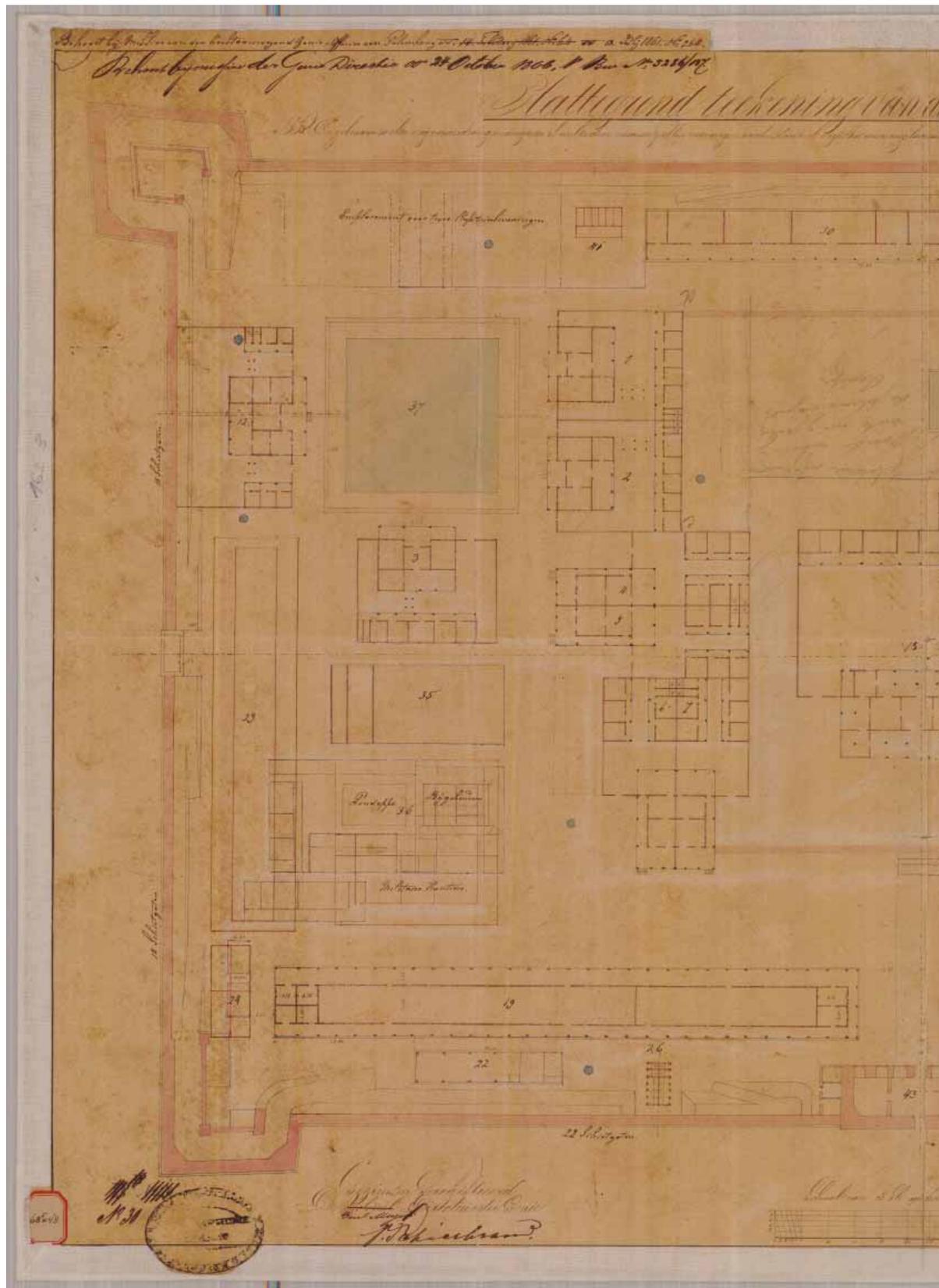
Pada masa kesultanan, orang asing yang dikategorikan “non pribumi” Tionghoa, Arab dan Eropa serta Melayu Lainnya diberlakukan oleh Sultan untuk tidak bertempat tinggal di ruang daratan. Hal ini, mengakibatkan pembentukan sistem rumah mengapung yang dikenal oleh penduduk lokal sebagai rumah rakit. Rumah rakit selain sebagai tempat tinggal juga merupakan area tempat toko berdagang, gudang bahkan pusat kerajinan. Untuk menciptakan infrastruktur kota, Belanda membangun daratan dengan membangun jalan pada daerah aliran sungai yang banyak terdapat di kota. Pemerintah Kolonial Belanda secara perlahan mengubah Palembang dari kota air menjadi kota daratan. *Gemeente* Palembang membuat kebijakan pembangunan dan pengaspalan jalan dengan cara menimbun sungai dengan menggunakan puru dan kerikil. Sungai Tengkuruk menjadi anak sungai pertama yang ditimbun untuk dijadikan *boulevard* kota pada tahun 1929 sampai 1930. Sampai masa republik penghilangan makna kota sebagai kota sungai terus berlanjut. Jembatan Ampera yang dibangun pada tahun 1960-an, dipandang sebagai *master piece* di Palembang.



HB/5154

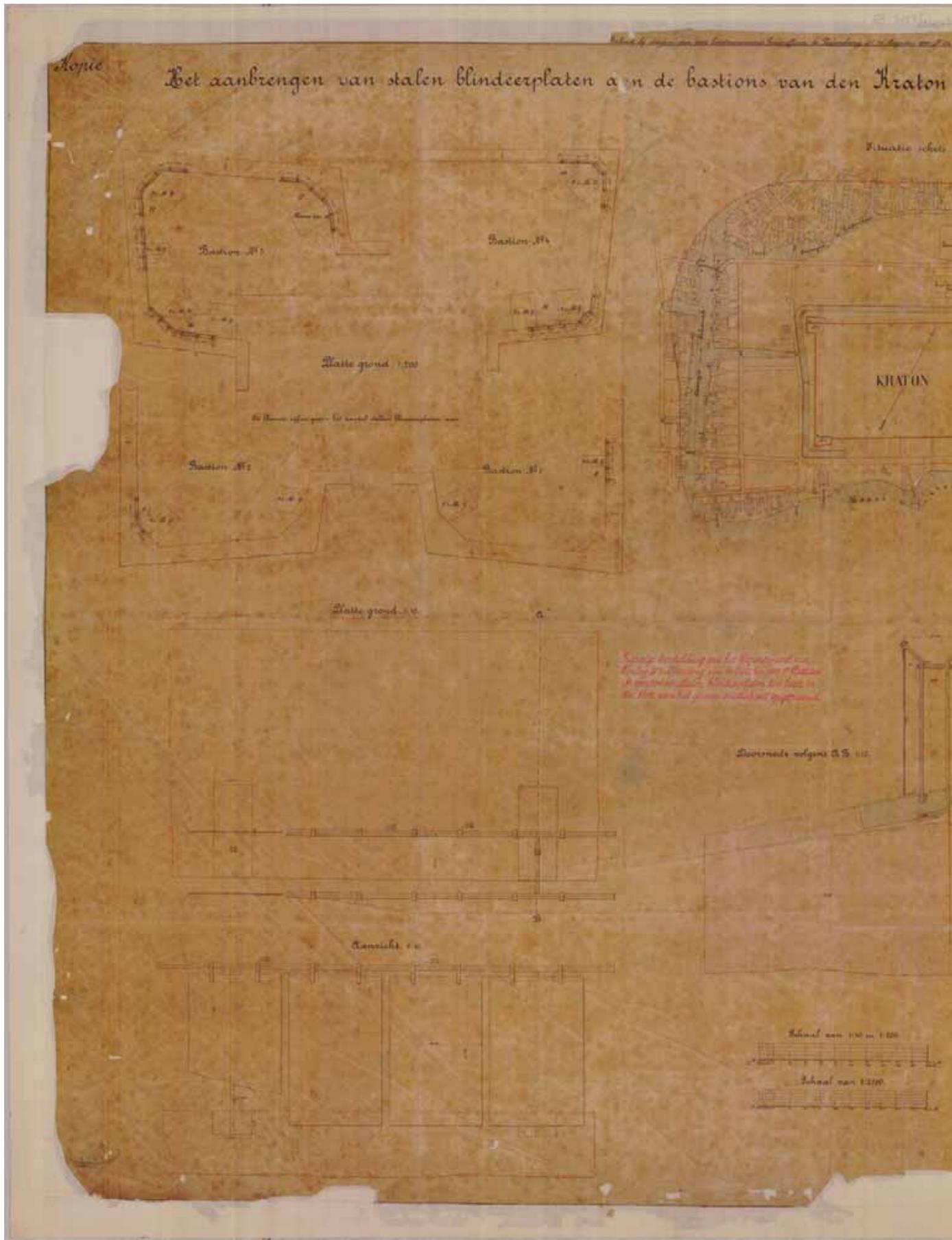


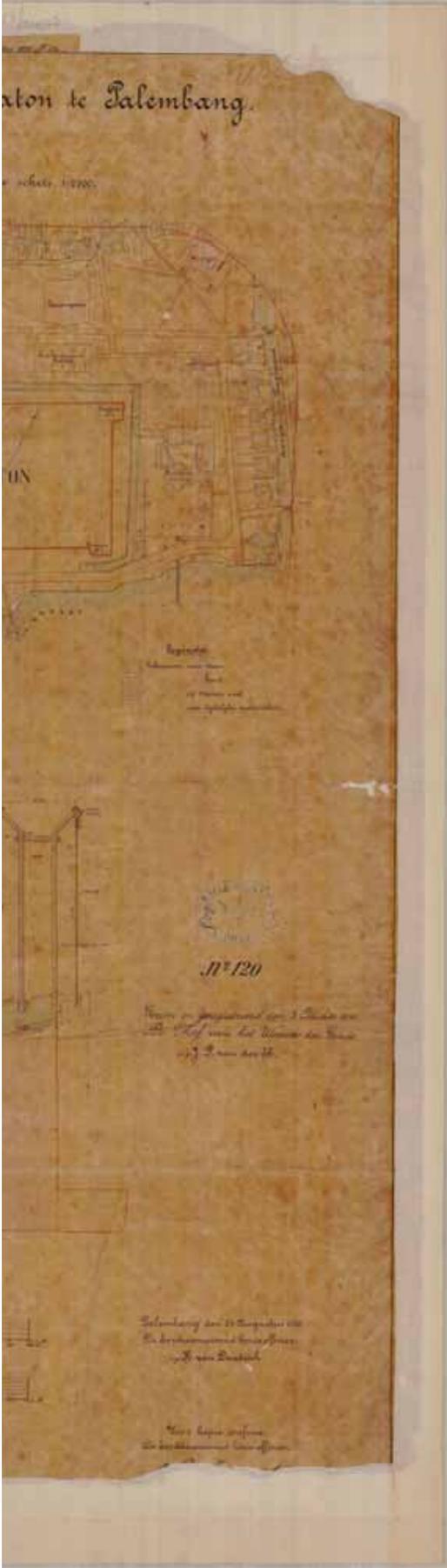
Gambar denah situasi Kraton di Palembang, 1855
Sumber: ANRI, Van Oorlog HB. 5154



Gambar denah sebuah kraton di Palembang, 20 Oktober 1860

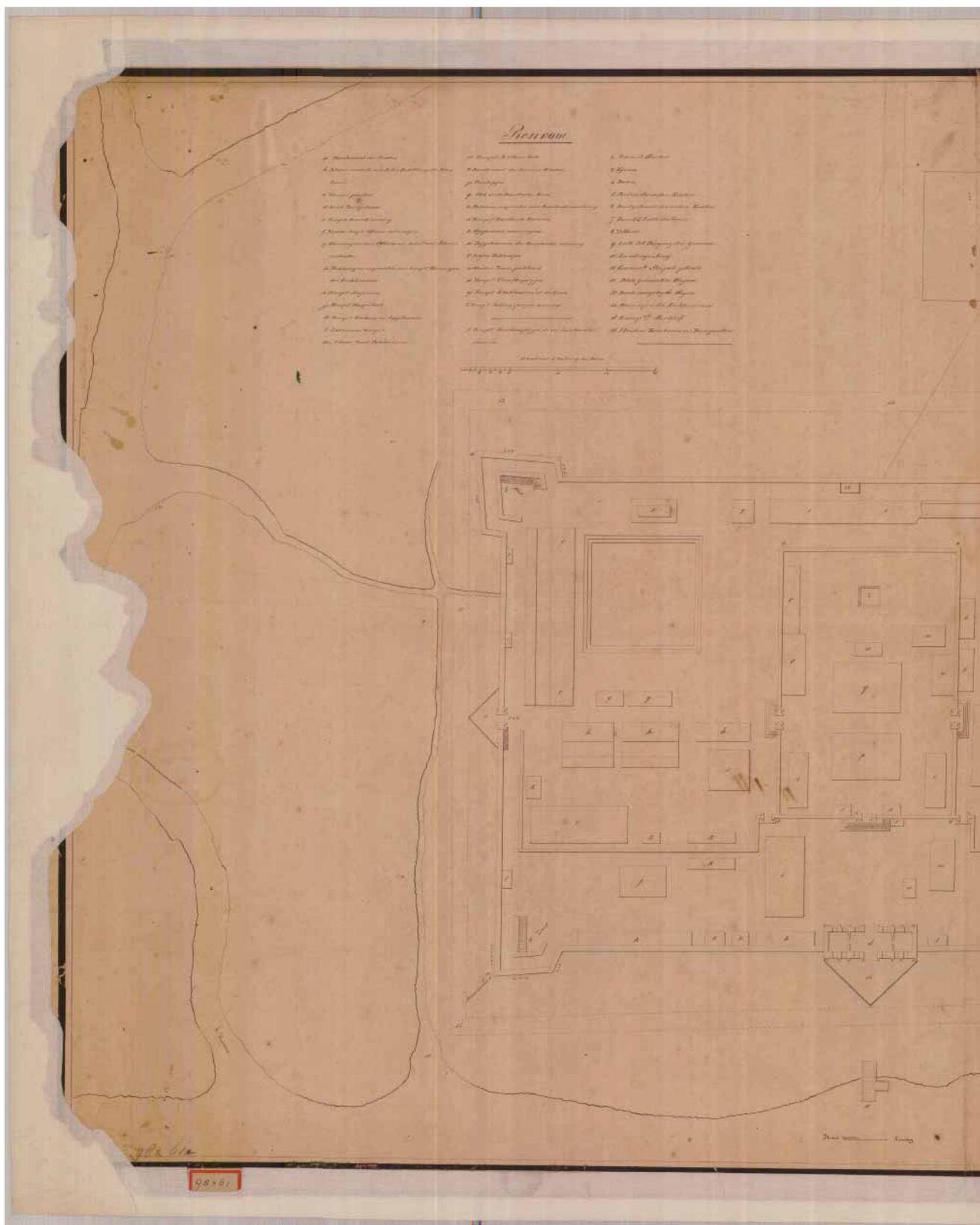
Sumber: ANRI, Van Oorlog HB.3661





Gambar konstruksi tentang pemasangan plat baja pada dinding bastion di sebuah keraton di Palembang (5 gambar: platteground situatie, doorsnede, aanzicht), 3 Oktober 1890

Sumber: ANRI, Van Oorlog HB. 3483



Gambar denah sebuah keraton di Palembang (gambar 1), 27 Juli 1893

Sumber: ANRI, Van Oorlog HB. 3704

HB 3704 / 110-4

Amoygandh
Sindang

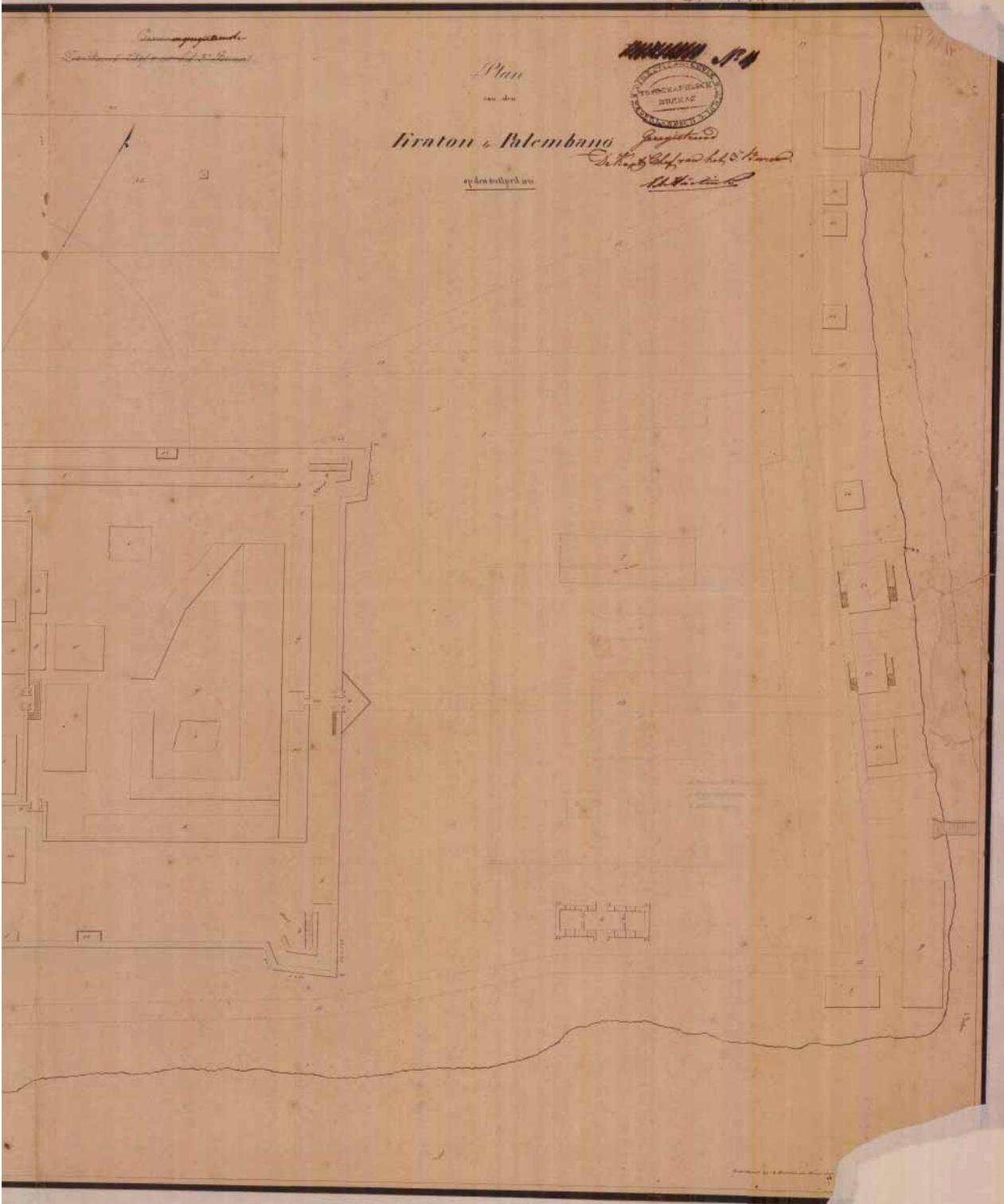
Plan
1840



Siraton & Palembang

Gezeichnet
von H. G. J. van der
Wijk

op de kaart van



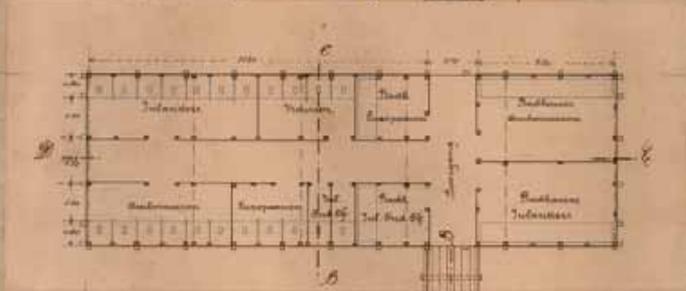
3875

3875 / No. 137

Kopie.

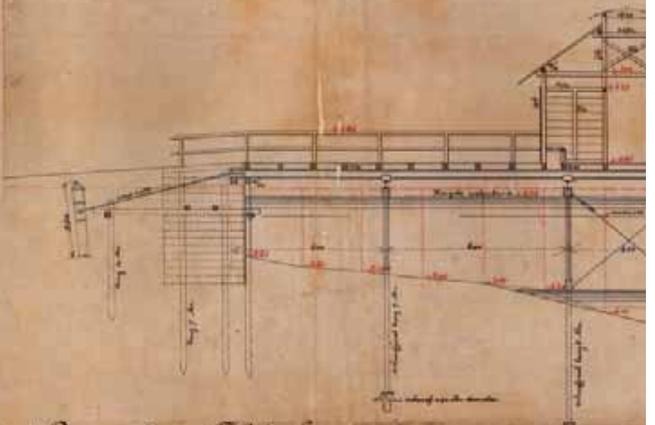
Ontwerp van een troepenprivaat met toegangsbuig op ijze Woesi-rivier te Palembang

Fig. 1. Platte grond. 1:100.



Regg's 2114

Fig. 2. Doorsnede over C



De Gouverneur van Palembang
vrij Willem Blinnik
Mij. Koloniaal
De Gouverneur van Palembang
vrij Willem Blinnik

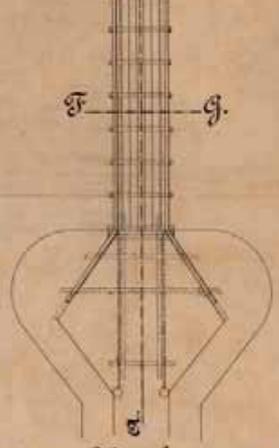


Fig. 4. Doorsnede over F.G. in fig. 1. 1:50.

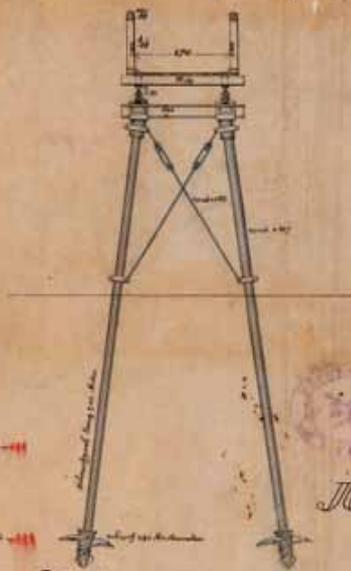
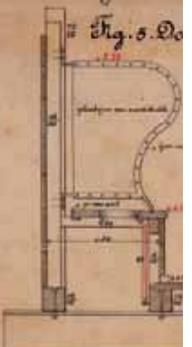
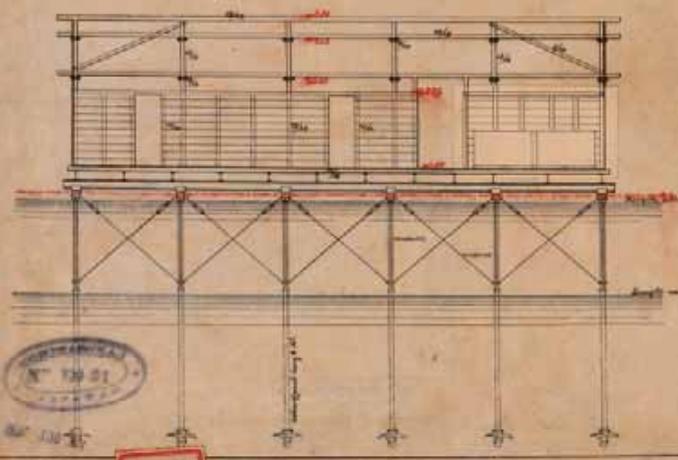


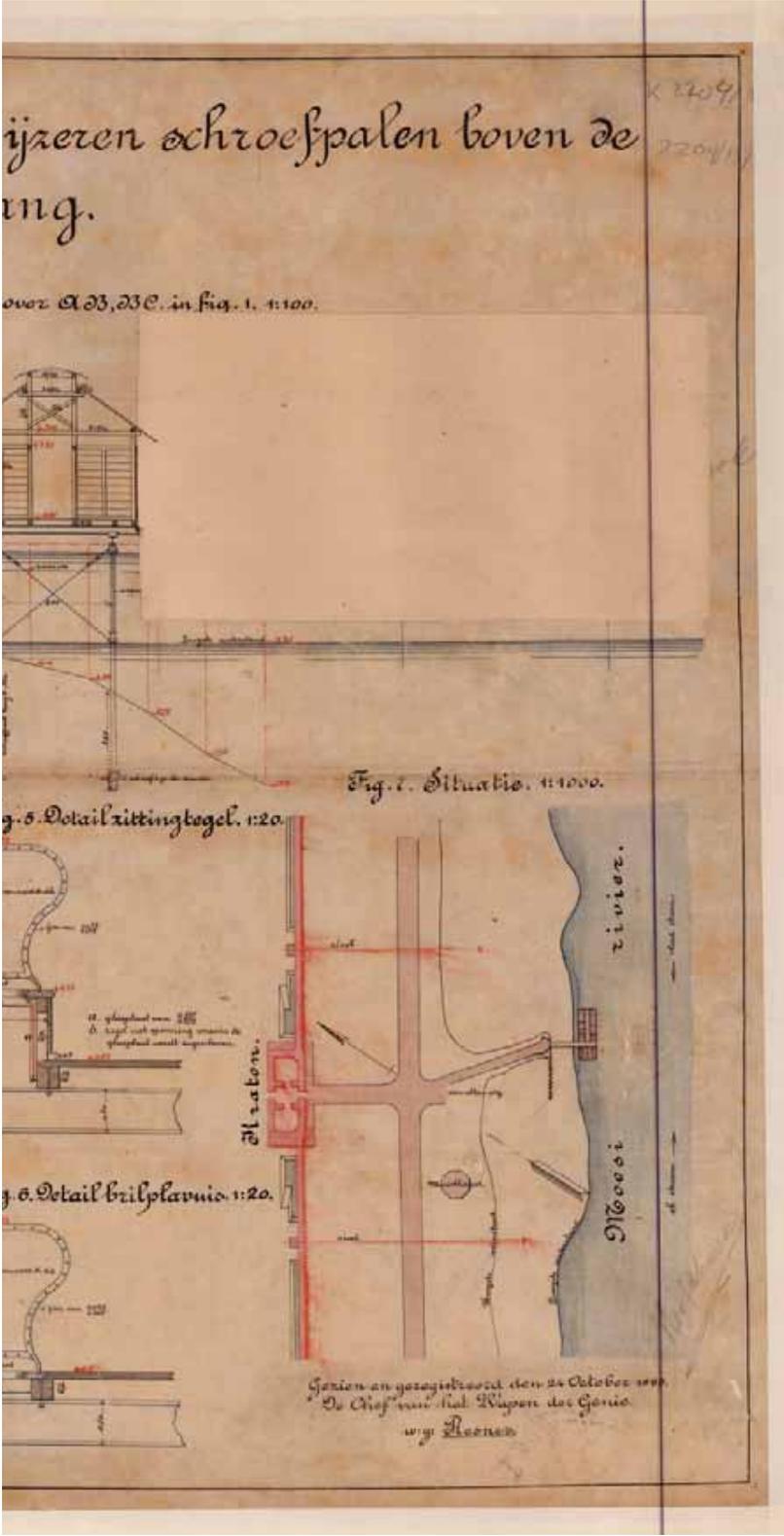
Fig. 5. Doorsnede over D.E. in fig. 1. 1:100.



N^o 137

Palembang, den 27^{en} Augustus 1895.
De Bevoegdverordene Officier,
w. J. J. H. Nieuwkoop
Gaujzigd bij het Hoofdbureau der Genie.





Arrekening der gebouwen.	40/12/1895 Bijlage van de definitieve en laatste van oprichting en betreffende de ingrijpen	Bijlage der verscheidene gedeelten door de Rijk aangewezen.
ten laste van privaat gebouw	41. Kol. depts. del. 22. Sept. 1895 en 2. H. del. 29. Dec. 1895 42. 27. 3. H. del. 19. Oct. 1895. 41/5.	Het privaat gebouwd werd overge- geven aan privaat gebouwd. Het kadaster is opgeleverd. Het land is over 1895. Stroom met het 2. H. del. privaat gebouw ingericht tot laste van privaat gebouwd.

Gambar rancang bangun WC pasukan disertai dengan jembatan akses pada tiang penyangga besi di atas sungai musi di Palembang (7 gambar : plattegrond, doorsnede, situatie, lengledoorsnede), 24 Oktober 1895
Sumber: ANRI, Van Oorlog HB. 3875



Jalan raya utama di Palembang, Sumatera Selatan, [1930]

Sumber: ANRI, KIT 760/27





Jalan Tengkuruk di Palembang, Sumatera Selatan, [1930]

Sumber: ANRI, KIT 761/66





Jalan dari Palembang menuju Pagar Alam,
Sumatera Selatan, [1930]

Sumber: ANRI, KIT 511/80



Kantor Sirah Kepala Kampong 9 Ilir di Palembang, 8 Maret 1948

Sumber: ANRI, NIGIS-RVD SUMSEL NO. 8038 DD 13



Rumah administratur di Plaju, 8 Maret 1948

Sumber: ANRI, NIGIS-RVD SUMSEL NO.80308 DD 8



Rumah kayu panggung di tepi Sungai Musi, Palembang, 20 April 1948

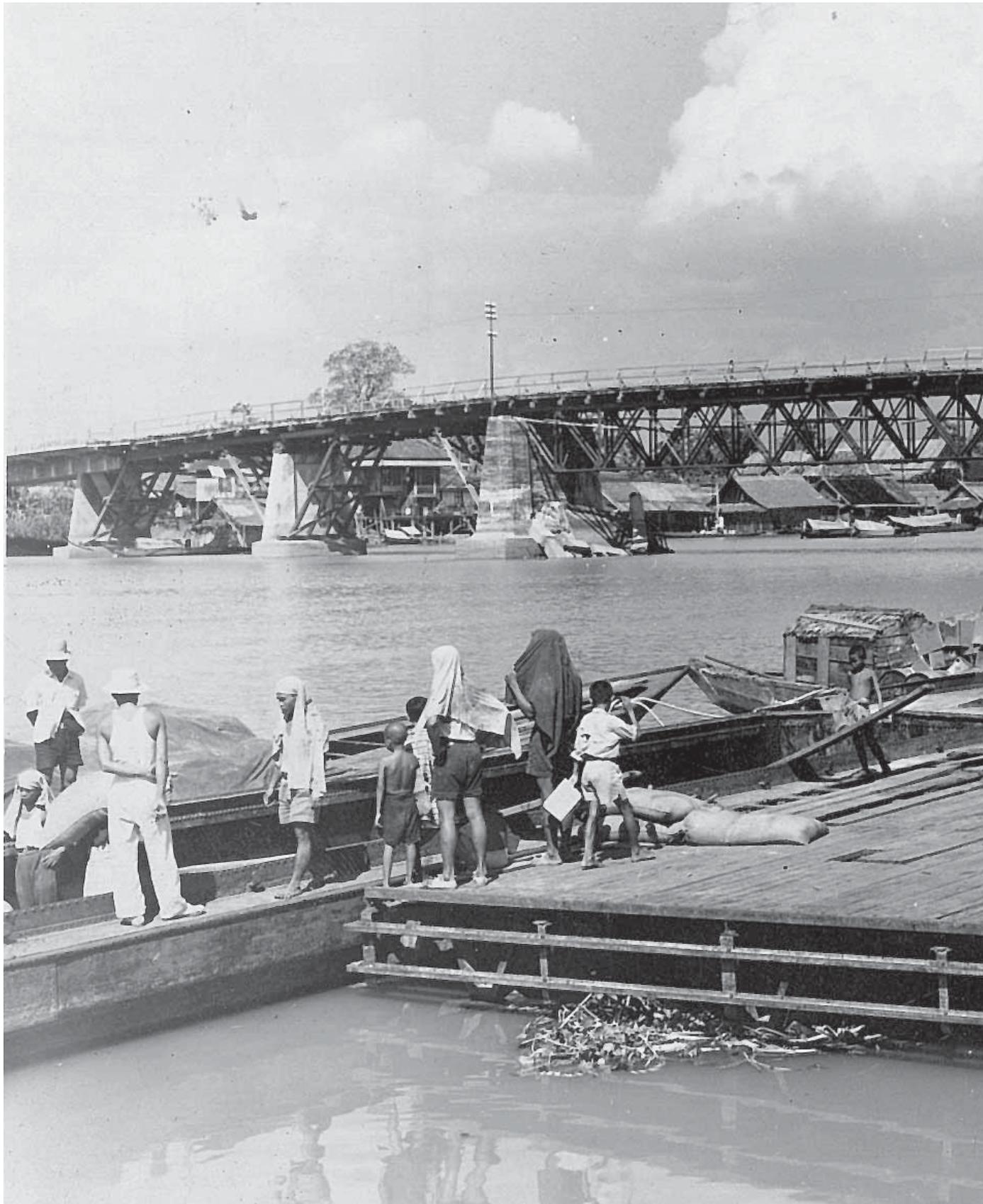
Sumber: ANRI, NIGIS-RVD SUMSEL NO. 80420 DD 13



Suasana jalan raya di Palembang dengan mobil-mobil yang terpakir yang datang dari perahu tambang, 7 Mei 1948

Sumber: ANRI, NIGIS-RVD SUMSEL NO. 80420 DD 13





Jembatan lengkung Julian di atas Sungai Ogan, Palembang, 14 Agustus 1948

Sumber: ANRI, NIGIS-RVD SUMSEL NO. 80814 DD 1-2





Kantor Gubernur Sumatera Selatan
di Palembang, 25 Agustus 1950
Sumber: ANRI, Kempen 50559





Dengan riang gembira anak-anak Indonesia dan penduduk setempat melewati jembatan yang baru dibuka setelah perbaikan oleh Genie Veldcompagnie di Ogan, 20 Desember 1948

Sumber: ANRI, NIGIS-RVD SUMSEL NO. FG 163





Kolonel Mollinger bersalaman dengan Letnan Benthem cdt.2e Genie Veld Comp. pada saat pembukaan jembatan setelah perbaikan di Ogan dekat Tanjung Raja, disaksikan para tamu undangan, 20 Desember 1948

Sumber: ANRI, NIGIS-RVD SUMSEL NO. FG 161





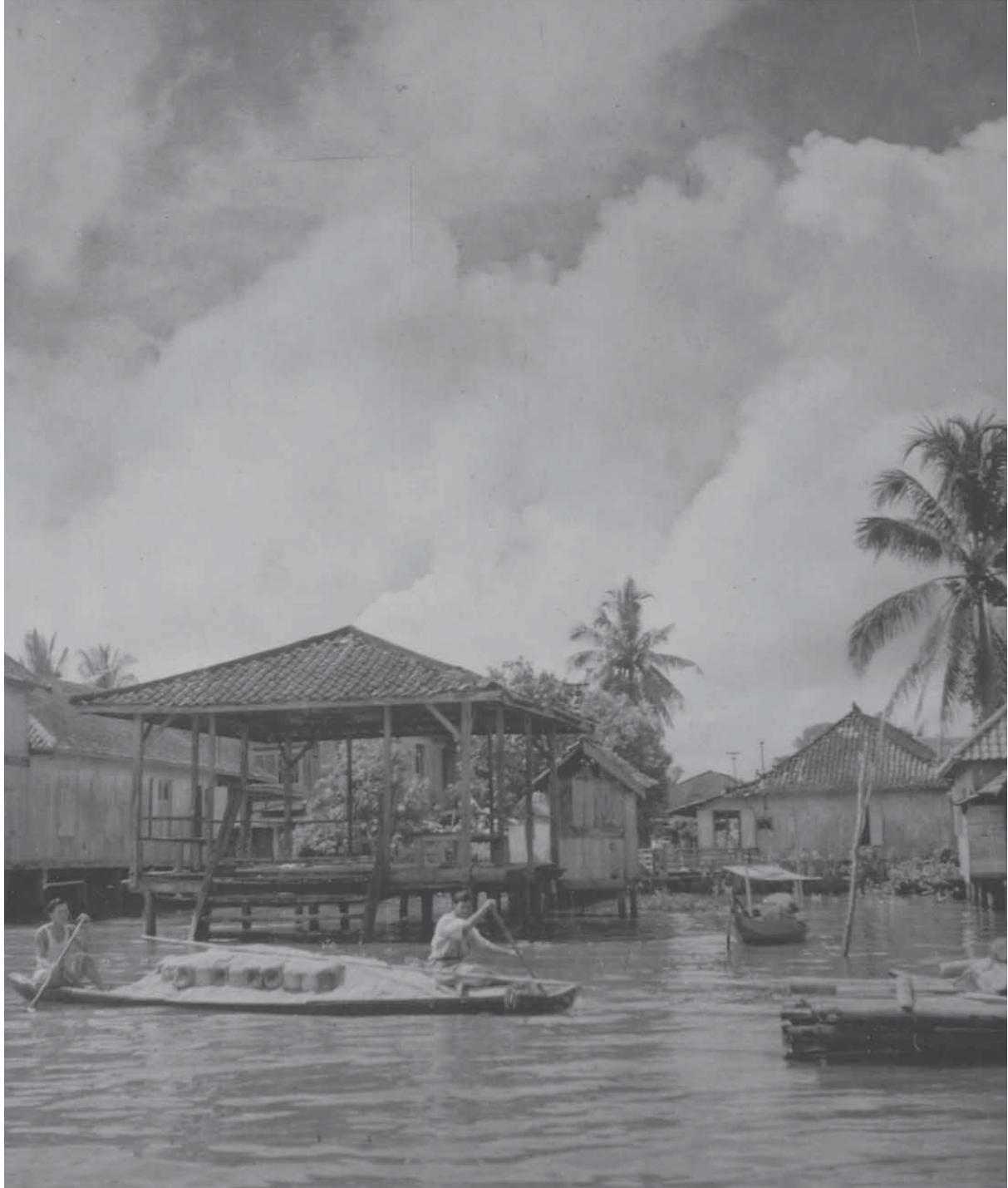
Rumah-rumah panggung di belakang sungai dan perahu-perahu
(type kampung tua) di Palembang, 3 September 1949

Sumber: ANRI, NIGIS-RVD SUMSEL NO. 90903 DD 9



Hotel Ruys di Palembang, 4 Oktober 1949

Sumber: ANRI, NIGIS RVD NO 91004 DD 2, NIGIS RVD NO 91004 DD 3



Palembang, Rumah2 penduduk di atas sungai Musi, 19 April 1950

Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 0227



Palembang, Rumah2 penduduk di atas sungai Musi, 19 April 1950

Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 0224



Suasana keindahan Gedung *Water Toren* (sekarang Kantor Walikota Palembang) di waktu senja hari di Palembang, 25 Agustus 1950
Sumber: ANRI, NIGIS-RVD SUMSEL NO. 90830 DD 7-1



Suasana gedung *Water Toren* (sekarang Kantor Walikota Palembang) di Palembang, 25 Agustus 1950

Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 0179



Suasana Kantor Walikota Palembang di waktu malam, 2019
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang



Suasana Kantor Walikota Palembang, 3 Mei 2019

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang



Rumah-rumah penduduk di tepi Sungai Musi,
Palembang, 19 April 1951
Sumber: ANRI, Kempen 512493



Pembangunan salah satu jembatan di atas Sungai Musi, Palembang, pembangunan pilar-pilar beton untuk jembatan dengan menggunakan perahu derek, 14 Desember 1953

Sumber: ANRI, Kempen K531214 DD 1-1



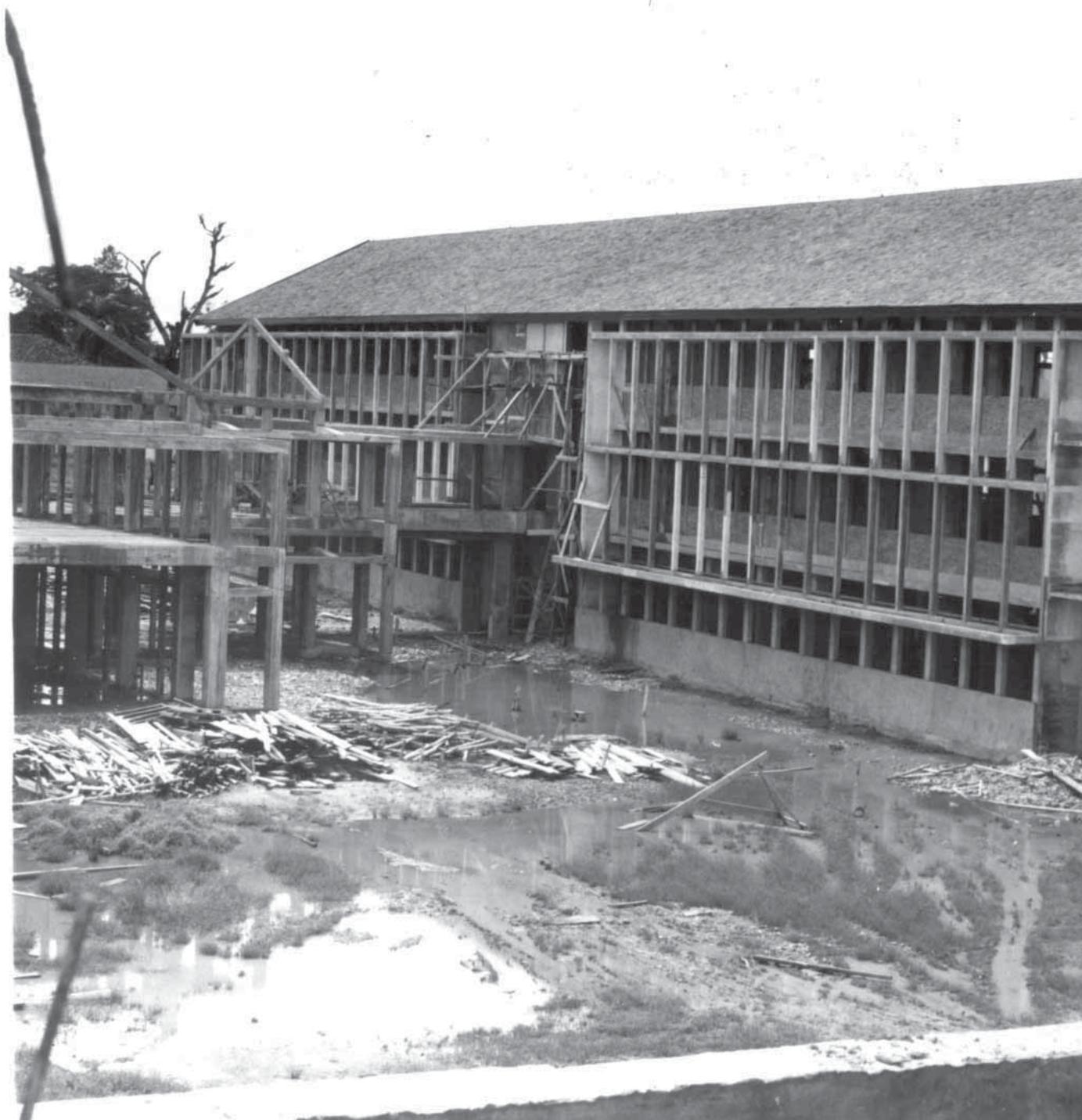
Perumahan rakyat di Palembang, rumah-rumah yang telah dibangun untuk disewakan kepada rakyat di Palembang, 15 Desember 1953

Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 0212 b, Kempen 531215 DD 1



Pembangunan di Palembang, Gedung
Gubernuran yang sedang dibangun di
Palembang, 11 Maret 1958

Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 0117



Pembangunan Kantor Gubernur Sumatera Selatan
di Palembang, 11 Maret 1958

Sumber: ANRI, Kempen 580311 DD 1-3



BELUM DIKOR 1951



nst.397/62.-

PIDATO PJM PRESIDEN SUKARNO PADA PEMBUKAAN
GEDUNG BARU RRI PALEMBANG PADA TANGGAL
10 APRIL 1962.

Saudara-Saudara sekalian,

Dalam mendjalankan Trikora, Tri Komando Rakjat, kita telah membentuk satu staf, Staf Operasi Pembebasan Irian Barat jang Panglima Besarnja saja, Kepala Stafnja Djenderal Jani. Dan salah seorang anggauta daripada Staf Operasi itu jaitu Menteri Achmadi, jang istimewa saja tugaskan mengerahkan sukarelawan-sukarelawan untuk membebaskan Irian Barat.

Dan sebagai saudara-saudara ketahui telah lebih daripada 6 djuta sukarelawan dari seluruh Indonesia mentjatatkan dirinja untuk dipergunakan dalam perdjangan pembebasan Irian Barat.

Maka sebaiknja sekarang jang memetik putri Irian Barat itu Pemimpin sukarelawan Menteri Achmadi.

Silahkan.

TRANSLA



Saudara-
In
a staff,
which I

ral Jani
Achmadi,
West Iri
whole of
in the s
The
of the v

TRANSLATION

Inst.371/63.-

SPEECH OF H.E. PRESIDENT SUKARNO AT THE OPENING OF THE
NEW RADIO BUILDING IN PALEMBANG ON APRIL 10th, 1962.

Saudara-Saudara,

In the execution of the People's Triple Command we have formed
staff, the Operational Staff of the liberation of West Irian of
which I am the commander in chief, while the Chief of staff is Gene-
ral Jani. One of the members of that Operational Staff is Minister
Achmadi, whom I have specially charged with the mobilisation of
West Irian. And as you know, more than 6 million volunteers of the
island of Indonesia have registered themselves to give their services
to the struggle for the liberation of West Irian.

Therefore, it would be better if Minister Achmadi, the leader
of the volunteers, now would select the "Queen of West Irian".

SMA-RmH

Pidato PJM Presiden Sukarno pada
pembukaan gedung baru RRI Palembang
pada tanggal 10 April 1962

Sumber: ANRI, Pidato Presiden 381

PIDATO PJM PRESIDEN SUKARNO PADA UPACARA PEMANCANGAN TIANG
PERTAMA PROYEK DJEMBATAN MUSI DI PALEMBANG, 10 APRIL 1962.

Saja diminta memberi do'a restu kepada pembangunan djembatan Musi ini.

Tadi pada waktu saja mengadakan pidato di rapat rakassa telah saja perintahkan agar supaya djembatan ini selesai pada tanggal 10 April 1964. Dan Pak Suprajogi, Menteri Pekerdjaan Umum jang sekarang, tadipnja telah memberi beberapa pendjelaskan-pendjelasan kepada saudara-saudara sekalian.

Kalau saja berdiri dimimbar ini atau saudara-saudara pun, siapa-pun jang berdiri dimimbar ini dan melihat kebelakang ini, melihat sibuknja lalu lintas di sungai Musi, akan segera mengerti bahwa sungai Musi itu adalah satu urat hidup bagi rakjat Sumatra Selatan. Bahasa asingnja satu "levensader" daripada rakjat Sumatra Selatan. Dan bukan sedja didjaman purbakala sungai Musi adalah sungai jang amat penting, bahkan menentukan dalam peri-kehidupan rakjat di Sumatra Selatan. Tetapi djuga didjaman atom sekarang ini. Behwa sungai Musi didjaman purbakala adalah sungai jang menentukan, bisa kita lihat daripada sedjarah bahwa daerah sini Palembang dan sekitarnya sedjak berabad-abad jang lalu, bahkan ribuan tahun jang lalu, telah mendjadi pusat ekonomi, pusat ilmu pengetahuan, pusat keradjean. Sehingga sungai Musi saudara-saudara menduduki satu tempat jang boleh dikatakan abadi didalam peri-kehidupan rakjat Sumatra Selatan.

Didalam peri-kehidupan bangsa-bangsa sering sungai-sungai menduduki tempat jang demikian itu.

Di India misalnja saudara-saudara mengenal nama sungai Ganga. Orang Inggris menamakan sungai "Ganges", Ganga. Sungai Ganga demikian menentukan peri-kehidupan rakjat India sehingga sungai Ganga itu dikeramatkan, dianggap sebagai sungai jang keramat.

Di Sumatra ada satu sungai jang demikian pentingnja, demikian menentukan peri-kehidupan rakjat, sehingga sungai itu dianggap sebagai sungai Tuhan. Saudara-Saudara barangkali mengenal sungai Batanghari. Hari itu artinja apa saudara-saudara? Didalam istilah kuno hari berarti Tuhan. Batahari itu dianggap mataNja Tuhan. Batanghari, sungai dianggap demikian pentingnja, demikian keramatnja, demikian menentukannja kepada peri-kehidupan rakjat, sehingga diberi nama BatangNja Tuhan, sungaiNja Tuhan, Batanghari.

Saja tidak mengetahui apa arti perkataan Musi. Barangkali orang Palembang mengetahui atau barangkali Pak Ir. Prof. Moh. Yamin jang djuga hadir disini mengetahui? Apa arti perkataan Musi? Tetapi eku bisa menduga, bahkan

bisa menduga, bahkan memastikan, bahwa rakjat Sumatra Selatan sebagai satu

Sekarang pun kita melihat, tjeb Musi ini, lihat kesibukan hisap di situ sedjak djalan purbakala sungai rakjatnja. Djaman purbakala tadikala gerobak, tetapi terutama sekali diat Tetapi djaman sekarang sudah djalan tidak hanya dengan gerobak atau dengan kapal-kapal, tetapi kita bergerak dengan kendaraan-kendaraan jang bermotor atau djuga kendaraan-kendaraan darat jang dengan kendaraan-kendaraan udara jang

Maka oleh karena itu saudara-saudara didaerah ini adalah sungai lalu lintas gap perlu oleh rakjat sini sendiri dan Indonesia untuk mengadakan djembatan supaya lalu lintas jang disungai bisa lalu lintas darat bisa berdjalan dengan lintas sungai berdjalan terus dengan jang saudara-saudara telah berangkat bagian tengahnja bisa dinaik-turunkan tidak terhaibat oleh karananja dan la terus puls.

Maka saudara-saudara saja merasa sekali, bahwa kita saudara-saudara jang

Ja benar, memang saudara-saudara Musi jang bagian tengah bisa naik dan untuk lalu lintas darat. Saudara-saudara djembatan itu dan memang saudara-saudara djembatan Musi ini antara lain disebel pertama saja perintahkan dirobah, saja proyek sekarang. Saja kira proyek jang tjantik sekali, sehingga dapatlah kita ini telah selesai.

Maka saudara-saudara pada saat jang hon kepada Allah SWT agar supaya pekerjaan benar-benar selesai didalam tempo dua tahun 10 April 1962, selesai 10 April 1964.

Maka dengan demikian djikalau djembatan sebenaanja kita bukan sedja mempunyai ilir dan hulu dari sungai Musi, tetapi

Pidato Presiden Sukarno pada upacara pemancangan tiang pertama proyek Jembatan Musi di Palembang (sekarang dikenal sebagai Jembatan Ampera), 10 April 1962

Sumber: ANRI, Pidato Presiden No. 383

an, bahwa sungai Musi pun dianggap oleh
 i satu sungai yang menentukan.
 t, tjohe lihat lalu lintas di sungai
 p di sungai Musi ini. Maka oleh karena
 ngai Musi itu penuh dengan kesibukan
 atkala kita bergerak sadar dengan
 li diatas air dengan perahu-perahu.
 jlanan eton, djanan yang kita bergerak
 u dengan perahu-perahu atau dengan
 rak dengan kendaraan-kendaraan darat,
 stor atau berlistrik, bahkan sudah ada
 t jam beraton. Dan kita bergerak pula
 ra yang berupa pesawat-pesawat udara.
 era-saudara, meskipun sungai Musi
 u lintas yang amat penting, maka diang-
 diri dan oleh pemerintah Republik
 mbatan diatas sungai Musi itu, agar
 si bisa berdjalan terus, tetapi djuga
 an dengan setjepat-tjepatnja. Lalu
 denan membuat konstruksi djembatan
 angkali melihat projeknja, maquetnja,
 uruntn sehingga lalu lintas kapal
 dan lalu lintas darat bisa berdjalan

merasa berbahagia, amat berbahagia
 dare pada saat sekarang ini memantjang-
 e djembatan Musi yang hebat itu.
 saudara, pekerjaan membangun djembatan
 naik dan turun dan djembatan adalah
 ra-saudara telah melihat projek daripada
 ra-saudara kelambatan membuka kerdja
 disebabkan oleh karena projek yang
 h, saja sendiri ikut tjoret-tjoret
 ek yang sekarang ini adalah projek yang
 h kita nanti bangga djilmlau djembatan
 saat yang amat penting ini saja memo-
 a pekerjaan djembatan ini bisa be-
 dua tahun sodjek terhitung hari ini,
 1964.
 lau djembatan Musi telah selesai, maka
 mpunjai djembatan yang menghubungkan
 tetapi sebenarnya menjambungkan hari
sekarang dengan

sekarang dengan hari depan. Hari sekarang dan depan daripada
 rakjat Sumatra Selatan, hari sekarang dan hari depan daripada
 rakjat Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke. Sebab tujuan
 kita saudara-saudara ialah membangun satu masyarakat baru yang
 adil dan makmur yang sehebat-hebatnja, dan untuk menjelenggarakan
 masyarakat, yang demikian itu saudara-saudara, yaitu masyarakat
 hari depan tidak dapat kita mendapat hanya dengan djatuh air
 embun dari langit saja, tetapi dengan kerja, dengan alat-alat
 modern hebat-hebat. Sosialisme tidak datang dengan kerdja ketjil,
 sosialisme adalah hasil daripada kerdja yang hebat, dengan alat-
 alat yang hebat. Djembatan Musi adalah salah satu daripada alat-
 alat itu.
 Bismillah, mari kita mulai bekerdja.
 Sekian.

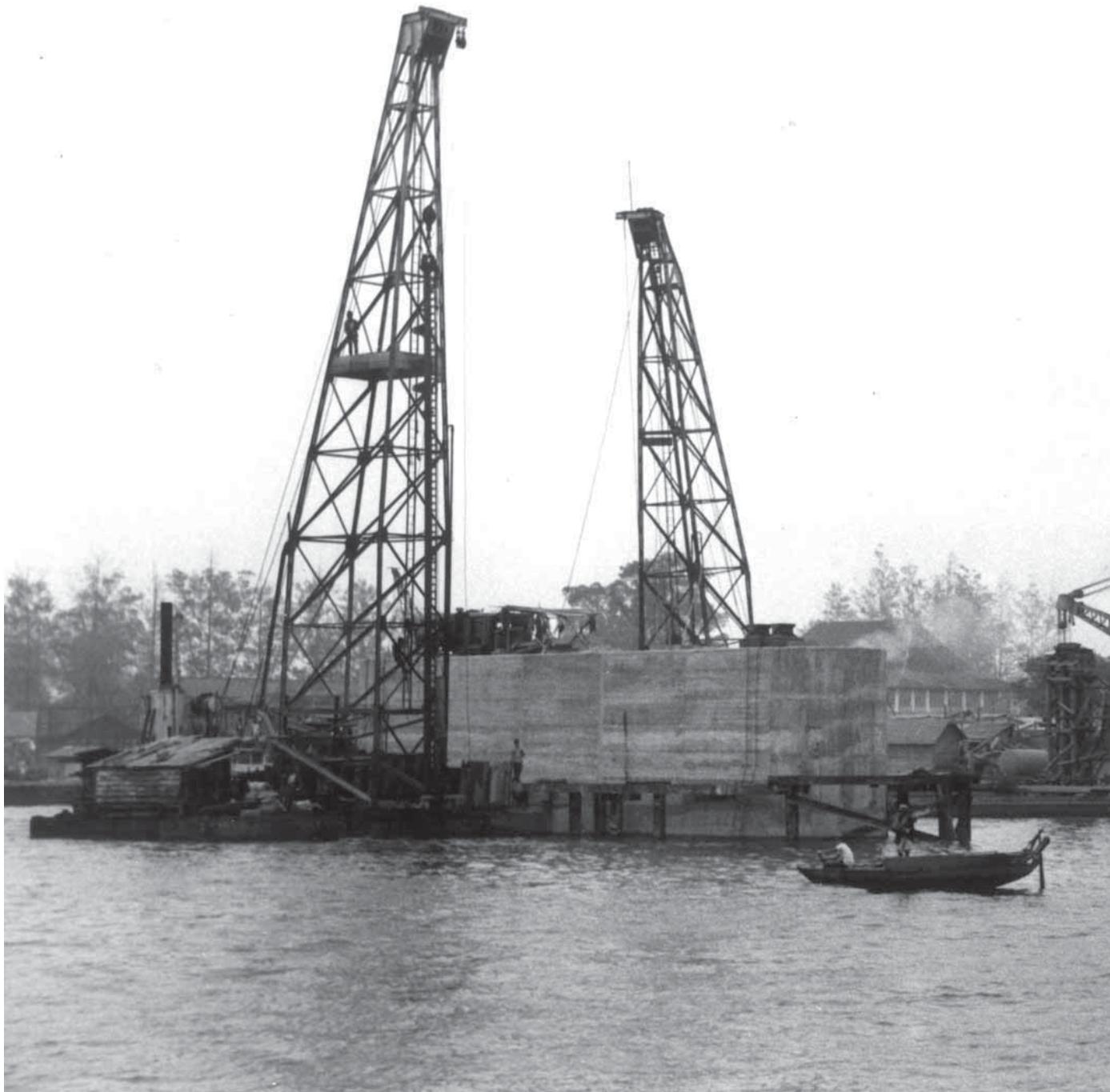
-----0-----



Presiden Sukarno meresmikan tiang pancang pertama Jembatan Sungai Musi di Palembang, (sekarang dikenal sebagai Jembatan Ampera), 10 April 1962

Sumber: ANRI, Kempen 620410 DD 10





Pembangunan Jembatan Sungai Musi di Palembang,
(sekarang dikenal sebagai Jembatan Ampera), 20 Oktober 1963
Sumber: ANRI, Kempen 63-13109





Jembatan Ampera di atas Sungai Musi,
Palembang, Sumatera Selatan, 9 Mei 1965
Sumber: ANRI, Kempen 65-4123





Projek jembatan Musi, panjang 1200 meter,
Palembang 9 Mei 1965

Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 1359



Parlemen Jepang yang diketuai Tokuma Utsunomya meninjau Proyek Jembatan Ampera di atas Sungai Musi, Palembang, 9 Mei 1965

Sumber: ANRI, ID-ANRI_F-12_1339



Jembatan Ampera di atas Sungai Musi, Palembang, 3 Mei 2019
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang



Transportasi



Pada masa kesultanan, Palembang merupakan sebuah ibu kota kesultanan yang berbentuk delta-delta. Sultan Palembang membagi perkampungan kotanya berdasarkan ruang air. Penduduk Palembang mendirikan rumah di setiap anak Sungai Musi yang mengalir kota kesultanan. Konsekuensi terciptanya "ruang air" kota keratin Palembang ini terlihat pada adaptasi mereka yang sangat tergantung dengan air dalam kehidupannya. Jalur transportasi satu-satunya yang dipakai hanya lewat sungai. Berbagai jenis perahu digunakan masyarakat sesuai jenis pengguna dan kegunaannya. Perahu yang dipakai oleh rakyat biasa yaitu perahu dangkuk atau kolek, perahu kajang, dan perahu jukung. Setelah Pemerintah Kolonial Belanda mengubah Palembang menjadi kota daratan, alat transportasi, diantaranya becak, sepeda, mobil, kereta api, dll. Saat ini, di Palembang selain ada fasilitas bandar udara, jalan kereta api juga telah dibangun pembangunan LRT sepanjang 25 KM.



Lalu-lintas perdagangan di air/Sungai Musi, tampak sampan yang dimuati sebagai alat transportasi dan perahu-perahu beratap, 8 Maret 1948

Sumber: ANRI, NIGIS RVD NO 80308 DD 10



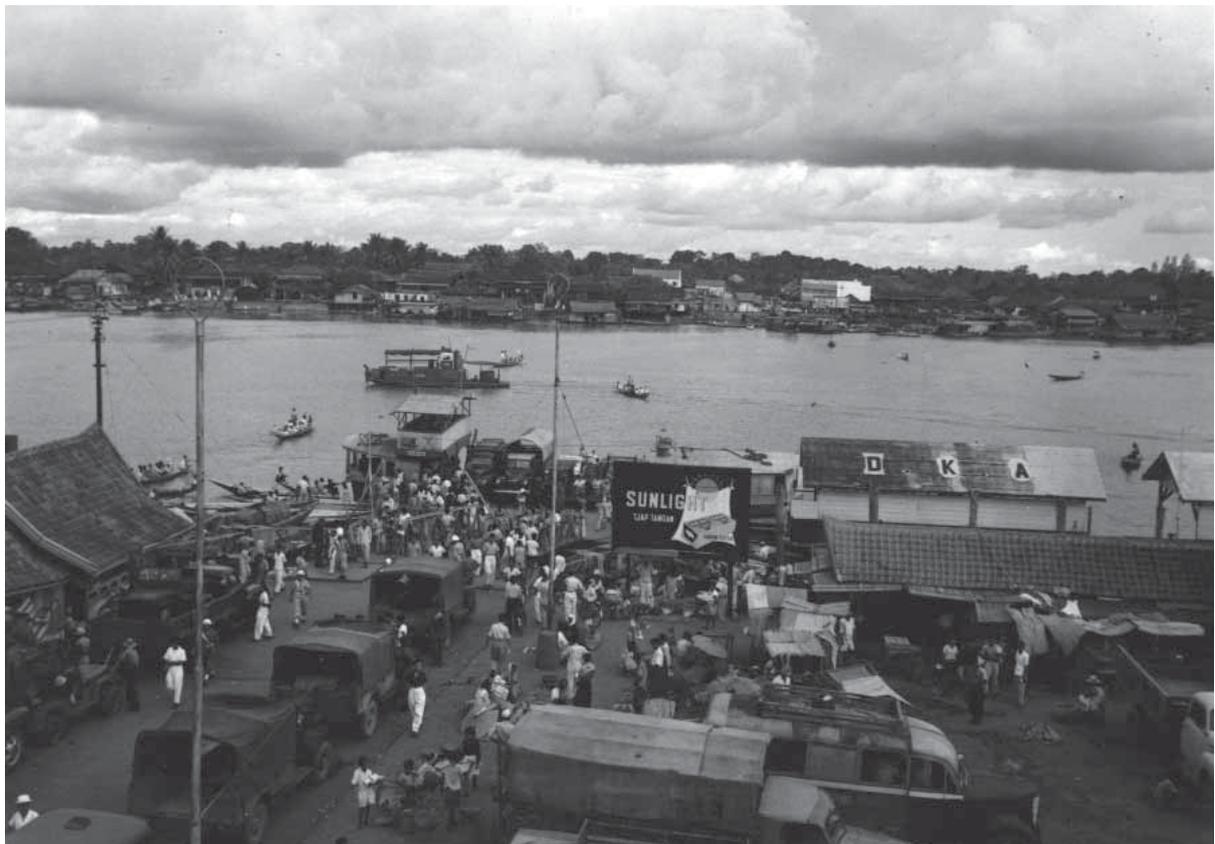
Gerobak sapi yang melintas jembatan yang baru diresmikan di Ogan, 20 Desember 1948
Sumber: ANRI, NIGIS-RVD SUMSEL NO. FG 1620087



Percontohan kereta api baru antara Kertapati-Prabumulih di Sumatera Selatan yang dihadiri oleh J.U. Menteri Perhubungan Mr. Soekandar, [1950]

Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 1244, ID-ANRI F-12 1237





Suasana di sekitar Sungai Musi terlihat perahu sebagai sarana transportasi, Palembang, 25 Agustus 1950

Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 0484



Suasana di sekitar Sungai Musi terlihat perahu sebagai sarana transportasi, Palembang, 25 Agustus 1950

Sumber: ANRI, ID-ANRI_F-12_0486



Lalu lintas kendaraan transportasi di Kota Palembang, di belakang nampak menara air, Palembang 1 Juli 1951

Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 0478



Perahu tambangan sebagai sarana transportasi
di Sungai Musi, Palembang, 4 Mei 1955
Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 0595



Kapal Pengangkut Jema'ah haji Indonesia asal Palembang, Sumatera Selatan, 5 Mei 1965
Sumber: ANRI, Kempen 65-055/1





Suasana pembangunan jalur LRT (Light Rail Transit) sepanjang 25 kilometer menghubungkan Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II dengan Kompleks Olahraga Jakabaring di Kota Palembang, 2 November 2017
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang





Transportasi LRT (Light Rail Transit) di Kota Palembang yang dimulai pengoperasiannya pada 23 Juli 2018
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang







DAFTAR ARSIP



DAFTAR ARSIP

A. Geografis

1. Denah Pemerintahan Kota Palembang, 1819
Sumber: ANRI, De Haan E 38
2. Sketsa Bengkulu dan Palembang, 1930
Sumber: ANRI, De Haan L 44
3. Sketsa perbatasan Palembang Rejang dan Empat Lawang Bengkulu yang merupakan lampiran dari Resolusi Nomor 8, 29 Juli 1832
Sumber: ANRI, De Haan E. 33
4. Residensi Palembang, 1922
Sumber: ANRI, Kartografi Indonesia No 1436
5. Palembang, Sekayu, Muara Enim, Perbatasan Riau, Jambi dan Bangka, 1941
Sumber: ANRI, Kartografi Indonesia No.1407
6. Palembang dengan sungai Musi, Talang Betutu, 1945
Sumber: ANRI, Kartografi Indonesia No. 1988
7. Peta Palembang, 1945
Sumber: ANRI, Kartografi Indonesia No. 2022
8. Peta Kota Palembang, 1945
Sumber: ANRI, Kartografi Indonesia No. 2023
9. Foto udara Kota Palembang, 1948
Sumber: ANRI, NIGIS RVD NO B2023
10. Pemandangan Kota Palembang, 1951
Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 0500
11. Pemandangan Kota Palembang, 1951
Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 0512
12. Pemandangan Kota Palembang, 1951
Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 0492
13. Pemandangan kampung ditepi Sungai Musi di Palembang, Sumatera Selatan, 18 Desember 1953
Sumber: ANRI, Kempen K 531218 DD 1
14. Pemandangan sungai Musi, Palembang, 9 Mei 1965
Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 1372
15. Pemandangan sungai Musi, Palembang, 9 Mei 1965
Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 1376

B. Politik dan Pemerintahan

16. Kontrak perdagangan antara Raja Palembang Sultan Ratu Abdul Jamal dengan Gubernur Jenderal Rijkloft, 20 April 1678
Sumber: ANRI, Palembang 41/5
17. Bagian akhir dari Pembaharuan kontrak perdagangan tahun 1662, 1678, 1679 dan 1681 antara Raja Palembang Sultan Ratu Abdul Jamal dengan Komisariss Issac van Thieje, 19 Januari 1691
Sumber: ANRI, Palembang 41/6
18. Pertemuan antara Sultan Najamuddin II, Prabu Anom dan Hoge Regering(Pemerintah

- Kolonial Belanda) pada tanggal 28 April 1821 di Bogor tentang pemulihan kekuasaan Sultan Najamuddin II dan Prabu Anom yang akan menjalankan pemerintahan dengan gelar Ahmad Najamuddin III, 1811
Sumber: ANRI, Palembang No. 5.1. 1811-1821
19. Pembagian Kesultanan Palembang antara Sutlan Badarudin dan Sultan Najamudin oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1818
Sumber: ANRI, Palembang No. 5.1. 1811-1821
 20. Perubahan fungsi Keraton Kuto Besak menjadi benteng saat diambil alih oleh Pemerintahan Kolonial Belanda. Kuto Besak dijadikan sebagai markas tentara Belanda dan tempat berlindung dari serangan penduduk pribumi, 14 Agustus 1822
Sumber : ANRI, Algemene Secretarie Besluit 14/8/1822 No.11
 21. Sumpah Pelantikan Pangeran Krama Jaja, Perdana Menteri dari Palembang, 5 September 1823
Sumber: ANRI, Palembang 15 DV II – 18
 22. Surat dari Raja Palembang, Sultan Ahmad Najamuddin kepada Gubernur Jenderal Van der Capellen mengenai keadaan dan kedudukan keluarganya, 26 November 1823 (22 Rabiul Awal 1239 H)
Sumber: ANRI, Surat Emas No. 7 (Palembang 69)
 23. Surat Sultan Mohamad Badaruddin dari Palembang kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengenai keadaannya yang diasingkan ke Ternate, 23 Desember 1823 (12 Safar 1239 H)
Sumber: ANRI, Surat Emas No.22 (Palembang 80)
 24. Laporan tahunan Residensi Palembang tahun 1834-1835 yang ditulis pada tanggal 25 April 1836 mengenai silsilah periode kekuasaan 16 Raja Palembang dari tahun 1543 s.d. 1821. Kerajaan berubah menjadi Kesultanan pada periode pemerintahan Sultan Abdul Rachman pada tahun 1648-1693
Sumber: ANRI, Palembang No. 62-2 1854-1855
 25. Asal-usul nama Palembang yang berasal dari kata Liembang dan berasal dari bahasa Jawa yang berarti “membersihkan/membilas/mencuci emas” lalu ditambah dengan kata depan “Pa” sehingga menjadi Pa Liembang yang kemudian digabungkan menjadi Palembang, 1845-1855
Sumber: ANRI, Palembang No. 62-2 1854-1855
 26. Keputusan mengenai desentralisasi kota Palembang & pembentukan dewan gemeente (kotamadya) di Palembang. Jumlah anggota dewan adalah 13 orang yang terdiri dari: 8 orang eropa - 2 orang timur - 3 Pribumi, 21 Februari 1906
Sumber: ANRI, Staatsblad Van Indie No. 126-1906
 27. Surat Keputusan Gubernur Jendral Hindia Belanda tanggal 29/8/1918 No.10 tentang perubahan di beberapa onderafdeeling dan afdeeling di Palembang
Sumber: ANRI, Staatsblad Van Indie No. 612-1918
 28. Surat Keputusan Gubernur Jendral Hindia Belanda tanggal 4/8/1921 No.32 tentang perubahan pembagian wilayah di Palembang, 4 Agustus 1921
Sumber: ANRI, Staatsblad Van Indie No. 465-1921
 29. Rapat Dewan Penasehat Sumatera Selatan. Dari kiri figur pejabat: R.M. Abib (direktur BPNSS); Pangeran Bakri (pasirah dari Lubuk Batang); Kiai H. Mochtar (wakil alim ulama Muara Enim), 16 Agustus 1948
Sumber: ANRI, NIGIS-RVD SUMSEL NO. 80816 DD 3
 30. Rapat Dewan Penasehat Sumatera Selatan. Dari kiri figur pejabat: Ir. A. van Duur Sen (Administratur lama dari Plaju); W.V. Doop (Wnd - Burgermester); Pangeran M. Safe'I (pasirah dari Salatiga), 16 Agustus 1948

Sumber: ANRI, NIGIS-RVD SUMSEL NO. 80816 DD 5

31. Para pegawai redaksi "Pertja Selatan" diruang kerja surat kabar Dinas Penerangan, Palembang, 3 September 1949
Sumber: NIGIS-RVD SUMSEL NO. 90903 DD 27
32. Rombongan Sultan Yogya (Sri Sultan HB IX) tiba di lapangan terbang Talang Betutu, Palembang, 23 September 1949
Sumber: NIGIS-RVD SUMSEL NO. 90923 DD 2
33. Rombongan Sultan Yogya (Sri Sultan HB IX) tiba di lapangan terbang Talang Betutu, Palembang, 23 September 1949
Sumber: NIGIS-RVD SUMSEL NO. 90923 DD 1
34. Resepsi diberikan oleh Kol. Luschsinger berkenaan dengan kunjungan Sultan HB IX. Tampak Sultan Yogya bersalaman dengan Kol. Luchsinger dan Raden Hanan menyaksikan di Palembang, 23 September 1949
Sumber: ANRI, NIGIS-RVD SUMSEL NO. 90923 DD 3
35. Saat resepsi kunjungan Sultan Yogya di Palembang. Dari kiri : Militer peninjau dari KPBBI France dari UNCI; Hr; Waardenburg (utusan WTM untuk Sumatera Selatan) bercakap-cakap dengan Sultan HB IX, 23 September 1949
Sumber: ANRI, NIGIS-RVD SUMSEL NO. 90923 DD 4
36. Presiden Sukarno ketika tiba di Palembang dalam rangka kunjungan kerja Presiden ke Palembang, Plaju dan Sungai Gerong, Sumatera Selatan, 8 September 1950
Sumber: ANRI, Kempen 501085
37. Presiden Sukarno berjiarah ke makam pahlawan di Palembang, dalam rangka kunjungan kerja Presiden ke Palembang, Plaju dan Sungai Gerong, Sumatera Selatan, 8 September 1950
Sumber: ANRI, Kempen 501081
38. Wakil Presiden Mohammad Hatta meninggalkan bandar udara Talang Betutu, Palembang, Sumatera Selatan, 14 Juli 1954
Sumber: ANRI, Kempen 540714 DD22
39. Resolusi Partai Politik Islam Masyumi Daerah Kecamatan Tanjung Tebet Palembang tentang permintaan kepada Pemerintah untuk memperpanjang pendaftaran Pemilihan Umum (pemilu) dan menertibkan kecurangan- kecurangan dalam pemilu tahun 1955, 29 Oktober 1955
Sumber: ANRI, Kabinet Presiden No. 997
40. Timbang terima Residen Palembang, kiri Residen Palembang yang baru H.M. Hosen, kanan Residen Palembang yang lama Abdul Rozak, 1 Februari 1956
Sumber: ANRI, Kempen 560201/2
41. Presiden Sukarno berbincang di atas kapal waktu menyebrang Sungai Musi di Palembang, Sumatera Selatan, 10 April 1956
Sumber: ANRI, Kempen 560410 DD 11
42. Presiden Sukarno tiba di resepsi muktamar Muhammadiyah ke-33 di Palembang, disambut oleh barisan pandu, 23 Juli 1956
Sumber: ANRI, Kempen 560723 DD 7
43. Ketua Umum Muhammadiyah Abdul Rasyid St. Mansur berpidato pada Mukhtamar ke-33 Muhammadiyah tentang perjuangan Muhammadiyah di Palembang, Sumatera Selatan, 23 Juli 1956
Sumber: ANRI, Kempen 560723 DD 17
44. Presiden Sukarno mendengarkan laporan dari Acting Panglima Teritorial-II/Sriwijaya Letnan Kolonel Burlian, dalam rangka kunjungan Presiden ke Staf Komando Teritorial-II/

Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan, 28 Juli 1956

Sumber: ANRI, Kempen 560724 DD 3

45. Upacara Timbang terima Jawatan Lalulintas Darat Pusat kepada Daerah Otonom Swatantra Tingkat I Sumatera Selatan di Palembang, 2 Oktober 1958
Sumber: ANRI, Kempen Nomor 581002/1
46. Pawai dan rapat raksasa mendukung ide kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dilapangan Mohammad Hatta Palembang, 17 April 1959
Sumber: ANRI, Kempen 590417 DD 1
47. Pidato P.J.M. Presiden pada rapat raksasa di depan Kantor Gubernur Palembang pada tanggal 10 April 1962
Sumber: ANRI, Pidato Presiden Sukarno No. 382
48. Rapat Umum dengan slogan "Ganyang Pangkalan Militer Asing" di Palembang, Sumatera Selatan, 19 September 1965
Sumber: ANRI, Kempen 650919-SS-1

C. Keagamaan

49. Klenteng orang Cina Palembang, Sumatera Selatan, [1930]
Sumber: ANRI: KIT 791/63
50. Salah satu gereja di Palembang, Sumatera Selatan, [1930]
Sumber: ANRI, KIT 1099/24
51. Para peserta yang menghadiri Kongres Protestan - Kristen meninggalkan gereja Haantjes di Palembang, 15 Agustus 1948
Sumber: ANRI, NIGIS-RVD SUMSEL NO. 80815 DD 5
52. Para undangan yang hadir saat pembukaan Kongres Umum Kaum Protestann- Kristen, 15 Agustus 1948
Sumber: ANRI, NIGIS-RVD SUMSEL NO. 80815 DD 10071
53. Masjid Agung di Kota Palembang, yang dibangun abad ke-15 oleh Sultan Machmud Badaruddin II, 25 Agustus 1950
Sumber: ANRI, Kempen 50586
54. Masjid Agung di Kota Palembang, yang dibangun abad ke-15 oleh Sultan Machmud Badaruddin II, 19 April 1951
Sumber: ANRI, Kempen 512294
55. Suasana Masjid Agung di Kota Palembang yang sedang diperluas, dibangun abad ke-15 oleh Sultan Machmud Badaruddin II, 23 November 1955
Sumber: ANRI, Kempen 512294
56. Kedatangan Djemaah Hadji di Palembang, 5 Mei 1965
Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 0285
57. Barang-barang Jemaah Haji yang datang pada di Palembang, 5 Mei 1965
Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 0291
58. Kedatangan Jemaah Haji di Palembang, 5 Mei 1965
Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 0284, ID-ANRI F-12 0292
59. Laporan hasil konfrensi cabang Partai Nahdlatul Ulama Kotamadya Palembang, 13 Agustus 1951
Sumber: ANRI, Nahdlatul Ulama (NU) No. 706
60. Masjid Agung di Kota Palembang, yang dibangun abad ke-15 oleh Sultan Machmud Badaruddin II, setelah perluasan masjid di belakang masjid utama, 18 Desember 2008
Sumber: ANRI, PNSAP Sumsel 1

61. Masjid Agung di Kota Palembang, yang dibangun abad ke-15 oleh Sultan Machmud Badaruddin II, 3 Mei 2019
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang
62. Mesjid Cheng Ho, Palembang, 2019
Sumber: Dinas Pariwisata Kota Palembang
63. Klenteng Dewi Kwan Inn, Palembang, 2019
Sumber: Dinas Pariwisata Kota Palembang
64. Makam Cinde Walang, Palembang, 2019
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang
65. Makam Kawah Tekurep, Palembang, 2019
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang
66. Makam Bagus Kuning, Palembang, 2019
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang
67. Makam Ki Gede Ing Suro Tuo, Palembang, 2019
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang
68. Makam Sabo King king, Palembang, 2019
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang
69. Makam Sultan Agung, Palembang, 2019
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang

D. Budaya dan Pariwisata

70. Tiga gadis penari berpakaian adat Palembang, 30 Agustus 1949
Sumber: ANRI, Kempen 90830 DD 6-5
71. Masyarakat penduduk setempat menyaksikan balap sepeda keliling Palembang dalam rangka ultah Negara Sumatera Selatan di Palembang, 30 Agustus 1949
Sumber: ANRI, NIGIS-RVD SUMSEL No. 90830 DD 5-1
72. Masyarakat menyaksikan pertandingan balap perahu di Sungai Musi dalam acara ulang tahun Negara Sumatera Selatan di Palembang, 30 Agustus 1949
Sumber: ANRI, NIGIS-RVD SUMSEL No. 90830 DD 5-3
73. Seorang gadis berpakaian adat sedang menarikan tari Gending Sriwijaya di pasar malam, 30 Agustus 1949
Sumber: ANRI, NIGIS-RVD SUMSEL No. 90830 DD 6-7
74. Rekaman orkes Arab di Radio Palembang. Tampak personel dan alat-alat musik Arab, 3 September 1949
Sumber: ANRI, NIGIS-RVD SUMSEL NO. 90903 DD 24
75. Seorang lelaki keturunan Arab sedang berpiano untuk rekaman orkes Arab di Palembang, 3 September 1949
Sumber: ANRI, NIGIS-RVD SUMSEL No. 90903 DD 33
76. Pertunjukan tari Gending Sriwijaya oleh gadis-gadis Palembang di teater initium saat pelantikan Wali Negara Sumatera Selatan, 21 September 1949
Sumber: ANRI, NIGIS-RVD SUMSEL No. R 90921 FG 1-3
77. Penari Gending Sriwijaya oleh gadis di Palembang, 8 September 1950
Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 1530
78. Para gadis berpakaian khas adat Palembang yang menari Tari Gending Sriwijaya, 30 November 1950
Sumber: ANRI, Kempen 50597

79. Tari Gending Sriwijaya, menyambut kedatangan Presiden Sukarno di Palembang, Sumatera Selatan, 30 November 1950
Sumber: ANRI, Kempen 501129
80. Presiden dengan para penari Gending Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan, 30 November 1950
Sumber: ANRI, Kempen 501130
81. Tari Menumbuk Padi, Palembang, Sumatera Selatan, 30 November 1950
Sumber: ANRI, Kempen 501167
82. Presiden Sukarno dan Ibu Fatmawati disambut dengan tarian adat, ketika tiba di rumah Gubernur Sumatera Selatan di Palembang, 9 November 1954
Sumber: ANRI, Kempen 541109 DD 9
83. Kunjungan misi kebudayaan Cekoslowakia di Indonesia, ketua misi Pavel Dubovsky dan para penari, sedang berjabat tangan dengan Gubernur R.Winarno, Palembang 17 Januari 1957
Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 0301, ID-ANRI F-12 0308-a
84. Pertunjukan tarian oleh misi kebudayaan Cekoslowakia di Palembang, 17 Januari 1957
Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 0304-a, ID-ANRI F-12 0306-a
85. Bukit Siguntang, Palembang, 2019
Sumber: Dinas Pariwisata Kota Palembang
86. Danau Opi, Palembang, 2019
Sumber: Dinas Pariwisata Kota Palembang
87. Kampung Kapitan, Palembang 3 Mei 2019
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang
88. Museum Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang, 2019
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang
89. Museum Bala Putra Dewa, Palembang, 2019
Sumber: Dinas Pariwisata Kota Palembang
90. Benteng Kuto Besak, Palembang, 2019
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang
91. Bangunan cagar budaya Jacobson Van Den Berg, Kota Palembang, 3 Mei 2019
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang
92. Pulau Kemaro, Palembang, 2019
Sumber: Dinas Pariwisata Kota Palembang
93. Pempek atau empek-empek makanan khas Kota Palembang, 2019
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang
94. Pempek atau empek-empek makanan khas Kota Palembang, 2019
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang
95. Mie Celor makanan khas Kota Palembang, 2019
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang
96. Tekwan makanan khas Kota Palembang, 2019
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang
97. Kerupuk Kemplang makanan khas Kota Palembang, 2019
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang
98. Kue Dadar Jiwo makanan khas Kota Palembang
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang
99. Kue Jongkong makanan khas Kota Palembang, 2019

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang

100. Kue Gandus makanan khas Kota Palembang, 2019
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang

E. Pendidikan Dan Olahraga

101. Kunjungan Major John Lie di Palembang, sedang memberikan ceramah pada murid-murid SMA di balai pertemuan, Palembang 23 Oktober 1952
Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 1015, ID-ANRI F-12 1019
102. Ibu Walikota Palembang ketika memberikan sebuah piala kepada juara wanita pemilihan bintang pelajar, 5 Februari 1956
Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 0879
103. Pembangunan Universitas "SHAKYAKERTI" oleh Zeni Pionir AD di Palembang, 23 Juli 1960
Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 0255, ID-ANRI F-12 0253
104. Amanat Presiden Sukarno pada peresmian status negeri terhadap Universitas Sriwijaya Palembang, 3 November 1960
Sumber: ANRI, Pidato Presiden 236
105. Presiden Sukarno menandatangani piagam peresmian Universitas Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan, disaksikan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PPK) Prof. Prijono, 3 November 1960
Sumber: ANRI, Kempen 601103 DD 35
106. Gedung Universitas Negeri Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan, 3 November 1960
Sumber: ANRI, Kempen 601103 DD 40
107. Hari Pendidikan Nasional di Palembang, 2 Mei 1965
Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 0865, ID-ANRI F-12 0871
108. Ir. Sadono (memegang microphone) adalah perancang roket "Pramuka Sriwijaya I" menjelaskan kepada Panglima Kodam IV/ Sriwijaya Brigadir Jenderal Makmun Murod, 16 Mei 1965
Sumber: ANRI, Kempen 65-0516-4
109. Gubernur Sumatera Selatan Brigadir Jenderal TNI HAJ. Bustomi, Jaksa Tinggi Sugiarso SH., dan Panglima Daerah Militer IV/ Sriwijaya Brigadir Jenderal Makmun Murod pada saat peluncuran roket "Pramuka Sriwijaya I" di Km 19, 16 Mei 1965
Sumber: ANRI, Kempen 65-0516-5, Kempen 65-0516-1
110. Kejuaraan tennis terbuka Sumatera Selatan-Jambi-Lampung 15 sampai 20 Juni 1965 di Palembang
Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 0857, ID-ANRI F-12 0864
111. Jakabaring Sport City (JSC) atau Kompleks Olahraga Jakabaring merupakan kompleks dari berbagai fasilitas olahraga di Palembang, 2019
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang

F. Kesehatan

112. Bangunan rumah sakit di Plaju, [1940]
Sumber: ANRI, NIGIS-RVD SUMSEL No. B615
113. Seorang pekerja perkebunan perusahaan karet "Tebanan" sedang diperiksa matanya oleh dokter militer Belanda di Palembang, [1940]
Sumber: ANRI, NIGIS-RVD SUMSEL No. FB 60095
114. Seorang ibu dan anaknya sedang diperiksa oleh dokter. Tampak dibelakang para pekerja perkebunan menunggu untuk diperiksa kesehatannya di Palembang [1940]

Sumber: ANRI, NIGIS-RVD SUMSEL No. FB 70093

115. Seorang ibu dan anaknya sedang diperiksa oleh dokter militer di Palembang, [1940]
Sumber: ANRI, NIGIS-RVD SUMSEL NO. FB 80094
116. Pembagian beras untuk para pekerja perkebunan karet "Tebanan" di Palembang, [1940]
Sumber: ANRI, NIGIS-RVD SUMSEL NO. FB 90092
117. Rumah Sakit Umum Palembang, Sumatera Selatan, 11 Maret 1958
Sumber: ANRI, Kempen 580311 DD 3
118. Surat dari Menteri Kesehatan kepada Presiden RI tentang pendirian rumah sakit di Palembang, Sumatera Selatan, 23 Juni 1951
Sumber: ANRI, ANRI: Kabinet Presiden 634
119. Para juru rawat di Rumah Sakit Umum Palembang, 11 Maret 1958
Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 0941

G. Ekonomi Dan Industri

120. Surat Sultan Ratu Ahmad Nadjamudin dari Palembang kepada Komisaris Jenderal van der Capellen mengenai kesepakatan perdagangan, 7 April 1823 (13 Rajab 1238 H)
Sumber: ANRI, Surat Emas No. 18 (Palembang 15)
121. Laporan Residen Palembang tentang Perkebunan, 1867, 31 Oktober 1868
Sumber: ANRI, Palembang 64/9-1
122. Sumber daya mineral yang ditemukan di Palembang: 1.Emas di Sungai Liman Batangassij 2.Belerang di Bukit Kaba, Rejang 3.Timah di Banka 4. Batu Bara di Sungai Ogan 5.Kalium Nitrat di Bukit Kaba, Rejang 6. Garam di Lematang, Ogan, Kikim 7.Batu Kapur di Sungai Ogan
Sumber: ANRI, Palembang No 62-2 1854-1855
123. Kapal-kapal dagang tradisional di Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan [1930]
Sumber: ANRI: KIT 536/43
124. Tanaman Lamtoro dan kopi Robusta di Pasemah, Palembang, Sumatera Selatan, [1930]
Sumber: ANRI, KIT 609/4
125. Kampung eksplorasi minyak di Plaju, Palembang, Sumatera Selatan, [1930]
Sumber: ANRI, KIT 471/20
126. Pangkalan bambu-bambu di kanal Sungai Musi, Palembang, 8 Maret 1948
Sumber: ANRI, NIGIS RVD NO 80308 DD 18
127. Pekerja pabrik karet sedang mencuci lembaran karet dan dipres dengan mesin remilling di Palembang, 20 April 1948
Sumber: ANRI, Kempen 80420 DD 1
128. Buruh karet sedang mengangkut tumpukan karet untuk dinaikkan dalam kapal di Palembang, 20 April 1948
Sumber: ANRI, Kempen 80420 DD 3
129. Kegiatan pekerjasedang memindahkan bongkahan karet ke perahu di Palembang, 21 April 1948
Sumber: ANRI, Kempen 80421 DD 16
130. Suasana kegiatan di pelabuhan tempat penyimpanan sementara batubara, tampak kapal, alat krant, gerbong-gerbong kereta batubara, 7 Mei 1948
Sumber: ANRI, Kempen K 80507 DD 14
131. Rangkaian lori dan gerbong kereta berisi tambang batu bara Bukit Asam di Kertapati, 17 Juli 1948
Sumber: ANRI, Kempen K 80717 DD 9

132. Pangkalan-pangkalan perahu dagang “kampong” di Sungai Musi, yang juga dijadikan sebagai tempat tinggal, Palembang, 18 Desember 1948
Sumber: ANRI, NIGIS RVD NO 81218 DD 4
133. Pedagang makanan di perahu-perahu dagang di Palembang, 3 September 1949
Sumber: ANRI, NIGIS RVD NO 90903 DD 15
134. Area kilang minyak di Plaju, Palembang 26 September 1949
Sumber: ANRI, NIGIS RVD B2022, NIGIS RVD B1692
135. Instalasi kilang minyak BPM Plaju, Palembang 26 September 1949
Sumber: ANRI, NIGIS RVD 90926 DD 5, NIGIS RVD K80217 DD 33
136. Warung-warung diatas Sungai Musi, Palembang, menyediakan berbagai kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari, 31 Agustus 1950
Sumber: ANRI, Kempen 50620
137. Warung-warung di tepi Sungai Musi, Palembang 19 April 1951
Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 0249
138. Pembutan sagu aren di Selat Panjang, Sumatera Selatan, 28 Juli 1951
Sumber: ANRI, Kempen 516628
139. Bupati Lahat meninjau pameran “Indonesia Maju”, di Palembang, Sumatera Selatan, 1951
Sumber: ANRI, Kempen 515296
140. Gubernur Sumatera Selatan Dr. Mohammad Isa meninjau pameran “Indonesia Maju”, di Palembang, Sumatera Selatan, 1951
Sumber: ANRI, Kempen 515585
141. Wakil Presiden Mohammad Hatta melihat-lihat hasil kerajinan rakyat di Palembang, Sumatera Selatan, 26 Juni 1957
Sumber: ANRI, Kempen 570626 DD 3
142. Pembangunan oleh Zeni PIONIR A.D. untuk pembangunan pabrik pupuk “Sriwidjaja” oleh kesatuan tersebut, Palembang, 21 Juli 1960
Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 0181
143. Bagian awal Pidato Presiden Sukarno pada peresmian pemancangan dasar Pabrik Pupuk di Palembang, Sumatera Selatan, 4 November 1960
Sumber: ANRI, Pidato Presiden 237
144. Keputusan Presiden RI Nomor 48 Tahun 1961 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Pajak Pendaftaran Perusahaan dalam Daerah Kotapraja Palembang yang ditetapkan oleh DPRD dalam sidangnya tanggal 13 Agustus 1959, ditetapkan di Jakarta, 31 Januari 1961
Sumber: ANRI, Sekretaris Kabinet Keppres Tahun 1961
145. Pelabuhan Pusri, Pabrik Pupuk Sriwidjaja “Pusri” di Palembang, Oktober 1963
Sumber: ANRI, ID-ANRI_F-12_1021
146. Kunjungan Delegasi Parlemen Jepang di Indonesia ke kilang minyak Stanvac di Sungai Gerong, Palembang 9 Mei 1965
Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 1338, ID-ANRI F-12 1336
147. ungan Delegasi Parlemen Jepang di Indonesia, 5-14 Mei 1965. Ketua Tokuma Utsunomya di tambang batubara, Kertapati, Palembang, 9 Mei 1965
Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 1365 , ID-ANRI F-12 1364
148. Pidato Presiden Soeharto pada Upacara Peresmian Pabrik “Polypropylene di Palembang, 18 juli 1973
Sumber: ANRI, Pidato Presiden Soeharto No. 776
149. Pidato Presiden Soeharto pada peresmian Pabrik Pupuk Pusri II di Palembang, 8 Agustus 1974

Sumber: ANRI, Pidato Presiden Soeharto No. 772.2

150. Pidato Presiden Soeharto pada Peresmian penggunaan Pusat Listrik Tenaga Uap Palembang, 26 Maret 1975
Sumber: ANRI, Pidato Presiden Soeharto No. 912.3
151. Pidato Presiden Soeharto pada Peresmian Pabrik Pupuk Pusri III di Palembang, 29 Desember 1976
Sumber: ANRI, Pidato Presiden Soeharto No. 772.3

H. Infrastruktur

152. Gambar denah situasi Kraton di Palembang, 1855
Sumber: ANRI, Van Oorlog HB. 5154
153. Gambar denah sebuah kraton di Palembang, 20 Oktober 1860
Sumber: ANRI, Van Oorlog HB.3661
154. Gambar konstruksi tentang pemasangan plat baja pada dinding bastion di sebuah keraton di Palembang (5 gambar: plattegrond situatie, doorsnede, aanzicht), 3 Oktober 1890
Sumber: ANRI, Van Oorlog HB. 3483
155. Gambar denah sebuah keraton di Palembang (gambar 1), 27 Juli 1893
Sumber: ANRI, Van Oorlog HB. 3704
156. Gambar rancang bangun WC pasukan disertai dengan jembatan akses pada tiang penyangga besi di atas sungai musi di Palembang (7 gambar : plattegrond, doorsnede, situatie, lengledoorsnede), 24 Oktober 1895
Sumber: ANRI, Van Oorlog HB. 3875
157. Jalan raya utama di Palembang, Sumatera Selatan, [1930]
Sumber: ANRI, KIT 760/27
158. Jalan Tengkuruk di Palembang, Sumatera Selatan, [1930]
Sumber: ANRI, KIT 761/66
159. Jalan dari Palembang menuju Pagar Alam, Sumatera Selatan, [1930]
Sumber: ANRI, KIT 511/80
160. Kantor Sirah Kepala Kampong 9 Ilir di Palembang, 8 Maret 1948
Sumber: ANRI, NIGIS-RVD SUMSEL NO. 8038 DD 13
161. Rumah administratur di Plaju, 8 Maret 1948
Sumber: ANRI, NIGIS-RVD SUMSEL NO.80308 DD 8
162. Rumah kayu panggung di tepi Sungai Musi, Palembang, 20 April 1948
Sumber: ANRI, NIGIS-RVD SUMSEL NO. 80420 DD 13
163. Suasana jalan raya di Palembang dengan mobil-mobil yang terpakir yang datang dari perahu tambang, 7 Mei 1948
Sumber: ANRI, NIGIS-RVD SUMSEL NO. 80420 DD 13
164. Jembatan lengkung Julian di atas Sungai Ogan, Palembang, 14 Agustus 1948
Sumber: ANRI, NIGIS-RVD SUMSEL NO. 80814 DD 1-2
165. Kantor Gubernur Sumatera Selatan di Palembang, 25 Agustus 1950
Sumber: ANRI, Kempen 50559
166. Dengan riang gembira anak-anak Indonesia dan penduduk setempat melewati jembatan yang baru dibuka setelah perbaikan oleh Genie Veldcompagnie di Ogan, 20 Desember 1948
Sumber: ANRI, NIGIS-RVD SUMSEL NO. FG 163
167. Kolonel Mollinger bersalaman dengan Letnan Benthem cdt.2e Genie Veld Comp. pada saat pembukaan jembatan setelah perbaikan di Ogan dekat Tanjung Raja, disaksikan para

- tamu undangan, 20 Desember 1948
Sumber: ANRI, NIGIS-RVD SUMSEL NO. FG 161
168. Rumah-rumah panggung di belakang sungai dan perahu-perahu (type kampung tua) di Palembang, 3 September 1949
Sumber: ANRI, NIGIS-RVD SUMSEL NO. 90903 DD 9
 169. Hotel Ruys di Palembang, 4 Oktober 1949
Sumber: ANRI, NIGIS RVD NO 91004 DD 2, NIGIS RVD NO 91004 DD 3
 170. Palembang, Rumah2 penduduk di atas sungai Musi, 19 April 1950
Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 0227
 171. Palembang, Rumah2 penduduk di atas sungai Musi, 19 April 1950
Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 0224
 172. Suasana keindahan Gedung Water Toren (sekarang Kantor Walikota Palembang) di waktu senja hari di Palembang, 25 Agustus 1950
Sumber: ANRI, NIGIS-RVD SUMSEL NO. 90830 DD 7-1
 173. Suasana gedung Water Toren (sekarang Kantor Walikota Palembang) di Palembang, 25 Agustus 1950
Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 0179
 174. Suasana Kantor Walikota Palembang di waktu malam, 2019
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang
 175. Suasana Kantor Walikota Palembang, 3 Mei 2019
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang
 176. Rumah-rumah penduduk di tepi Sungai Musi, Palembang, 19 April 1951
Sumber: ANRI, Kempen 512493
 177. Pembangunan salah satu jembatan di atas Sungai Musi, Palembang, pembangunan pilar-pilar beton untuk jembatan dengan menggunakan perahu derek, 14 Desember 1953
Sumber: ANRI, Kempen K531214 DD 1-1
 178. Perumahan rakyat di Palembang, rumah-rumah yang telah dibangun untuk disewakan kepada rakyat di Palembang, 15 Desember 1953
Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 0212 b, Kempen 531215 DD 1
 179. Pembangunan di Palembang, Gedung Gubernur jang sedang dibangun di Palembang, 11 Maret 1958
Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 0117
 180. Pembangunan Kantor Gubernur Sumatera Selatan di Palembang, 11 Maret 1958
Sumber: ANRI, Kempen 580311 DD 1-3
 181. Pidato PJM Presiden Sukarno pada pembukaan gedung baru RRI Palembang pada tanggal 10 April 1962
Sumber: ANRI, Pidato Presiden 381
 182. Pidato Presiden Sukarno pada upacara pemancangan tiang pertama proyek Jembatan Musi di Palembang (sekarang dikenal sebagai Jembatan Ampera), 10 April 1962
Sumber: ANRI, Pidato Presiden No. 383
 183. Presiden Sukarno meresmikan tiang pancang pertama Jembatan Sungai Musi di Palembang, (sekarang dikenal sebagai Jembatan Ampera), 10 April 1962
Sumber: ANRI, Kempen 620410 DD 10
 184. Pembangunan Jembatan Sungai Musi di Palembang, (sekarang dikenal sebagai Jembatan Ampera), 20 Oktober 1963
Sumber: ANRI, Kempen 63-13109
 185. Jembatan Ampera di atas Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan, 9 Mei 1965

Sumber: ANRI, Kempen 65-4123

186. Proyek jembatan Musi, panjang 1200 meter, Palembang 9 Mei 1965
Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 1359
187. Parlemen Jepang yang diketuai Tokuma Utsunomya meninjau Proyek Jembatan Ampera di atas Sungai Musi, Palembang, 9 Mei 1965
Sumber: ANRI, ID-ANRI_F-12_1339
188. Jembatan Ampera di atas Sungai Musi, Palembang, 3 Mei 2019
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang

I. Transportasi

189. Lalu-lintas perdagangan di air/Sungai Musi, tampak sampan yang dimuati sebagai alat transportasi dan perahu-perahu beratap, 8 Maret 1948
Sumber: ANRI, NIGIS RVD NO 80308 DD 10
190. Gerobak sapi yang melintas jembatan yang baru diresmikan di Ogan, 20 Desember 1948
Sumber: ANRI, NIGIS-RVD SUMSEL NO. FG 1620087
191. Percontohan kereta api baru antara Kertapati-Prabumulih di Sumatera Selatan yang dihadiri oleh J.U. Menteri Perhubungan Mr. Soekandar, [1950]
Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 1244, ID-ANRI F-12 1237
192. Suasana di sekitar Sungai Musi terlihat perahu sebagai sarana transportasi, Palembang, 25 Agustus 1950
Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 0484
193. Suasana di sekitar Sungai Musi terlihat perahu sebagai sarana transportasi, Palembang, 25 Agustus 1950
Sumber: ANRI, ID-ANRI_F-12_0486
194. Lalu lintas kendaraan transportasi di Kota Palembang, di belakang nampak menara air, Palembang 1 Juli 1951
Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 0478
195. Perahu tambangan sebagai sarana transportasi di Sungai Musi, Palembang, 4 Mei 1955
Sumber: ANRI, ID-ANRI F-12 0595
196. Kapal Pengangkut Jema'ah haji Indonesia asal Palembang, Sumatera Selatan, 5 Mei 1965
Sumber: ANRI, Kempen 65-055/1
197. Suasana pembangunan jalur LRT (Light Rail Transit) sepanjang 25 kilometer menghubungkan Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II dengan Kompleks Olahraga Jakabaring di Kota Palembang, 2 November 2017
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang
198. Transportasi LRT (Light Rail Transit) di Kota Palembang yang dimulai pengoperasiannya pada 23 Juli 2018
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang

DAFTAR PUSTAKA

- Amanat Pembangunan Presiden*.1961. Jakarta: Jajasan Prapantja.
- Alfian, Ibrahim, dkk. 1984. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperilisme dan Kolonialisme di Daerah Sumatera Selatan*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Boechari. 1993. *Bunga Rampai Sriwijaya*. Jakarta: Depdikbud.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. 1992. *Profil Propinsi Republik Indonesia-Sumatera Selatan*. Jakarta : Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara.
- Encyclopedie van Nederlandsch Indie*.1918. Leiden : EJ Brill.
- G, Fischer. 1920. *Een Papierfabriek te Palembang*.Palembang: (s.n).
- Hanafiah, Djohan.1988. *Kuto Gawang: Pergolakan dan Permainan Politik dalam Kelahiran Kesultanan Palembang Darussalam*. Palembang:
_____.1989. *Kuto Besak: Upaya Kesultanan Palembang Menegakkan Kemerdekaan*. Jakarta: Penerbit Mas Agung.
- .Kahin, A.R. 1989. *Pergerakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Karsten, Thomas H. 1931. "Staatbouw", dalam W.F.M. Kerchman (ed.), 25 Jaren Decentralisatie Nederlandsch-Indie 1905-1950. Semarang: Vereeniging voor Locale Belangen.
- Lapian, A.B. dan J.R. Chaniago (ed). 1988. *Di bawah Pendudukan Jepang. Kenangan Empat Puluh Dua Orang yang Mengalaminya*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Leur, J.C. van. 1955. *Indonesian Trade and Society*. Bnadung: The Haque.
- Resink, G.J. 1987. *Raja dan Kerajaan yang Merdeka di Indonesia 1850-1910*, Jakarta: Djambatan.
- Ricklefs, M.C. 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta : Serambi.
- Roo, de la Faille P. 1971. *Dari Zaman Kesultanan Palembang*. Djakarta: Bhratara.
- Royen, J.W. van. 1927. *De Palembangse Marga en haar Grond-en Waterrechten*. Leiden: G.L. van den Berg.
- Santun, Dedi Irwanto Muhammad. 2011. *Venesia dari Timur: Memaknai Produksi dan Reproduksi Simbolik Kota Palembang dari Kolonial sampai Pascakolonial*. Yogyakarta: Ombak.

- Suroyo, A.M. Djuliaty, dkk. 2012. *Indonesia dalam Arus Sejarah; Kolonisasi dan Perlawanan 4*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Team Penulisan Riwayat Hidup Dr. Adnan Kapau Gani. 1985. *Risalah Singkat Riwayat Hidup Perjuangannya*. Jakarta: tanpa penerbit.
- WM, Abdul Hadi, dkk. 2012. *Indonesia dalam Arus Sejarah; Kedatangan dan Peradaban Islam 3*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Zed, Mestika. 2003. *Kepialangan Politik dan Revolusi: Palembang 1900-1950*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

PENUTUP

Program citra Daerah yang dikembangkan ANRI merupakan salah satu upaya memberdayakan daerah melalui arsip. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, yakni meningkatkan peran daerah diberbagai bidang, termasuk bidang kearsipan. Lembaga Kearsipan diharapkan mampu menjadi salah satu dinas atau instansi yang dapat mewujudkan “*clean government*” dipemerintahan daerah maupun pusat dengan melakukan penyelamatan arsip yang bernilai pertanggungjawaban historis dan hukum.

Arsip sebagai bukti otentik dan sumber informasi yang terpercaya dalam sejarah perjalanan bangsa sesungguhnya dapat menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan yang dialami pada masa lalu untuk dijadikan pelajaran dalam pengambilan kebijakan pada masa kini. Dan juga kita dapat belajar dari sejarah masa lalu untuk kemajuan dimasa kini dalam merencanakan pembangunan di daerah yang semakin kompleks. Citra Kota Palembang ini diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh pemererintah daerah setempat dengan menyebarluaskan kepada sekolah-sekolah akademisi, dewan, dan masyarakat umum.

Penyebarluasan ini sangat penting artinya karena dapat memberikan dorongan kepada masyarakat luas untuk mempelajari dan menggali lebih dalam lagi informasi mengenai penyelenggaraan kehidupan kebangsaan dalam lingkup daerah. Dan akhirnya arsip dapat menjadi memori kolektif daerah yang berfungsi sebagai pemberi semangat dalam menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Arsip Nasional Republik Indonesia

Jl. Ampera Raya No. 7, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560

Telp. 62-21-7805851, Fax.62-21-7810280, 7805812

[http//www.anri.go.id](http://www.anri.go.id), e-mail: info@anri.go.id